SETJEN
MPR RI

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

#bangga melayani bangsa

LAPORAN KINERJA TAHUN 2021

Sekretariat Jenderal MPR RI

Jl. Gatot Subroto No. 6
Jakarta Pusat 10270

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum, wr. wb.

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas bimbingan-Nya, penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat Tahun 2021 dapat diselesaikan. LKIP Sekretariat Jenderal MPR Tahun 2021 menjelaskan hasil yang telah dicapai dari program dan kegiatan yang telah direncanakan selama tahun 2021 yang berorientasi pada visi dan misi Sekretariat Jenderal MPR.

Sekretariat Jenderal MPR pada tahun 2021 telah berusaha melaksanakan tugas dan fungsinya dengan mengacu kepada Perjanjian Kinerja dan Indikator Kinerja Utama. Capaian keberhasilan kinerja tahun 2021 akan menjadi tolak ukur untuk peningkatan kinerja Sekretariat Jenderal MPR pada tahun 2022. Melalui laporan kinerja ini, diharapkan dapat memberikan gambaran objektif tentang sistem akuntabilitas yang telah dilaksanakan di lingkungan Sekretariat Jenderal MPR.

Semoga LKIP Setjen MPR ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan umpan balik bagi upaya perbaikan dan peningkatan kinerja di masa yang akan datang dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel dan sejalan dengan visi Sekretariat Jenderal MPR, yaitu: **"Penggerak Utama Reformasi Birokrasi dalam Memberikan Layanan Internal Kepada MPR dan Alat Kelengkapannya Serta Meningkatkan Kualitas Layanan Publik MPR."**

Wassalamualaikum, wr. wb.

Jakarta, 25 Februari 2022
Sekretaris Jenderal MPR RI

MA'RUF CAHYONO
NIP. 196704291995031001

PERNYATAAN TELAH DIREVIU

SEKRETARIAT JENDERAL
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 6, Jakarta Pusat 10270
Telepon 57895285 Faksimili 57895178, website:mpr.go.id

PERNYATAAN TELAH DIREVIU
SEKRETARIAT JENDERAL MPR RI
TAHUN ANGGARAN 2021

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal MPR RI Tahun Anggaran 2021 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggungjawab Pimpinan Sekretariat Jenderal MPR RI.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Jakarta, 25 Februari 2022
Inspektur

MAIFRIZAL
NIP. 196605121995031003

IKHTISAR EKSEKUTIF

Pada periode 2019 - 2020, Setjen MPR mengalami transformasi kelembagaan dengan terbitnya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2019 tentang Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. Perubahan mendasar dari Peraturan Presiden tersebut adalah Sekretariat Jenderal MPR terdiri atas Deputi Bidang Administrasi dan Deputi Bidang Pengkajian dan Pemasyarakatan Konstitusi yang sebelumnya Sekretaris Jenderal dibantu oleh Wakil Sekretaris Jenderal.

Sebagai turunan dari Peraturan Presiden tersebut, diterbitkan Peraturan Sekretaris Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat. Perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) tersebut berdampak langsung terhadap impelementasi SAKIP, khususnya pada aspek Perencanaan. Setjen MPR melakukan penyesuaian sasaran strategis dan indikator kinerja guna meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas Setjen MPR. Perjanjian Kinerja Sekretaris Jenderal MPR Tahun 2020 terdiri dari 9 (sembilan) Sasaran Program dan 11 (sebelas) Indikator Kinerja Utama:

Tabel 1. Perjanjian Kinerja Tahun 2020

No.	Sasaran Strategis	No.	Indikator Kinerja Utama
1	Meningkatnya Kepuasan MPR dan Alat Kelengkapannya Terhadap Layanan Internal Sekretariat Jenderal MPR	1	Indeks Kepuasan MPR dan Alat Kelengkapannya Terhadap Layanan Internal Setjen MPR
2	Terwujudnya Efektivitas, Efisiensi dan Akuntabilitas dalam Pengelolaan Birokrasi Sekretarian Jenderal MPR	2	Nilai Reformasi Birokrasi (RB)
		3	Opini BPK atas Laporan Keuangan
		4	Nilai Akuntabilitas Kinerja Setjen MPR
3	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik MPR	5	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
4	Meningkatnya Kualitas Layanan Kesekretariatan Setjen MPR	6	Jumlah Keluhan Terhadap Layanan Kesekretariatan
5	Meningkatnya Efektifitas dan Efisiensi Penyelenggaraan Sidang MPR	7	Jumlah Keluhan MPR dan Alat Kelengkapannya Terhadap Layanan Persidangan

No.	Sasaran Strategis	No.	Indikator Kinerja Utama
6	Terselenggaranya Dukungan Pelaksanaan Sosialisasi Konstitusi Secara Efektif dan Efisien	8	Rasio Respon Masyarakat atas Sosialisasi yang Diberikan Terhadap Total Frekuensi Sosialisasi yang Dilakukan
7	Terselenggaranya Pengelolaan Aspirasi Masyarakat Secara Komprehensif	9	Jumlah Aspirasi Masyarakat yang Hilang atau Tidak Terdokumentasi dengan Baik
8	Meningkatnya Pelaksanaan 8 (delapan) Area Perubahan Setjen MPR	10	Total Nilai Kriteria Pengungkit RB
9	Optimasi Implementasi e-Gov Setjen MPR RI	11	Rasio Program RB yang Sudah Berbasis TIK Terhadap Total Program RB yang Seharusnya Berbasis TIK

Dengan perubahan SOTK, Perjanjian Kinerja Setjen MPR tahun 2021 disesuaikan dan mengalami perubahan dari 9 (sembilan) menjadi 7 (tujuh) Sasaran Strategis, dan dari 11 (sebelas) menjadi 10 (sepuluh) Indikator Kinerja Utama. Berikut tabel Perjanjian Kinerja Sekretaris Jenderal MPR Tahun 2021:

Tabel 2. Perjanjian Kinerja Tahun 2021

No	Sasaran Strategis	No.	Indikator Kinerja Utama
1	Meningkatnya Kepuasan MPR RI dan Alat Kelengkapan terhadap Layanan Sekretariat Jenderal MPR.	1	Indeks Kepuasan MPR RI terhadap Dukungan Setjen MPR RI.
2	Terwujudnya Birokrasi Setjen MPR RI Berkelas Dunia.	2	Indeks Reformasi Birokrasi Setjen MPR RI .
		3	Tingkat Pemenuhan Layanan Internal Sekretariat Jenderal MPR RI.
3	Terselenggaranya Dukungan Bidang Pengkajian dan Pemasyarakatan Konstitusi, Serta Penyerapan Aspirasi Masyarakat yang Berkualitas Kepada MPR.	4	Rasio Draf Hasil Kajian Sistem Ketatanegaraan Setjen MPR RI yang Dimanfaatkan terhadap Total Draf Hasil Kajian Sistem Ketatanegaraan yang Dihasilkan.

No	Sasaran Strategis	No.	Indikator Kinerja Utama
		5	Rasio Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi 4 (Empat) Pilar terhadap Total yang Direncanakan.
		6	Rasio Tindak Lanjut Aspirasi Masyarakat terhadap Total Aspirasi Masyarakat.
4	Terselenggaranya Dukungan Bidang Administrasi yang Berkualitas Kepada MPR.	7	Indeks Kepuasan MPR RI terhadap Dukungan Administrasi.
5	Meningkatnya Pelaksanaan 8 (delapan) Area Perubahan Setjen MPR RI.	8	Nilai Komponen Pengungkit Reformasi Birokrasi Setjen MPR RI.
6	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Birokrasi Setjen MPR.	9	Total Nilai Kriteria Hasil Reformasi Birokrasi Sekretariat Jenderal MPR RI.
7	Terselenggaranya Layanan Internal Setjen MPR RI.	10	Tingkat Pemenuhan Layanan Internal Sekretariat Jenderal MPR RI.

Laporan Kinerja Setjen MPR Tahun 2021 berisikan tentang capaian-capaian Setjen MPR, pertanggungjawaban kinerja serta penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Berikut adalah hasil capaian 7 (tujuh) sasaran strategis yang didukung oleh 10 (sepuluh) indikator kinerja utama Setjen MPR Tahun 2021.

Sasaran strategis pertama yaitu **Meningkatnya Kepuasan MPR RI dan Alat Kelengkapan Terhadap Layanan Sekretariat Jenderal MPR**. Capaian sasaran strategis ini sebesar **104.38%,** didukung dengan 1 (satu) IKU; Indeks Kepuasan MPR RI terhadap Dukungan Setjen MPR RI. Dukungan Setjen MPR yang dimaksud adalah: dukungan Pelaksanaan Tugas Pimpinan MPR, dukungan Pelaksanaan Sosialisasi Empat Pilar MPR, dukungan Pengkajian Kemajelisan, dukungan Pengelolaan Tugas Konstitusional MPR RI. Persepsi kepuasan diukur dengan survei kepada Pimpinan dan Alat Kelengkapan MPR RI akan layanan yang diberikan oleh Setjen MPR di tahun 2021.

Sasaran strategis kedua yaitu **Terwujudnya Birokrasi Setjen MPR RI Berkelas Dunia.** Capaian sasaran strategis ini sebesar **94.72%,** didukung dengan 2 (dua) IKU; Indeks Reformasi Birokrasi Setjen MPR RI dan Tingkat Pemenuhan Layanan Internal Sekretariat Jenderal MPR RI. Indeks Reformasi Birokrasi Setjen MPR diambil dari Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2020 oleh Kemenpan RB dikarenakan pada saat laporan kinerja ini disusun, hasil evaluasi tahun 2021 belum keluar. Tingkat Pemenuhan Layanan Internal Sekretariat Jenderal MPR RI yang dimaksud adalah; layanan Pengelolaan Administrasi MPR dan Sekretariat Jenderal, layanan Pengelolaan Administrasi Publikasi, layanan Pengelolaan Administrasi Keuangan Sekretariat Jenderal, layanan Pengelolaan Administrasi Sarana dan Prasarana Kantor, dan Layanan Inspektorat.

Sasaran strategis ketiga yaitu **Terselenggaranya Dukungan Bidang Pengkajian dan Pemasyarakatan Konstitusi, Serta Penyerapan Aspirasi Masyarakat yang Berkualitas Kepada MPR.** Capaian sasaran strategis ini sebesar **103.84%,** didukung dengan 3 (tiga) IKU; Rasio Draf Hasil Kajian Sistem Ketatanegaraan Setjen MPR RI yang Dimanfaatkan terhadap Total Draf Hasil Kajian Sistem Ketatanegaraan yang Dihasilkan, Rasio Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi 4 (Empat) Pilar terhadap Total yang Direncanakan, dan Rasio Tindak Lanjut Aspirasi Masyarakat terhadap Total Aspirasi Masyarakat.

Sasaran strategis keempat yaitu **Terselenggaranya Dukungan Bidang Administrasi yang Berkualitas Kepada MPR.** Capaian sasaran strategis ini sebesar **107.50%,** didukung dengan 1 (satu) IKU; Indeks Kepuasan MPR RI terhadap Dukungan Administrasi. Dukungan Administrasi yang dimaksud adalah: dukungan administrasi Pelaksanaan Tugas Pimpinan MPR, dukungan administrasi Pelaksanaan Tugas Konstitusional MPR RI, dukungan administrasi Pengelolaan Administrasi Keuangan MPR, dan dukungan administrasi Penganggaran MPR. Indeks kepuasan diukur dengan survei kepada Pimpinan dan Alat Kelengkapan MPR RI akan dukungan administrasi yang diberikan oleh Setjen MPR di tahun 2021.

Sasaran strategis kelima yaitu **Meningkatnya Pelaksanaan 8 (delapan) Area Perubahan Setjen MPR RI.** Capaian sasaran strategis ini sebesar **92.60%,** didukung dengan 1 (satu) IKU; Nilai Komponen Pengungkit Reformasi Birokrasi Setjen MPR RI. Komponen Pengungkit Reformasi Birokrasi diambil dari Komponen Pengungkit Laporan Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2020, dikarenakan saat laporan kinerja ini disusun, hasil evaluasi RB Setjen MPR tahun 2021 belum dikeluarkan oleh Kemenpan RB. Penilaian komponen pengungkit terdiri dari: Pemenuhan, Hasil Antara Area Perubahan, dan Reform.

Sasaran strategis keenam yaitu **Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Birokrasi Setjen MPR.** Capaian sasaran strategis ini sebesar **95.36%,** didukung dengan 1 (satu) IKU; Total Nilai Kriteria Hasil Reformasi Birokrasi Sekretariat Jenderal MPR RI. Nilai Kriteria Hasil Reformasi Birokrasi diambil dari Komponen Hasil Laporan Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2020, dikarenakan saat laporan kinerja ini disusun, hasil evaluasi RB Setjen MPR tahun 2021 belum dikeluarkan oleh Kemenpan RB. Penilaian komponen hasil terdiri dari: Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan, Kualitas Pelayanan Publik, Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN, dan Kinerja Organisasi.

Sasaran strategis ketujuh yaitu Terselen**ggaranya Layanan Internal Setjen MPR RI.** Capaian sasaran strategis ini sebesar **116.28%,** didukung dengan 1 (satu) IKU; Tingkat Pemenuhan Layanan Internal Sekretariat Jenderal MPR RI. Layanan Internal Setjen MPR RI yang dimaksud adalah; layanan Pengelolaan Barang Milik Negara dan Sarana Prasarana Kantor, layanan Pengelolaan Administrasi MPR dan Sekretariat Jenderal, dan layanan Pengelolaan Administrasi Keuangan Sekretariat Jenderal.

Berdasarkan capaian dari 10 (sepuluh) IKU, rata-rata kinerja yang dihasilkan oleh Sekretariat Jenderal MPR secara akumulatif sebesar 101.71%. Capaian tersebut masuk kategori kinerja sangat baik. Analisis selanjutnya dilakukan terhadap capaian kinerja anggaran Sekretariat Jenderal MPR tahun 2021. Dari pagu anggaran yang diberikan sebesar Rp.777.272.751.000,- berhasil diserap sebesar Rp.714.215.311.825,- atau serapan anggaran sebesar 91.89%, dan termasuk kategori kinerja baik. Terdapat gap sebesar 9.82 antara capaian kinerja dan capaian anggaran, sehingga dapat diartikan bahwa antara perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, dan capaian kinerja Setjen MPR tahun 2021 **tepat guna dan tepat hasil**.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR I

PERNYATAAN TELAH DIREVIU II

IKHTISAR EKSEKUTIF III

DAFTAR ISI VIII

DAFTAR TABEL X

DAFTAR GRAFIK XII

DAFTAR GAMBAR XIV

DAFTAR LAMPIRAN XV

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Organisasi, Tugas dan Fungsi Sekretariat Jenderal MPR 2

1.2.1 Sekretariat Jenderal 3

1.2.2 Deputi Bidang Administrasi 4

1.2.3 Deputi Bidang Pengkajian dan Pemasyarakatan Konstitusi 5

1.2.4 Inspektorat 6

1.3 Sumber Daya Manusia Sekretariat Jenderal MPR 7

1.4 Dukungan Anggaran 9

1.5 Permasalahan Strategis 9

1.6 Pelaksanaan Rencana Aksi Tindak Lanjut Laporan Kinerja 2020 10

1.7 Penghargaan yang Diterima Setjen MPR 12

BAB II PERENCANAAN KINERJA 15

2.1 Visi Sekretariat Jenderal MPR 15

2.2 Misi Sekretariat Jenderal MPR 16

2.3 Tujuan Sekretariat Jenderal MPR 17

2.4 Sasaran Strategis Sekretariat Jenderal MPR....18

2.5 Perjanjian Kinerja Tahun 2021....18

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA....23

3.1 Kriteria Ukuran Keberhasilan....23

3.2 Pencapaian Kinerja Tahun 2021....24

3.2.1 Indeks Kepuasan MPR RI Terhadap Dukungan Setjen MPR RI....27

3.2.2 Indeks Reformasi Birokrasi Setjen MPR RI....36

3.2.3 Tingkat Pemenuhan Layanan Internal Sekretariat Jenderal MPR RI....40

3.2.4 Rasio Draf Hasil Kajian Sistem Ketatanegaraan Setjen MPR RI Yang Dimanfaatkan Terhadap Total Draf Hasil Kajian Sistem Ketatanegaraan Yang Dihasilkan....44

3.2.5 Rasio Masyarakat Yang Mendapatkan Sosialisasi 4 (Empat) Pilar Terhadap Total Yang Direncanakan....51

3.2.6 Rasio Tindak Lanjut Aspirasi Masyarakat Terhadap Total Aspirasi Masyarakat....58

3.2.7 Indeks Kepuasan MPR RI Terhadap Dukungan Administrasi....63

3.2.8 Nilai Komponen Pengungkit Reformasi Birokrasi Setjen MPR RI....68

3.2.9 Total Nilai Kriteria Hasil Reformasi Birokrasi Sekretariat Jenderal MPR RI....78

3.2.10 Tingkat Pemenuhan Layanan Internal Sekretariat Jenderal MPR RI....82

3.3 Capaian Kinerja Anggaran....84

BAB IV RENCANA AKSI DAN TINDAK LANJUT....85

PENUTUP....89

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Perjanjian Kinerja Tahun 2020 III

Tabel 2. Perjanjian Kinerja Tahun 2021 IV

Tabel 1.1 Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2021 9

Tabel 1.2 Pelaksanaan Rencana Aksi Tindak Lanjut Tahun 2020 10

Tabel 2.1 Perjanjian Kinerja Sekretaris Jenderal MPR Tahun 2021 19

Tabel 3.1 Kategori Kinerja Setjen MPR 23

Tabel 3.2 Perjanjian Kinerja Sekretaris Jenderal MPR Tahun 2021 24

Tabel 3.3 Hasil Survei Indeks Kepuasan Terhadap Dukungan Setjen MPR RI Tahun 2021 30

Tabel 3.4 Kegiatan, Unit Penanggung Jawab dan Responden Survei Indeks Kepuasan Terhadap Dukungan Setjen MPR RI Tahun 2021 30

Tabel 3.5 Nilai Persepsi, Interval IKM, Interval Konversi IKM dan Kinerja Unit Pelayanan 31

Tabel 3.6 Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2020 37

Tabel 3.7 Hasil Survei Tingkat Pemenuhan Layanan Internal Sekretariat Jenderal MPR RI Tahun 2021 41

Tabel 3.8 Kegiatan, Unit Penanggung Jawab dan Responden Survei Tingkat Pemenuhan Layanan Internal Sekretariat Jenderal MPR RI Tahun 2021 41

Tabel 3.9 Nilai Persepsi, Interval IKM, Interval Konversi IKM dan Kinerja Unit Pelayanan 42

Tabel 3.10 Kegiatan, Unit Penanggung Jawab dan Responden Survei Tingkat Pemenuhan Layanan Internal Sekretariat Jenderal MPR RI Tahun 2021 47

Tabel 3.11 Target dan Capaian Sosialisasi 4 (Empat) Pilar Tahun 2021 54

Tabel 3.12 Hasil Survei Indeks Kepuasan MPR RI Terhadap Dukungan Administrasi Tahun 2021 64

Tabel 3.13 Kegiatan, Unit Penanggung Jawab dan Responden Survei Indeks Kepuasan MPR RI Terhadap Dukungan Adminstrasi Tahun 2021 65

Tabel 3.14 Nilai Persepsi, Interval IKM, Interval Konversi IKM dan Kinerja Unit Pelayanan.....65

Tabel 3.15 Hasil Evaluasi Komponen Pengungkit Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2020.....69

Tabel 3.16 Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Tahun 2021.....71

Tabel 3.17 Hasil Evaluasi Kriteria Komponen Hasil Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2020.....79

Tabel 3.18 Hasil Survei Eksternal Setjen MPR Tahun 2021.....80

Tabel 3.19 Rincian *Output* Kegiatan Pendukung Tingkat Pemenuhan Layanan Internal Sekretariat Jenderal MPR RI Tahun 2021.....82

Tabel 4.1 Rencana Aksi Tindak Lanjut Sekretariat Jenderal MPR 2020.....85

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.1 Komposisi Pegawai Tahun 2021 Berdasarkan Golongan 7

Grafik 1.2 Persentase Komposisi Pegawai Tahun 2021 Berdasarkan Pendidikan 8

Grafik 1.3 Komposisi Pejabat Tahun 2021 8

Grafik 3.1 Capaian Kinerja Tahun 2017 – 2021 27

Grafik 3.2 Capaian Indeks Kepuasan MPR RI Terhadap Dukungan Setjen MPR RI Tahun 2021 31

Grafik 3.3 Capaian Indeks Kepuasan MPR RI Terhadap Dukungan Setjen MPR RI Tahun 2017 – 2021 32

Grafik 3.4 Capaian Indeks Reformasi Birokrasi Setjen MPR RI Tahun 2021 37

Grafik 3.5 Indeks Reformasi Birokrasi Setjen MPR RI Tahun 2015 – 2021 38

Grafik 3.6 Capaian Tingkat Pemenuhan Layanan Internal Sekretariat Jenderal MPR RI Tahun 2021 43

Grafik 3.7 Capaian Rasio Draf Hasil Kajian Sistem Ketatanegaraan Setjen MPR RI yang Dimanfaatkan Terhadap Total Draf Hasil Kajian Sistem Ketatanegaraan yang Dihasilkan Tahun 2021 47

Grafik 3.8 Perbandingan Target dan Realisasi Capaian Rasio Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi 4 (Empat) Pilar terhadap Total yang Direncanakan Tahun 2021 54

Grafik 3.9 Persebaran Wilayah Kegiatan Sosialisasi Empat Pilar MPR RI Tahun 2021 56

Grafik 3.10 Perbandingan Capaian Kinerja Rasio Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi 4 (Empat) Pilar terhadap Total yang Direncanakan Tahun 2019 – 2021 57

Grafik 3.11 Capaian Rasio Tindak Lanjut Aspirasi Masyarakat Terhadap Total Aspirasi Masyarakat Tahun 2021 60

Grafik 3.12 Rasio Tindak Lanjut Aspirasi Masyarakat terhadap Total Aspirasi Masyarakat 61

Grafik 3.13 Capaian Indeks Kepuasan MPR RI Terhadap Dukungan Administrasi Tahun 2021 66

Grafik 3.14. Capaian Nilai Komponen Pengungkit Reformasi Birokrasi Setjen MPR RI Tahun 2021 69

Grafik 3.15. Nilai Komponen Pengungkit Reformasi Birokrasi Setjen MPR RI Tahun 2015 – 2021 70

Grafik 3.16 Capaian Total Nilai Kriteria Hasil Reformasi Birokrasi Sekretariat Jenderal MPR RI Tahun 2021 81

Grafik 3.17 Total Nilai Kriteria Hasil Reformasi Birokrasi Sekretariat Jenderal MPR RI Tahun 2015 – 2021 81

Grafik 3.18 Capaian Tingkat Pemenuhan Layanan Internal Sekretariat Jenderal MPR RI Tahun 2021 83

Grafik 3.19 Tren Capaian Kinerja dan Anggaran 2015 – 2021 84

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Setjen MPR 3

Gambar 3.1 Penerimaan Tamu dan Delegasi 28

Gambar 3.2 Kunjungan Kerja Pimpinan MPR Tahun 2021 29

Gambar 3.3 Peringatan Hari Konstitusi dan HUT Ke-76 MPR RI 32

Gambar 3.4 Pelayanan Pergantian Antar Waktu Anggota MPR Tahun 2021 .. 35

Gambar 3.5 Pelayanan Keprotokoleran Tahun 2021 35

Gambar 3.6 Rapat Kerja Reformasi Birokrasi Tahun 2021 36

Gambar 3.7 Rapat Badan Pengkajian Tahun 2021 46

Gambar 3.8 Diseminasi Hasil Kajian Tahun 2021 46

Gambar 3.9 Alur Pemanfaatan Draf Hasil Kajian Tentang Pokok-Pokok Haluan Negara Badan Pengkajian MPR RI Tahun 2021 49

Gambar 3.10 Alur Pemanfaatan Draf Hasil Kajian Tentang Evaluasi UUD NRI Tahun 1945 Badan Pengkajian MPR RI Tahun 2021 50

Gambar 3.11 Lomba Video Animasi Empat Pilar Tahun 2021 51

Gambar 3.12 Sosialisasi Empat Pilar Berbasis Komunitas Tahun 2021 52

Gambar 3.13 Sosialisasi Empat Pilar Berbasis Ormas Tahun 2021 53

Gambar 3.14 Rapat Kerja Biro Pengkajian dan Konstitusi Tahun 2021 59

Gambar 3.15 Penyerapan Aspirasi Masyarakat Oleh Badan Pengkajian Tahun 2021 59

Gambar 3.16 Pelaksanaan Apel Setiap Hari Senin 63

Gambar 3.17 Temu Tokoh Nasional 67

Gambar 3.18 Rapat Kelompok Kerja RB Tahun 2021 77

Gambar 3.19 Rapat Kelompok Kerja RB Tahun 2021 78

Gambar 3.20 Rapat Kelompok Kerja RB Tahun 2021 79

DAFTAR LAMPIRAN

Perjanjian Kinerja Tahun 2021 Sekretaris Jenderal XVII

Checklist Reviu Inspektorat XIX

BAB I

Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Penyelenggaraan SAKIP terbagi menjadi 6 (enam) meliputi rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja, serta reviu dan evaluasi kinerja.

Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025, pelaksanaan Reformasi Birokrasi dituangkan dalam Roadmap Reformasi Birokrasi 5 (lima) tahunan. Terdapat beberapa area-area perubahan dari Reformasi Birokrasi yang menjadi sasaran perbaikan. Area tersebut meliputi mental aparatur, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, penguatan kelembagaan, penguatan tatalaksana, penguatan manajemen SDM ASN, penguatan peraturan perundang-undangan dan peningkatan kualitas layanan publik. Implementasi Reformasi

Birokrasi Sekretariat Jenderal MPR meliputi 8 (delapan) area tersebut secara komprehensif dan konsisten.

Setjen MPR merupakan instansi pemerintah yang wajib menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagai bentuk akuntabilitas instansi. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Setjen MPR mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Selain itu, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Setjen MPR menjadi tolok ukur dan dasar perbaikan kinerja tahun berikutnya.

1.2 Organisasi, Tugas dan Fungsi Sekretariat Jenderal MPR

Struktur organisasi, tugas, dan fungsi Sekretariat Jenderal MPR lalu secara detail dituangkan dalam Peraturan Sekretaris Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, yang salah satunya menyebutkan bahwa Setjen MPR dipimpin oleh Sekretaris Jenderal dan merupakan instansi pemerintah yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. Struktur organisasi Sekretariat Jenderal MPR dapat dilihat pada gambar 1.1.

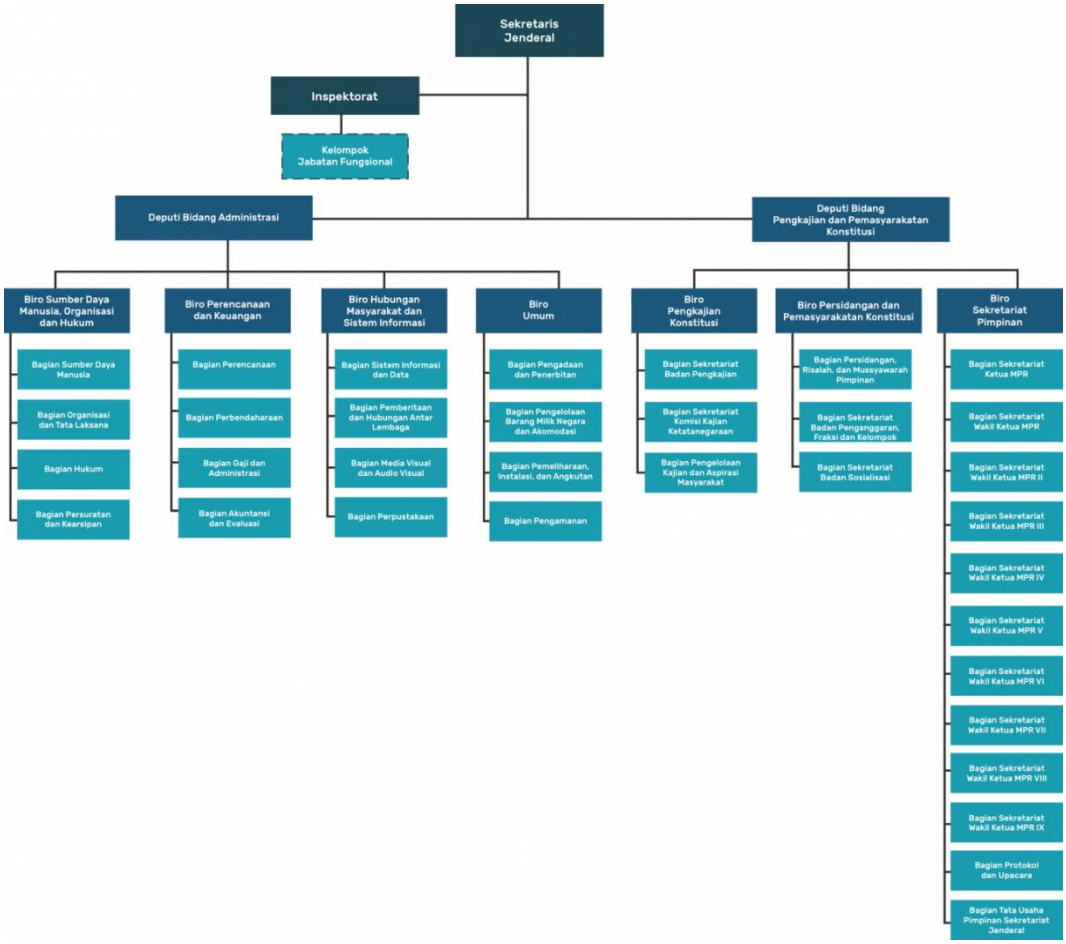

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Setjen MPR

Pada gambar 1.1, terlihat struktur organisasi Setjen MPR yang terdiri atas 3 (tiga) unit kerja setingkat Eselon I, 7 (tujuh) unit kerja setingkat Eselon II, 1 (satu) unit Inspektorat, dan 34 (tiga puluh empat) unit kerja setingkat Eselon III. Tugas dan fungsi masing-masing unit kerja dalam mendukung kinerja MPR dijabarkan lebih detail pada subbab berikut.

1.2.1 Sekretariat Jenderal

Sekretariat Jenderal mempunyai tugas memberikan dukungan administrasi dan keahlian terhadap kelancaran pelaksanaan wewenang dan tugas Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretariat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan dan evaluasi rencana strategis Sekretariat Jenderal;
b. koordinasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas unit organisasi di lingkungan Sekretariat Jenderal;
c. perumusan kebijakan, pembinaan, dan pelaksanaan dukungan bidang pengkajian dan pemasyarakatan konstitusi, serta penyerapan aspirasi

masyarakat kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia;

d. perumusan kebijakan, pembinaan, dan pelaksanaan dukungan bidang administrasi kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia;
e. perumusan kebijakan dan pelaksanaan pengawasan intern di lingkungan Sekretariat Jenderal;
f. pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia; dan
g. pelaksanaan fungsi lain yang ditugaskan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Sekretariat Jenderal terdiri atas 2 (dua) unit kerja setingkat Eselon I, yaitu:

a. Deputi Bidang Administrasi; dan
b. Deputi Bidang Pengkajian dan Pemasyarakatan Konstitusi.

1.2.2 Deputi Bidang Administrasi

Deputi Bidang Administrasi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal dan dipimpin oleh Deputi. Deputi Bidang Administrasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan rumusan kebijakan, pembinaan, dan pelaksanaan dukungan administrasi kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia dan Sekretariat Jenderal. Dalam melaksanakan tugas, Deputi Bidang Administrasi menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan dan evaluasi rencana strategis Deputi Bidang Administrasi;
b. koordinasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas unit organisasi di lingkungan Deputi Bidang Administrasi;
c. penyiapan perumusan kebijakan, pembinaan, dan pelaksanaan dukungan di bidang sumber daya manusia, organisasi, tata laksana, dan hukum;
d. penyiapan perumusan kebijakan, pembinaan, dan pelaksanaan dukungan di bidang perencanaan, penganggaran, pengelolaan keuangan dan pelaporan keuangan;
e. penyiapan perumusan kebijakan dan pelaksanaan dukungan pengelolaan sistem informasi kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia dan Sekretariat Jenderal;

f. penyiapan perumusan kebijakan dan pelaksanaan dukungan di bidang hubungan masyarakat kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia dan Sekretariat Jenderal;
g. pelaksanaan fungsi lain yang ditugaskan oleh Sekretaris Jenderal.
h. penyiapan perumusan kebijakan, pembinaan, dan pelaksanaan dukungan di bidang perlengkapan serta pengelolaan barang milik negara di lingkungan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia dan Sekretariat Jenderal; dan
i. pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Sekretaris Jenderal.

Deputi Bidang Administrasi terdiri atas:

1. Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Hukum;
2. Biro Perencanaan dan Keuangan;
3. Biro Hubungan Masyarakat dan Sistem Informasi; dan
4. Biro Umum.

1.2.3 Deputi Bidang Pengkajian dan Pemasyarakatan Konstitusi

Deputi Bidang Pengkajian dan Pemasyarakatan Konstitusi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal dan dipimpin oleh Deputi. Deputi Bidang Pengkajian dan Pemasyarakatan Konstitusi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan rumusan kebijakan, pembinaan, dan pelaksanaan dukungan pengkajian dan pemasyarakatan konstitusi kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. Dalam melaksanakan tugas, Deputi Bidang Pengkajian dan Pemasyarakatan Konstitusi menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan dan evaluasi rencana strategis Deputi Bidang Pengkajian dan Pemasyarakatan Konstitusi;
b. koordinasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas unit organisasi di lingkungan Deputi Bidang Pengkajian dan Pemasyarakatan Konstitusi;
c. penyiapan perumusan kebijakan dan pelaksanaan dukungan kajian sistem ketatanegaraan, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan pelaksanaan dukungan penyerapan aspirasi masyarakat berkaitan dengan pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
d. penyiapan perumusan kebijakan dan pelaksanaan dukungan pemasyarakatan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat

Republik Indonesia, Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;

e. penyiapan perumusan kebijakan dan pelaksanaan dukungan kesekretariatan pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia dan Sekretariat Jenderal;
f. penyiapan perumusan kebijakan dan pelaksanaan dukungan musyawarah pimpinan dan keprotokolan pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia dan Sekretariat Jenderal;
g. penyiapan perumusan kebijakan dan pelaksanaan dukungan persidangan dan rapat, serta kesekretariatan badan dan lembaga kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia;
h. pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Sekretaris Jenderal; dan
i. pelaksanaan fungsi lain yang ditugaskan oleh Sekretaris Jenderal.

Deputi Bidang Pengkajian dan Pemasyarakatan Konstitusi terdiri atas:

1. Biro Pengkajian Konstitusi;
2. Biro Persidangan dan Pemasyarakatan Konstitusi; dan
3. Biro Sekretariat Pimpinan.

1.2.4 Inspektorat

Inspektorat berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal. Inspektorat dipimpin oleh Inspektur. Inspektorat mempunyai tugas menyelenggarakan pengawasan intern di lingkungan Sekretariat Jenderal. Dalam melaksanakan tugas, Inspektorat menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern;
b. pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Sekretaris Jenderal;
d. penyusunan laporan hasil pengawasan di lingkungan Sekretariat Jenderal; dan
e. pelaksanaan administrasi Inspektorat.

1.3 Sumber Daya Manusia Sekretariat Jenderal MPR

Peran sumber daya manusia pada organisasi sangat penting sebagai faktor penentu keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuan. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Setjen MPR didukung oleh 324 (tiga ratus dua puluh empat) orang Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan berbagai macam latar belakang pendidikan dan keahlian. Komposisi ASN di lingkungan Setjen MPR dapat terlihat pada grafik 1.1.

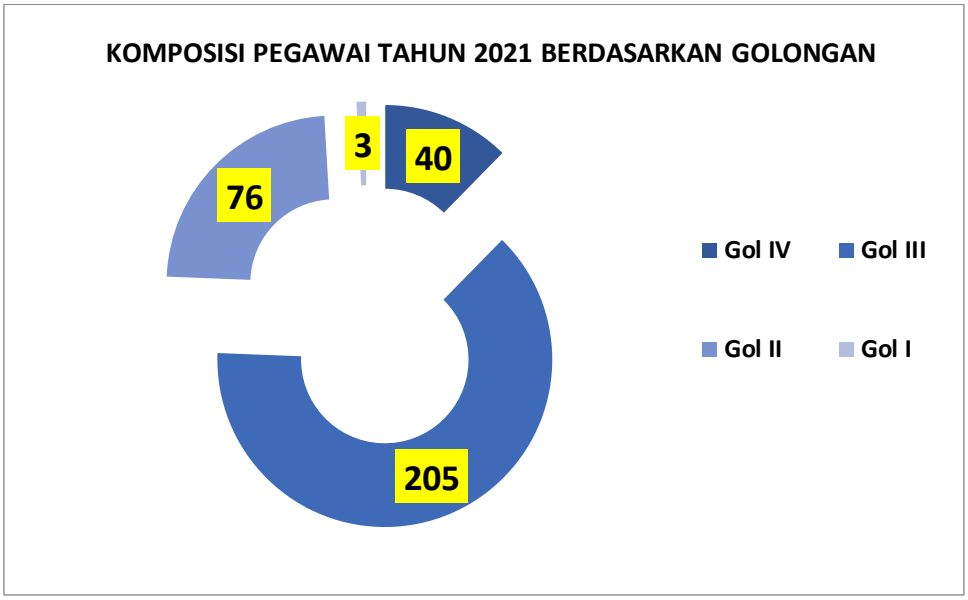

Grafik 1.1 Komposisi Pegawai Tahun 2021 Berdasarkan Golongan

Berdasarkan gambar 1.2, dapat dilihat bahwa pada tahun 2021, ASN golongan IV berjumlah 40 (empat puluh) pegawai, golongan III berjumlah 205 (dua ratus lima) pegawai, golongan II berjumlah 76 (tujuh puluh enam) pegawai, dan golongan I berjumlah 3 (tiga) pegawai. Selanjutnya dipetakan komposisi pegawai berdasarkan jenjang pendidikan yang dapat dilihat pada grafik 1.2 berikut:

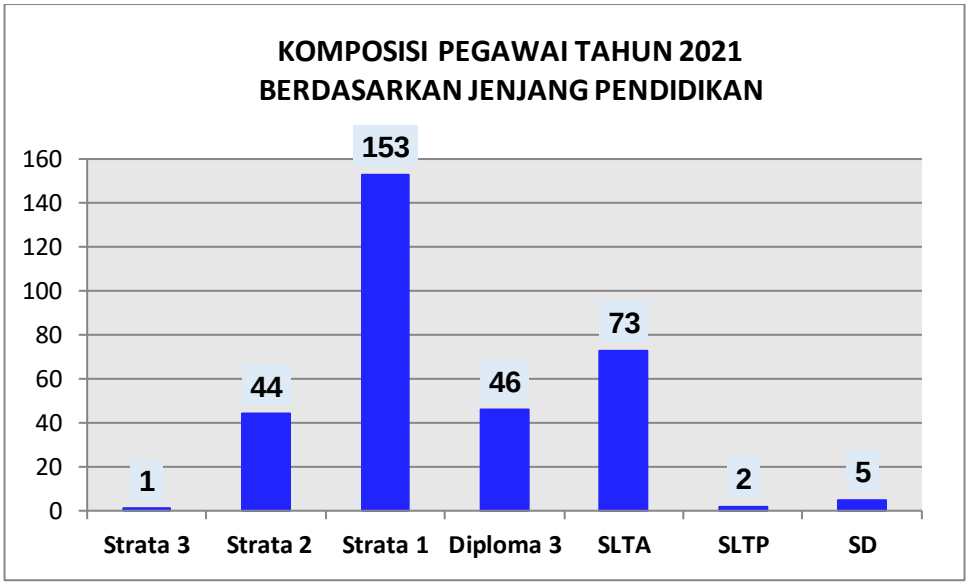

Grafik 1. 2 Persentase Komposisi Pegawai Tahun 2021 Berdasarkan Pendidikan

Berdasarkan grafik 1.2, dapat dilihat bahwa komposisi ASN berdasarkan jenjang pendidikan: Strata 3 sejumlah 1 (satu) pegawai, Strata 2 sejumlah 44 (empat puluh empat) pegawai, Strata 1 sejumlah 153 (seratus lima puluh tiga), Diploma 3 sejumlah 46 (empat puluh enam) pegawai, SLTA sejumlah 73 (tujuh puluh tiga) pegawai, SLTP sejumlah 2 (dua) pegawai, dan SD sejumlah 5 (lima) pegawai. Selanjutnya dipetakan komposisi pejabat tahun 2021, dapat dilihat pada grafik 1.3 berikut:

Grafik 1.3 Komposisi Pejabat Tahun 2021

Berdasarkan grafik 1.3, dapat dilihat bahwa komposisi pejabat tahun 2021: Pimpinan Tinggi Madya berjumlah 1 (satu) orang, Pimpinan Tinggi Pratama berjumlah 6 (enam) orang, Administrator (gol. IV) berjumlah 29 (dua puluh sembilan) orang, Administrator (gol. III) berjumlah 4 (empat) orang, Pengawas

(gol. IV) berjumlah 3 (tiga) orang, dan Pengawas (gol. III) berjumlah 56 (lima puluh enam) orang.

1.4 Dukungan Anggaran

Pagu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun anggaran 2021 sebesar Rp.777.272.751.000,-. Alokasi pagu anggaran Setjen MPR sebesar 74% dialokasikan untuk Program Penyelenggaraan Lembaga Legislatif dan Alat Kelengkapan, dan 36% dialokasikan untuk Program Dukungan Manajemen. Rincian pagu dan realisasi anggaran dari masing-masing program Setjen MPR pada tahun anggaran 2021 dapat dilihat pada tabel 1.1.

Tabel 1.1 Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2021

No	Program	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)
1.	Program Penyelenggaraan Lembaga Legislatif dan Alat Kelengkapan	Rp.573.499.190.000,-	Rp.523.598.316.117,-
2.	Program Dukungan Manajemen	Rp.203.773.561.000,-	Rp.190.616.995.708,-
Jumlah		**Rp.777.272.751.000,-**	**Rp.714.215.311.825,-**

1.5 Permasalahan Strategis

Setjen MPR merupakan lembaga yang secara garis besar menjalankan 3 (tiga) fungsi utama. Pertama adalah fungsi pelayanan bagi Pimpinan dan Alat Kelengkapan MPR. Kedua adalah fungsi layanan eksternal yang melayani masyarakat sebagai implementasi layanan publik. Ketiga adalah fungsi layanan internal Setjen MPR. Keunikan tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi Setjen MPR dimana dibutuhkan profesionalisme dan reliabilitas yang harus dijalankan secara bersamaan. Hingga saat ini, Setjen MPR masih perlu meningkatkan fokus agar optimal dalam memberikan layanan. Berikut lebih rinci mengenai permasalahan strategis dalam penyelenggaraan layanan.

1. Potensi permasalahan perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK);
2. Potensi permasalahan Pandemi Covid-19;
3. Potensi permasalahan penyelenggaraan layanan publik Setjen MPR;
4. Potensi permasalahan implementasi Reformasi Birokrasi; dan
5. Potensi permasalahan implementasi SAKIP.

1.6 Pelaksanaan Rencana Aksi Tindak Lanjut Laporan Kinerja 2020

Rencana aksi tindak lanjut merupakan upaya perbaikan atas permasalahan implementasi SAKIP Sekretariat Jenderal MPR berdasarkan Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal MPR 2020. Rekomendasi rencana aksi dan tindak lanjut Laporan Kinerja 2020 bersumber dari analisa permasalahan terhadap indikator yang tidak tercapai, yaitu: Indeks Kepuasan MPR dan Alat Kelengkapannya Terhadap Layanan Internal Setjen MPR; Nilai Reformasi Birokrasi (RB); Nilai Akuntabilitas Kinerja Setjen MPR; Jumlah Keluhan Terhadap Layanan Kesekretariatan; Rasio Respon Masyarakat atas Sosialisasi yang Diberikan Terhadap Total Frekuensi Sosialisasi yang Dilakukan; Total Nilai Kriteria Pengungkit RB. Lebih detail mengenai pelaksanaan rencana aksi tindak lanjut tahun 2020 dapat dilihat pada tabel 1.2.

Tabel 1.2 Pelaksanaan Rencana Aksi Tindak Lanjut Tahun 2020

No	Indikator 2020 Tidak Tercapai	Rencana Aksi	Tindak Lanjut Rencana Aksi
1.	**Indeks Kepuasan MPR dan Alat Kelengkapannya Terhadap Layanan Internal Setjen MPR**	Melakukan survei kepuasan kepada Alat Kelengkapan setiap semester sehingga perbaikan layanan dapat dilakukan secara berkesinambungan.	Survei kepuasan kepada Pimpinan dan Alat Kelengkapan telah dilaksanakan setiap semester dan hasil survei dijadikan *input* perbaikan rekomendasi kinerja layanan. Deskripsi selanjutnya akan dinarasikan di Bab III.
2.	**Nilai Reformasi Birokrasi (RB)**	Segera menyelesaikan *Roadmap* Reformasi Birokrasi Setjen MPR.	*Roadmap* Reformasi Birokrasi telah selesai dan telah ditetapkan.
3.	**Nilai Akuntabilitas Kinerja Setjen MPR**	Segera menetapkan rencana aksi atas implementasi SAKIP sesuai dengan hasil evaluasi (*exit meeting*) dari Kemenpan RB terhadap Setjen MPR tahun 2020.	Telah ditetapkan rencana aksi atas implementasi SAKIP pada tahun 2021. Deskripsi selanjutnya akan dinarasikan di Bab III.

No	Indikator 2020 Tidak Tercapai	Rencana Aksi	Tindak Lanjut Rencana Aksi
4.	**Jumlah Keluhan Terhadap Layanan Kesekretariatan**	Merevisi target IKU "Jumlah Keluhan Terhadap Layanan Kesekretariatan" dengan target yang lebih realistis untuk IKU terkait keluhan layanan.	IKU telah direvisi dan diubah menjadi "Indeks Kepuasan MPR RI terhadap Dukungan Administrasi". Target IKU tersebut adalah 3.2 (indeks kepuasan) dengan capaian 3.30 atau melebihi target. Deskripsi selanjutnya akan dinarasikan di Bab III.
5.	**Rasio Respon Masyarakat atas Sosialisasi yang Diberikan Terhadap Total Frekuensi Sosialisasi yang Dilakukan**	Pembaharuan metode/varian yang akan dipergunakan untuk kegiatan Sosialisasi Empat Pilar yang disesuaikan dengan sasaran yang hendak dicapai.	Telah dilakukan pembaharuan metode/varian kegiatan Sosisialisasi Empat Pilar dan pada tahun 2021, indikator kinerja yang terkait pelaksanaan Sosialisasi Empat Pilar: "Rasio Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi 4 (Empat) Pilar terhadap Total yang Direncanakan". Target IKU tersebut adalah 92% dengan capaian 102,6% atau melebihi target. Deskripsi selanjutnya akan dinarasikan di Bab III.
6.	**Total Nilai Kriteria Pengungkit RB**	Segera menetapkan rencana aksi atas pengungkit RB sesuai dengan hasil evaluasi	Telah ditetapkan rencana aksi atas pengungkit RB pada tahun 2021. Deskripsi

No	Indikator 2020 Tidak Tercapai	Rencana Aksi	Tindak Lanjut Rencana Aksi
		(*exit meeting*) dari Kemenpan RB terhadap Setjen MPR tahun 2020.	selanjutnya akan dinarasikan di Bab III.

1.7 Penghargaan yang Diterima Setjen MPR

Berikut ini adalah sejumlah penghargaan yang diterima oleh Setjen MPR dari berbagai instansi nasional periode 2020 – 2021:

1. **Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)**

   Terkait Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Laporan Keuangan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) Tahun 2018 yang disampaikan pada 2019 adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Kemudian terhadap Laporan Keuangan MPR RI Tahun 2019 yang disampaikan pada 2020 juga diperoleh WTP. Dengan demikian, MPR RI pada Tahun 2020 sudah mendapatkan predikat opini BPK berupa WTP selama **10 kali berturut-turut**.

2. **Indeks Pengawasan Kearsipan**

   Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI), berdasarkan Surat Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor B-AK.01.00/ 2701 /2020 tanggal 30 Desember 2020, hal Laporan Hasil Monitoring Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Kearsipan. MPR RI pada tahun 2020 memperoleh nilai 84,17 (delapan puluh empat koma satu tujuh) dengan kategori **A (memuaskan)** atau mengalami peningkatan sebesar 3,89 (tiga koma delapan sembilan) dari hasil pengawasan Tahun 2019 sebesar 80,28 (delapan puluh koma dua delapan) dengan kategori "A (Memuaskan)".

3. **Kinerja Anggaran**

   Berdasarkan Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S-58/MK.2/2021 tanggal 10 April 2021, hal penyampaian piagam penghargaan sebagai apresiasi atas kinerja anggaran kementerian negara/lembaga TA. 2020 berdasarkan KMK Nomor 118/KMK.02/2021. Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) mendapatkan piagam penghargaan dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia atas kinerja anggaran yang termasuk dalam kategori **Sangat Baik** dengan nilai **96,46** (di atas 90) pada Tahun

Anggaran 2020 pada Kelompok Kementerian Negara/Lembaga Kategori Pagu Kecil.

4. **Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)**

Kementerian Hukum dan HAM memberikan penghargaan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) sebagai Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional Terbaik V Tahun 2021 Kategori Lembaga Negara.

5. **Badan Kepegawaian Negara (BKN) Award Tahun 2021:**

   a. Peringkat Ke II BKN Award 2021 Kategori Implementasi Penilaian Kinerja Lembaga Negara /LPNK TIPE C kepada Sekretariat Jenderal MPR RI; dan
   b. Peringkat Ke II BKN Award 2021 Kategori Komitmen Pengawasan Dan Pengendalian Lembaga Negara /LPNK TIPE C kepada Sekretariat Jenderal MPR RI.

6. **Anugerah Meritokrasi dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN)**

Setjen MPR berhasil meraih anugerah meritokrasi dari KASN sebagai Kementerian dan Lembaga pada Kategori III (Baik), dengan Nilai 268 (dua ratus enam puluh delapan), dan Indeks 0,65 (nol koma enam puluh lima) yang ditetapkan dalam Keputusan Komisi Aparatus Sipil Negara Nomor 17/KEP.KASN/C/VIII/2021 Tentang Penerapan Sistem Merit Dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.

7. **Keterbukaan Informasi Badan Publik**

Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia memberikan penghargaan Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2021 kategori Lembaga Pemerintah Non Kementerian kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia sebagai Badan Publik Cukup Informatif.

8. **Survei Persepsi Korupsi (SPI)**

Survei Penilaian Integritas (SPI) merupakan survei untuk memetakan risiko korupsi dan kemajuan upaya pencegahan korupsi yang dilakukan Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah (KLPD). Hasil pemetaan dapat dijadikan dasar untuk menyusun rekomendasi peningkatan upaya pencegahan korupsi melalui rencana aksi sesuai karakteristik masing-masing K/L/PD serta berdasarkan hasil pemetaan empiris. Penilaian bersumber dari persepsi dan pengalaman para pemangku

kepentingan instansi Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (K/L/PD), yaitu pegawai, pengguna layanan/mitra kerjasama, dan eksper/ahli dari beragam kalangan. Penilaian mencakup transparansi, integritas dalam pelaksanaan tugas, perdagangan pengaruh (trading in influence), pengelolaan anggaran, pengelolaan PBJ, pengelolaan SDM, sosialisasi antikorupsi di setiap instansi.

Skor SPI tahun 2021 dihitung dari 628 Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah menghasilkan indeks sebesar 42 sampai dengan 91.7 dari skala interval 0-100. Semakin tinggi angka indeks menunjukkan tingkat integritas K/L/PD yang semakin baik. Rata-rata indeks integritas dari seluruh peserta SPI adalah sebesar 72.4. Dari 628 peserta tersebut. Pada tahun ini, Majelis Permusyawaratan Rakyat mendapatkan skor integritas sebesar 78.3, yang artinya Setjen MPR memiliki skor integritas di atas rata-rata nasional.

BAB II

Perencanaan Kinerja

2.1 Visi Sekretariat Jenderal MPR

Tujuan organisasi Sekretariat Jenderal MPR RI direpresentasikan dalam Rencana Strategis Sekretariat Jenderal MPR RI 2020 – 2024. Di dalam dokumen strategis tersebut, dijelaskan kondisi yang diharapkan dapat di capai pada akhir periode tahun 2024 dan kemudian direpresentasikan kedalam visi, misi, tujuan, sasaran dan indikator. Renstra Setjen MPR Tahun 2020 – 2024 memperhatikan 2 (dua) hal, yaitu arah strategis MPR RI 2020 – 2024 dan RPJMN 2020 – 2024. Visi MPR RI yaitu "MPR Menjadi Rumah Kebangsaan Pengawal Ideologi Pancasila dan Kedaulatan Rakyat". Berdasarkan RPJMN 2020 – 2024, salah satu program prioritas adalah Program Reformasi Kelembagaan Birokrasi. Salah satu perubahan yang diharapkan adalah peningkatan kualitas layanan publik. Berdasarkan kedua hal tersebut, dirumuskan Visi Setjen MPR Periode 2020 – 2024:

"Penggerak Utama Reformasi Birokrasi dalam Memberikan Layanan Internal Kepada MPR dan Alat Kelengkapannya Serta Meningkatkan Kualitas Layanan Publik MPR."

Visi tersebut memiliki 3 (tiga) kata kunci sebagai gagasan utama, yaitu:

1. **Birokrasi Berkelas Dunia**

   Setjen MPR sebagai lembaga pemerintahan yang profesional dan berintegritas tinggi, mampu menyelenggarakan pelayanan prima kepada Pimpinan MPR RI, Anggota MPR RI, Alat Kelengkapan dan Masyarakat. Manajemen pemerintahan yang demokratis agar mampu menghadapi tantangan pada abad ke-21 melalui tata pemerintahan yang baik.

2. **Melayani Pimpinan MPR RI, Anggota MPR RI dan Alat Kelengkapan.**

   Setjen MPR memberikan layanan prima kepada Pimpinan MPR RI, Anggota MPR RI dan Alat Kelengkapan untuk mendukung tugas dan wewenang konstitusional. Memastikan layanan prima berkontribusi positif terhadap capaian strategis MPR RI, baik secara langsung maupun tidak langsung.

3. **Melayani Masyarakat.**

   Setjen MPR memberikan layanan publik yang prima berdasarkan asas penyelenggaraan pelayanan publik, meliputi: kepentingan umum; kepastian hukum; kesamaan hak dan kewajiban; keprofesionalan; paritisipatif; persamaan perlakukan/tidak diskriminatif; keterbukaan; akuntabilitas; fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan; ketepatan waktu; serta kecepatan, kemudahan dan keterjangkauan.

2.2 Misi Sekretariat Jenderal MPR

Misi Setjen MPR merupakan upaya strategis yang dilakukan guna mewujudkan Visi Setjen MPR. Misi diharapkan dapat membangun upaya kolektif dari segenap pegawai Setjen MPR guna mewujudkan visi. Berikut adalah misi Setjen MPR:

1. **Memberikan Layanan Prima Kepada MPR dan Alat Kelengkapannya dalam Melaksanakan Tugas Konstitusi.**
   Misi pertama merepresentasikan upaya yang perlu dilakukan dalam mewujudkan kata kunci visi pertama, yaitu penggerak utama Reformasi Birokrasi serta kata kunci yang kedua, yaitu layanan internal. Semangat yang dituangkan dalam misi ini adalah Sekretariat Jenderal MPR harus mampu memberikan layanan prima bagi Pimpinan dan Anggota MPR beserta Alat Kelengkapannya

dalam melaksanakan tugas konstitusi. Layanan prima yang dimaksud adalah pemberian dukungan layanan berkualitas dengan menerapkan standar pelayanan minimum dan peningkatan kualitas layanan sesuai kebutuhan.

2. **Melaksanakan Reformasi Birokrasi Sekretariat Jenderal MPR Secara Konsisten dan Berkesinambungan.**
   Misi kedua merepresentasikan upaya yang perlu dilakukan dalam mewujudkan kata kunci visi yang pertama dan ketiga yaitu penggerak utama Reformasi Birokrasi dan layanan publik MPR. Misi ini menjabarkan upaya strategis yang perlu dilakukan dalam meningkatkan penerapan Reformasi Birokrasi di lingkungan Setjen MPR. Tugas – tugas Reformasi Birokrasi yang perlu ditingkatkan melalui program *quick wins* Reformasi Birokrasi dan dijabarkan dengan rencana aksi Roadmap Reformasi Birokrasi Sekretariat Jenderal MPR.

2.3 Tujuan Sekretariat Jenderal MPR

Tujuan Setjen MPR merupakan penjabaran dari visi Setjen MPR atau bentuk lebih detail atau lebih operasional dari visi. Berdasarkan visi Setjen MPR, dirumuskan tujuan Setjen MPR sebagai berikut:

1. **Terwujudnya layanan konstitusi yang prima sesuai kebutuhan strategis Majelis Pemusyawaratan Rakyat RI.** Tujuan ini berkontribusi terhadap misi nomor 1 (satu) **Memberikan layanan prima sesuai kebutuhan strategis MPR RI dalam menjalankan tugas konstitusional**. Setjen MPR memberikan layanan berupa layanan teknis, layanan administrasi dan layanan keahlian yang berkontribusi terhadap pelaksanaan tugas dan wewenang MPR RI. Layanan prima yang diberikan sesuai standar, kebutuhan dan harapan MPR RI. Sesuai standar yaitu setiap proses pemberian layanan mengacu dan sesuai dengan standar yang berlaku untuk menjaga kualitas pemberian layanan. Sesuai kebutuhan yaitu Setjen MPR menginventarisasi kebutuhan-kebutuhan MPR RI dalam rangka menjalankan tugas dan wewenang konstitusinya, sehingga terdapat gambaran mengenai prioritas layanan dan kebutuhan-kebutuhan lain yang wajib dipenuhi. Dalam memenuhi kebutuhan, Setjen MPR fokus pada detail-detail kecil penerima layanan untuk memenuhi harapan penerima layanan.

2. **Terselenggaranya Reformasi Birokrasi Sekretariat Jenderal MPR RI yang bersih, akuntabel dan sesuai standar serta praktik terbaik nasional**. Tujuan ini berkontribusi terhadap misi Melaksanakan Reformasi Birokrasi Sekretariat Jenderal MPR RI berdasarkan standar dan praktik terbaik nasional. Setjen MPR berkomitmen untuk mengimplementasi Reformasi Birokrasi sebagai komitmen terhadap perubahan menuju birokrasi berkelas dunia. Melalui implementasi 8 (delapan) area perubahan, diharapkan dapat meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas organisasi, mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN dan meningkatkan kualitas layanan publik.

2.4 Sasaran Strategis Sekretariat Jenderal MPR

Masing-masing tujuan kemudian dijabarkan menjadi sasaran strategis Setjen MPR. Sasaran strategis yang dimaksud adalah penjelasan tentang apa yang ingin dicapai Setjen MPR pada akhir periode tahun anggaran 2021. Dengan adanya perubahan SOTK, pada tahun 2021 Setjen MPR memiliki 7 (tujuh) sasaran strategis meliputi:

1. Meningkatnya Kepuasan MPR RI dan Alat Kelengkapan Terhadap Layanan Sekretariat Jenderal MPR;
2. Terwujudnya Birokrasi Setjen MPR RI Berkelas Dunia;
3. Terselenggaranya Dukungan Bidang Pengkajian dan Pemasyarakatan Konstitusi, Serta Penyerapan Aspirasi Masyarakat yang Berkualitas Kepada MPR;
4. Terselenggaranya Dukungan Bidang Administrasi yang Berkualitas Kepada MPR;
5. Meningkatnya Pelaksanaan 8 (delapan) Area Perubahan Setjen MPR RI;
6. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Birokrasi Setjen MPR; dan
7. Terselenggaranya Layanan Internal Setjen MPR RI.

2.5 Perjanjian Kinerja Tahun 2021

Berdasarkan 7 (tujuh) sasaran strategis yang dijelaskan sebelumnya, maka ditetapkanlah 10 (sepuluh) Indikator Kinerja Utama yang merepresentasikan sasaran strategis tersebut tersebut. Perjanjian Kinerja Setjen MPR dapat dilihat pada tabel 2.1.

Tabel 2.1 Perjanjian Kinerja Sekretaris Jenderal MPR Tahun 2021

No.	Sasaran Strategis	No.	Indikator Kinerja Utama	Target
1.	Meningkatnya Kepuasan MPR RI dan Alat Kelengkapan terhadap Layanan Sekretariat Jenderal MPR.	1.	Indeks Kepuasan MPR RI terhadap Dukungan Setjen MPR RI.	3.2
2.	Terwujudnya Birokrasi Setjen MPR RI Berkelas Dunia.	2.	Indeks Reformasi Birokrasi Setjen MPR RI.	76.95
		3.	Tingkat Pemenuhan Layanan Internal Sekretariat Jenderal MPR RI.	86
3.	Terselenggaranya Dukungan Bidang Pengkajian dan Pemasyarakatan Konstitusi, Serta Penyerapan Aspirasi Masyarakat yang Berkualitas Kepada MPR.	4.	Rasio Draf Hasil Kajian Sistem Ketatanegaraan Setjen MPR RI yang Dimanfaatkan terhadap Total Draf Hasil Kajian Sistem Ketatanegaraan yang Dihasilkan.	100
		5.	Rasio Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi 4 (Empat) Pilar terhadap Total yang Direncanakan.	92
		6.	Rasio Tindak Lanjut Aspirasi Masyarakat terhadap Total Aspirasi Masyarakat.	100
4.	Terselenggaranya Dukungan Bidang Administrasi yang Berkualitas Kepada MPR.	7.	Indeks Kepuasan MPR RI terhadap Dukungan Administrasi.	3.2
5.	Meningkatnya Pelaksanaan 8 (delapan) Area Perubahan Setjen MPR RI.	8.	Nilai Komponen Pengungkit Reformasi Birokrasi Setjen MPR RI.	43.9
6.	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Birokrasi Setjen MPR.	9.	Total Nilai Kriteria Hasil Reformasi Birokrasi Sekretariat Jenderal MPR RI.	32.95

No.	Sasaran Strategis	No.	Indikator Kinerja Utama	Target
7.	Terselenggaranya Layanan Internal Setjen MPR RI.	10.	Tingkat Pemenuhan Layanan Internal Sekretariat Jenderal MPR RI.	86

Berdasarkan tabel 2.1, terdapat 7 (tujuh) sasaran strategis yang capaiannya diukur dengan 10 (sepuluh) Indikator Kinerja Utama (IKU). Selanjutnya, Indikator Kinerja Utama tersebut akan dijelaskan berikut.

1. **Indeks Kepuasan MPR RI terhadap Dukungan Setjen MPR RI.**
   Indeks Kepuasan MPR RI terhadap Dukungan Setjen MPR RI diukur dengan kegiatan: Pelaksanaan Tugas Pimpinan MPR, dukungan Pelaksanaan Sosialisasi Empat Pilar MPR, dukungan Pengkajian Kemajelisan, dukungan Pengelolaan Tugas Konstitusional MPR RI. Indeks kepuasan diukur dengan survei kepada Pimpinan dan Alat Kelengkapan MPR RI akan layanan yang diberikan oleh Setjen MPR di tahun 2021. Diukur dalam skala likert 1 sampai 4, yaitu; skala 1 – tidak baik, skala 2 – kurang baik, skala 3 - baik, dan skala 4 – sangat baik. Indikator ini termasuk kategori target *maximize*.
2. **Indeks Reformasi Birokrasi Setjen MPR RI.**
   Indikator Nilai Reformasi Birokrasi (RB) ini diukur dengan kegiatan: Pengelolaan Administrasi MPR dan Sekretariat Jenderal, Pengelolaan Administrasi Publikasi, Pengelolaan Administrasi Keuangan Sekretariat Jenderal, Pengelolaan Administrasi Sarana dan Prasarana Kantor, dan Layanan Inspektorat. Indeks Reformasi Birokrasi Setjen MPR diambil dari Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2020 oleh Kemenpan RB dikarenakan pada saat laporan kinerja ini disusun, hasil evaluasi tahun 2021 belum keluar. Indikator ini termasuk kategori target *maximize*.
3. **Tingkat Pemenuhan Layanan Internal Sekretariat Jenderal MPR RI.**
   Indikator Tingkat Pemenuhan Layanan Internal Sekretariat Jenderal MPR RI diambil dari persepsi kepuasan terhadap layanan internal Setjen MPR yang diberikan selama tahun 2021 kepada Pimpinan dan Alat Kelengkapan MPR RI. Diukur dalam skala likert 1 sampai 4, yaitu; skala 1 – tidak baik, skala 2 – kurang baik, skala 3 - baik, dan skala 4 – sangat baik. Indikator ini termasuk kategori target *maximize*. Didukung oleh kegiatan: Pengelolaan Administrasi MPR dan Sekretariat Jenderal, Pengelolaan Administrasi Publikasi, Pengelolaan Administrasi

Keuangan Sekretariat Jenderal, Pengelolaan Administrasi Sarana dan Prasarana Kantor, dan Layanan Inspektorat.

4. **Rasio Draf Hasil Kajian Sistem Ketatanegaraan Setjen MPR RI yang Dimanfaatkan terhadap Total Draf Hasil Kajian Sistem Ketatanegaraan yang Dihasilkan.**

   Indikator ini dinilai dengan cara menghitung rasio draf hasil Kajian Sistem Ketatanegaraan yang dimanfaatkan oleh Pimpinan, Alat Kelengkapan dan masyarakat. Draf yang dimaksud adalah Draf Hasil Kajian Sistem Ketatanegaraan dihasilkan melalui mekanisme Rapat Pleno Badan Pengkajian di tahun 2021. Indikator ini termasuk kategori target *maximize*. Didukung oleh kegiatan: Pengkajian Kemajelisan.

5. **Rasio Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi 4 (Empat) Pilar terhadap Total yang Direncanakan.**

   Indikator ini dihitung dengan cara mengidentifikasi kegiatan sosialisasi yang dilakukan selama tahun 2021, kemudian merekapitulasi jumlah masyarakat yang mendapatkan Sosialisasi 4 Pilar dan dibandingkan dengan target Sosialisasi 4 Pilar di tahun 2021. Indikator ini termasuk kategori target *maximize*. Didukung oleh kegiatan: Pelaksanaan Sosialisasi Empat Pilar MPR

6. **Rasio Tindak Lanjut Aspirasi Masyarakat terhadap Total Aspirasi Masyarakat.**

   Indikator ini dihitung dengan cara: mengidentifikasi aspirasi masyarakat yang masuk sepanjang tahun 2021, melakukan analisis pola untuk mengetahui substansi dari aspirasi, menginventarisir terhadap hasil analisis pola aspirasi masyarakat, kemudian hitung jumlah klasifikasi kegiatan asmas yang dilakukan dan dibandingkan dengan jumlah klasifikasi kegiatan asmas yang ditindaklanjuti. Indikator ini termasuk kategori target *maximize*. Didukung oleh kegiatan: Pengkajian Kemajelisan.

7. **Indeks Kepuasan MPR RI terhadap Dukungan Administrasi.**

   Indikator Indeks Kepuasan MPR RI terhadap Dukungan Adminsitrasi diukur dengan survei kepada Pimpinan dan Alat Kelengkapan MPR RI yang diberikan oleh Setjen MPR di tahun 2021. Dukungan Administrasi yang dimaksud adalah: dukungan administrasi Pelaksanaan Tugas Pimpinan MPR, dukungan administrasi Pelaksanaan Tugas Konstitusional MPR RI, dukungan administrasi Pengelolaan Administrasi Keuangan MPR, dan dukungan administrasi Penganggaran MPR. Diukur dalam skala likert 1 sampai 4, yaitu; skala 1 – tidak baik, skala 2 – kurang baik, skala 3 - baik, dan skala 4 – sangat baik. Indikator ini termasuk kategori target *maximize*.

8. **Nilai Komponen Pengungkit Reformasi Birokrasi Setjen MPR RI.**
   Indikator Nilai Komponen Pengungkit Reformasi Birokrasi Setjen MPR RI. Komponen Pengungkit Reformasi Birokrasi diambil dari Komponen Pengungkit Laporan Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2020, dikarenakan saat laporan kinerja ini disusun, hasil evaluasi RB Setjen MPR tahun 2021 belum dikeluarkan oleh Kemenpan RB. Penilaian komponen pengungkit terdiri dari: Pemenuhan, Hasil Antara Area Perubahan, dan Reform. Indikator ini termasuk kategori target *maximize*. Indikator ini didukung oleh kegiatan: Pengelolaan Administrasi MPR dan Sekretariat Jenderal, Pengelolaan Administrasi Publikasi, Pengelolaan Administrasi Keuangan Sekretariat Jenderal, Pengelolaan Administrasi Sarana dan Prasarana Kantor, dan Layanan Inspektorat.
9. **Total Nilai Kriteria Hasil Reformasi Birokrasi Sekretariat Jenderal MPR RI.**
   Indikator Nilai Kriteria Hasil Reformasi Birokrasi diambil dari Komponen Hasil Laporan Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2020, dikarenakan saat laporan kinerja ini disusun, hasil evaluasi RB Setjen MPR tahun 2021 belum dikeluarkan oleh Kemenpan RB. Penilaian komponen hasil terdiri dari: Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan, Kualitas Pelayanan Publik, Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN, dan Kinerja Organisasi. Indikator ini termasuk kategori target *maximize*. Indikator ini didukung oleh kegiatan: Pengelolaan Administrasi MPR dan Sekretariat Jenderal (Kinerja Organisasi), Pengelolaan Administrasi Publikasi (Kualitas Pelayanan Publik), Pengelolaan Administrasi Keuangan Sekretariat Jenderal (Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan), dan Layanan Inspektorat (Indeks Persepsi Anti Korupsi).
10. **Tingkat Pemenuhan Layanan Internal Sekretariat Jenderal MPR RI.**
    Indikator Tingkat Pemenuhan Layanan Internal Sekretariat Jenderal MPR RI diambil dari hasil rekapitulasi layanan kesekretariatan berdasarkan RO (Rincian *Output*) tahun 2021. Indikator ini didukung oleh kegiatan: Pengelolaan Barang Milik Negara dan Sarana Prasarana Kantor, Pengelolaan Administrasi MPR dan Sekretariat Jenderal, dan Pengelolaan Administrasi Keuangan Sekretariat Jenderal. Indikator ini termasuk kategori target *maximize*.

BAB III

Akuntabilitas Kinerja

3.1 Kriteria Ukuran Keberhasilan

Capaian kinerja Setjen MPR tahun 2021 merupakan perbandingan antara realisasi atas target dari setiap indikator kinerja Setjen MPR. Indikator kinerja dan target yang diukur capaiannya adalah indikator dan target yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja (PK) Setjen MPR tahun 2021. Total kinerja Setjen MPR didapatkan dari rata-rata capaian indikator kinerja yang kemudian dikelompokkan ke dalam 4 (empat) kategori kinerja pada tabel 3.1.

Tabel 3.1 Kategori Kinerja Setjen MPR

Skala	Rentang Nilai Kinerja	Interpretasi
1	100% - 120%	Kinerja sangat baik
2	80% - 99,9%	Kinerja baik
3	60% - 79,9%	Kinerja kurang baik
4	<60%	Kinerja buruk

Secara garis besar, terdapat 3 (tiga) jenis target indikator kinerja yaitu target *maximize, minimize* dan *stabilize*. Ketiganya dihitung dengan membandingkan antara realisasi terhadap target. Capaian target *maximize* dikatakan baik, jika

realisasi lebih besar dibanding target. Capaian target *minimize* dikatakan baik, jika realisasi lebih kecil dibanding target. Capaian target *stabilize* dikatakan baik, jika realisasi mendekati target.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 196/PMK.02/2015 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 143/PMK.02/2015 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran, maka jenis Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP) unit Eselon I harus menggunakan jenis indikator *outcome/output*, sedangkan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK) Eselon II harus menggunakan jenis indikator *output*. Indikator kinerja yang digunakan oleh Setjen MPR merupakan jenis indikator *outcome*, sementara indikator kinerja yang digunakan oleh unit Eselon II merupakan jenis indikator *output*. Hal tersebut merepresentasikan kepatuhan Setjen MPR terhadap regulasi yang berlaku serta diharapkan dapat memberi gambaran kinerja Setjen MPR secara utuh.

3.2 Pencapaian Kinerja Tahun 2021

Capaian kinerja tahun 2021 merupakan representasi capaian target Setjen MPR berdasarkan perjanjian kinerja yang disepakati. Perjanjian kinerja sendiri terdiri dari sasaran, indikator kinerja, dan target. Capaian kinerja diukur dengan membandingkan target dan realisasi. Perbandingan tidak hanya dilakukan antara target dan realisasi tahun sebelumnya (T-1), namun juga dibandingkan dengan capaian beberapa tahun sebelumnya (T-N). Perbandingan dengan capaian tahun-tahun sebelumnya dilakukan untuk melihat tren capaian kinerja, dengan catatan perbandingan dilakukan terhadap indikator yang sama. Tren kinerja diharapkan dapat mendorong terjadinya perbaikan berkesinambungan *(continous improvement)* kinerja Setjen MPR. Capaian kinerja Setjen MPR tahun 2021 dapat dilihat pada tabel 3.2 berikut.

Tabel 3.2 Perjanjian Kinerja Sekretaris Jenderal MPR Tahun 2021

No.	Sasaran Strategis	No.	Indikator Kinerja Utama	Target	Hasil	Capaian
1.	Meningkatnya Kepuasan MPR RI dan Alat Kelengkapan terhadap	1.	Indeks Kepuasan MPR RI terhadap Dukungan Setjen MPR RI.	3.2	3.34	104.38%

No.	Sasaran Strategis	No.	Indikator Kinerja Utama	Target	Hasil	Capaian
	Layanan Sekretariat Jenderal MPR.					
2.	Terwujudnya Birokrasi Setjen MPR RI Berkelas Dunia.	2.	Indeks Reformasi Birokrasi Setjen MPR RI.	76.95	72.06	93.65%
		3.	Tingkat Pemenuhan Layanan Internal Sekretariat Jenderal MPR RI.	86	82.39	95.80%
3.	Terselenggaranya Dukungan Bidang Pengkajian dan Pemasyarakatan Konstitusi, Serta Penyerapan Aspirasi Masyarakat yang Berkualitas Kepada MPR.	4.	Rasio Draf Hasil Kajian Sistem Ketatanegaraan Setjen MPR RI yang Dimanfaatkan terhadap Total Draf Hasil Kajian Sistem Ketatanegaraan yang Dihasilkan.	100	100	100%
		5.	Rasio Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi 4 (Empat) Pilar terhadap Total yang Direncanakan.	92	102.6	111.50%
		6.	Rasio Tindak Lanjut Aspirasi Masyarakat terhadap Total Aspirasi Masyarakat.	100	100	100%

No.	Sasaran Strategis	No.	Indikator Kinerja Utama	Target	Hasil	Capaian
4.	Terselenggaranya Dukungan Bidang Administrasi yang Berkualitas Kepada MPR.	**7.**	Indeks Kepuasan MPR RI terhadap Dukungan Administrasi.	3.2	3.44	107.50%
5.	Meningkatnya Pelaksanaan 8 (delapan) Area Perubahan Setjen MPR RI.	**8.**	Nilai Komponen Pengungkit Reformasi Birokrasi Setjen MPR RI.	43.9	40.65	92.60%
6.	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Birokrasi Setjen MPR.	**9.**	Total Nilai Kriteria Hasil Reformasi Birokrasi Sekretariat Jenderal MPR RI.	32.95	31.42	95.36%
7.	Terselenggaranya Layanan Internal Setjen MPR RI.	**10.**	Tingkat Pemenuhan Layanan Internal Sekretariat Jenderal MPR RI.	86	100	116.28%
					RATA-RATA CAPAIAN KINERJA TAHUN 2021	**101.71%**

Berdasarkan tabel 3.2, dari 10 (sepuluh) indikator kinerja utama, terdapat 6 (enam) indikator yang capaiannya sama dengan atau melebihi **100% (kategori kinerja sangat baik). Rata-rata capaian indikator kinerja utama Setjen MPR sebesar 101.71%** atau masuk kategori kinerja **sangat baik**. Berikut adalah perbandingan rata-rata capaian kinerja 5 (lima) tahun terakhir.

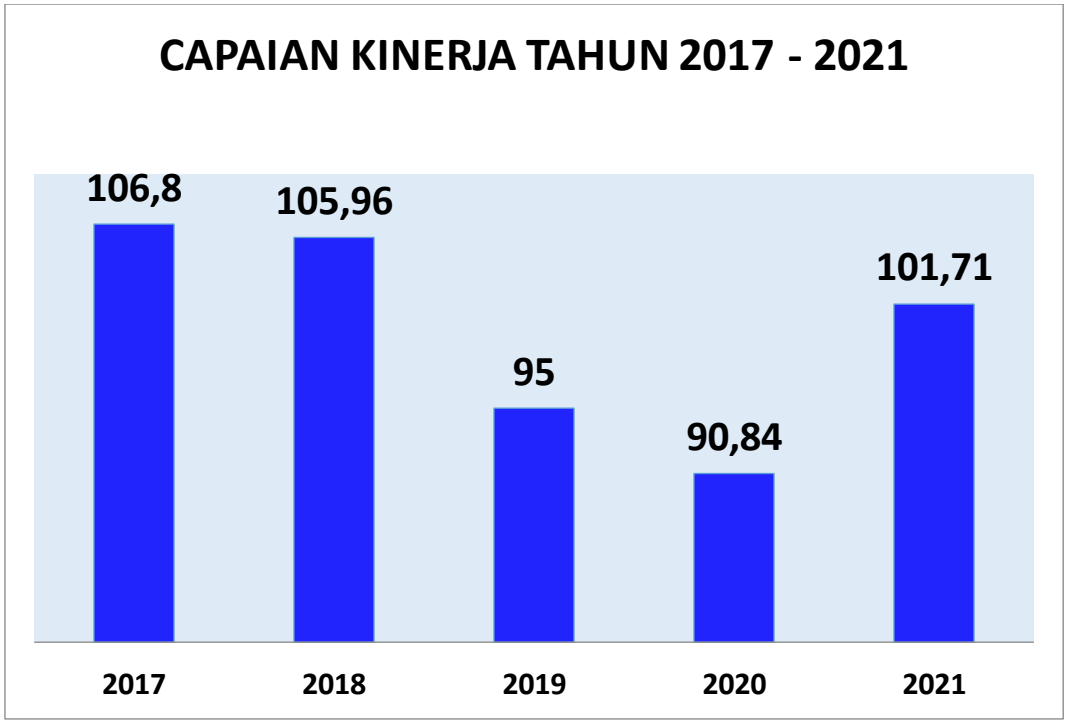

Grafik 3.1 Capaian Kinerja Tahun 2017 – 2021

Berdasarkan grafik 3.1, tren capaian kinerja Setjen MPR tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar 10.87% dibanding tahun 2020. Rata-rata capaian kinerja tahun 2020 sebesar 90.84% meningkat menjadi 101.71% pada tahun 2021. Indikator kinerja utama tidak tercapai terjadi pada 4 (empat) indikator yaitu:

1. Indeks Reformasi Birokrasi Setjen MPR RI;
2. Tingkat Pemenuhan Layanan Internal Sekretariat Jenderal MPR RI;
3. Nilai Komponen Pengungkit Reformasi Birokrasi Setjen MPR RI; dan
4. Total Nilai Kriteria Hasil Reformasi Birokrasi Sekretariat Jenderal MPR RI.

3.2.1 Indeks Kepuasan MPR RI Terhadap Dukungan Setjen MPR RI

Berdasarkan Peraturan Sekretaris Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Setjen MPR mempunyai tugas memberikan dukungan administrasi dan keahlian terhadap kelancaran pelaksanaan wewenang dan tugas Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Setjen MPR menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan dan evaluasi rencana strategis Sekretariat Jenderal;
b. koordinasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas unit organisasi di lingkungan Sekretariat Jenderal;

c. perumusan kebijakan, pembinaan, dan pelaksanaan dukungan bidang pengkajian dan pemasyarakatan konstitusi, serta penyerapan aspirasi masyarakat kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia;
d. perumusan kebijakan, pembinaan, dan pelaksanaan dukungan bidang administrasi kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia;
e. perumusan kebijakan dan pelaksanaan pengawasan intern di lingkungan Sekretariat Jenderal;
f. pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia; dan
g. pelaksanaan fungsi lain yang ditugaskan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.

Dari tugas dan fungsi Setjen MPR, dapat diartikan bahwa Setjen MPR memiliki 2 (dua) tugas utama pelaksanaan dukungan terhadap Pimpinan dan Alat Kelengkapan MPR sebagai *stakeholder* utama Setjen MPR, yaitu: dukungan bidang pengkajian dan pemasyarakatan konstitusi, serta penyerapan aspirasi masyarakat, dan dukungan bidang administrasi kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.

Gambar 3.1 Penerimaan Tamu dan Delegasi

Sesuai dengan misi utama Setjen MPR, yaitu: Memberikan Layanan Prima Kepada MPR dan Alat Kelengkapannya dalam Melaksanakan Tugas Konstitusi. Setjen MPR harus mampu memberikan layanan prima bagi Pimpinan dan

Anggota MPR beserta Alat Kelengkapannya dalam melaksanakan tugas konstitusi. Layanan prima yang dimaksud adalah pemberian dukungan layanan berkualitas dengan menerapkan standar pelayanan minimum dan peningkatan kualitas layanan sesuai kebutuhan.

Gambar 3.2 Kunjungan Kerja Pimpinan MPR Tahun 2021

Indikator **Kepuasan MPR RI terhadap Dukungan Setjen MPR RI** adalah indikator yang digunakan untuk mengukur kualitas dan peningkatan akan layanan Setjen MPR yang diberikan kepada Pimpinan dan Alat Kelengkapan MPR RI terkait dukungan bidang pengkajian dan pemasyarakatan konstitusi sepanjang tahun 2021. Diukur dengan kegiatan: Pelaksanaan Tugas Pimpinan MPR, dukungan Pelaksanaan Sosialisasi Empat Pilar MPR, dukungan Pengkajian Kemajelisan, dukungan Pengelolaan Tugas Konstitusional MPR RI. Indeks kepuasan diukur dengan survei kepada Pimpinan dan Alat Kelengkapan MPR RI akan layanan yang diberikan oleh Setjen MPR di tahun 2021. Diukur dalam skala likert 1 sampai 4, yaitu; skala 1 – tidak baik, skala 2 – kurang baik, skala 3 - baik, dan skala 4 – sangat baik. Indikator ini termasuk kategori target *maximize*.

Tabel 3. 3 Hasil Survei Indeks Kepuasan Terhadap Dukungan Setjen MPR RI Tahun 2021

NO	KEGIATAN	HASIL SURVEI KEPUASAN
1.	Pelaksanaan Tugas Pimpinan MPR	3.64
2.	Pelaksanaan Sosialisasi Empat Pilar MPR	2.86
3.	Pengkajian Kemajelisan	3.42
4.	Pengelolaan Administrasi Keuangan MPR	3.24
5.	Penganggaran MPR	3.65
6.	Pelaksanaan Tugas Konstitusional MPR RI	3.23
Total		20.04
Indeks Kepuasan MPR RI Terhadap Dukungan Setjen MPR RI		**3.34**

Dari tabel 3.3, Indeks Kepuasan Terhadap Dukungan Setjen MPR RI tahun 2021 didukung oleh 6 (enam) kegiatan yang bertugas memberikan pelayanan kepada Pimpinan dan Alat Kelengkapan MPR. Tabel 3.4 berikut menjelaskan unit Eselon 2 sebagai penanggung jawab dan responden survei/ *stakeholder* yang dilayani.

Tabel 3.4 Kegiatan, Unit Penanggung Jawab dan Responden Survei Indeks Kepuasan Terhadap Dukungan Setjen MPR RI Tahun 2021

NO	KEGIATAN	UNIT PENANGGUNG JAWAB	RESPONDEN SURVEI/ *STAKEHOLDER*
1.	Pelaksanaan Tugas Pimpinan MPR	Biro Sekretariat Pimpinan	Pimpinan MPR
2.	Pelaksanaan Sosialisasi Empat Pilar MPR	Biro Persidangan dan Pemasyarakatan Konstitusi	Badan Sosialisasi, Fraksi dan Kelompok Dewan Perwakilan Daerah
3.	Pengkajian Kemajelisan	Biro Pengkajian Konstitusi	Badan Pengkajian, Komisi Kajian Ketatanegaraan
4.	Pengelolaan Administrasi Keuangan MPR	Biro Perencanaan dan Keuangan	Pimpinan, Alat Kelengkapan, dan Anggota MPR
5.	Penganggaran MPR	Biro Persidangan dan Pemasyarakatan Konstitusi	Badan Penganggaran
6.	Pelaksanaan Tugas Konstitusional MPR RI	Biro Persidangan dan Pemasyarakatan Konstitusi	Pimpinan, Alat Kelengkapan, dan Anggota MPR

Untuk menentukan nilai Indeks Kepuasan MPR RI Terhadap Dukungan Setjen MPR RI, dapat di lihat dalam tabel berikut.

Tabel 3.5 Nilai Persepsi, Interval IKM, Interval Konversi IKM dan Kinerja Unit Pelayanan

Nilai Persepsi	Nilai Interval	Nilai Internal Konversi (NIK)	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
1	1.00 – 2.5996	25.00 – 64.99	D	Tidak Baik
2	2.60 – 3.064	65.00 – 76.60	C	Kurang Baik
3	3.0644 – 3.532	76.61 – 88.30	B	Baik
4	3.5324 – 4.00	88.31 – 100.00	A	Sangat Baik

Berdasarkan tabel 3.5, nilai indeks sebesar **3,34** masuk kedalam kategori nilai persepsi "3" karena berada diantara interval 3.0644 – 3.532. Berdasarkan kedua nilai tersebut, dapat dikatakan mutu pelayanan Indeks Kepuasan MPR RI Terhadap Dukungan Setjen MPR RI masuk kategori "B", sementara kinerja unit layanan masuk dalam kategori **"Baik".** Jika dibandingkan dengan tahun 2020, kinerja Indeks Kepuasan MPR RI Terhadap Dukungan Setjen MPR RI mengalami peningkatan seperti pada grafik 3.2 di bawah ini.

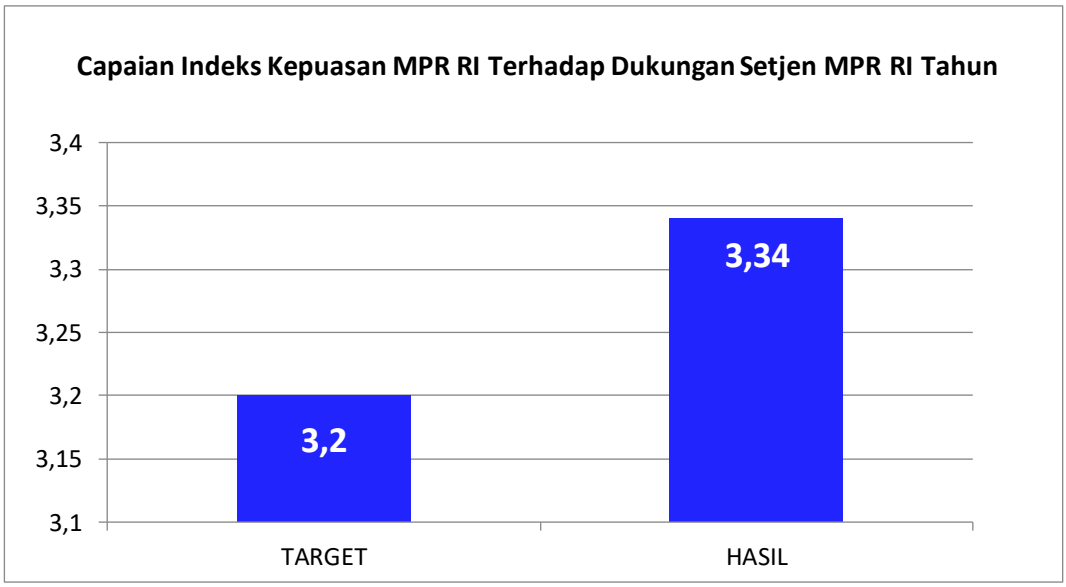

Grafik 3.2 Capaian Indeks Kepuasan MPR RI Terhadap Dukungan Setjen MPR RI Tahun 2021

Dari grafik 3.2 di atas dapat dilihat bahwa di tahun 2021, target untuk indikator Indeks Kepuasan MPR RI Terhadap Dukungan Setjen MPR RI adalah 3.2 dengan realisasi 3.34 atau capaian sebesar 104,38%, melebihi hasil yang telah ditargetkan. Semenjak tahun 2018 – 2021, Indeks Kepuasan MPR RI Terhadap Dukungan Setjen MPR RI terus mengalami peningkatan, dapat dilihat pada grafik 3.3 berikut ini.

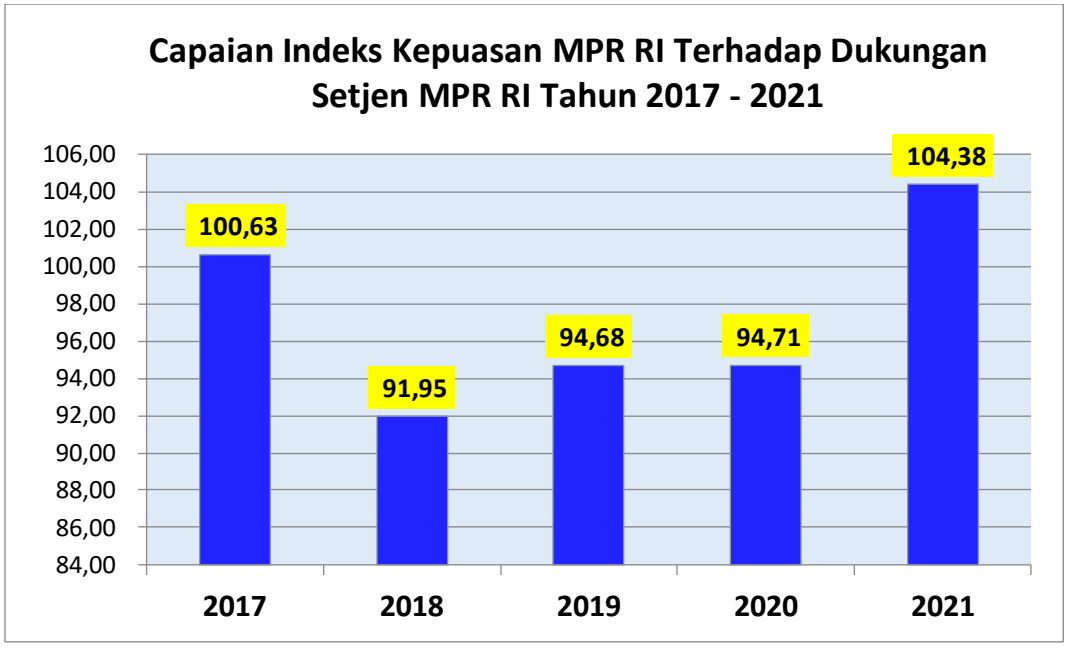

Grafik 3.3 Capaian Indeks Kepuasan MPR RI Terhadap Dukungan Setjen MPR RI Tahun 2017 – 2021

Dapat dilihat dari grafik 3.3 di atas bahwa terdapat 9.67 poin, capaian Indeks Kepuasan MPR RI Terhadap Dukungan Setjen MPR RI dari tahun 2020. Berikut adalah jenis layanan yang diberikan Setjen MPR kepada MPR RI sesuai dengan kegiatan, unit penanggung jawab dan *stakeholder* yang diberikan layanan.

Gambar 3.3 Peringatan Hari Konstitusi dan HUT Ke-76 MPR RI

Pelaksanaan Tugas Pimpinan MPR / Biro Sekretariat Pimpinan:

a. Layanan penyiapan perumusan kebijakan dan pelaksanaan penyusunan Informasi kegiatan Ketua dan Wakil Ketua MPR, bahan naskah sambutan/pidato Ketua dan Wakil Ketua MPR dan pengelolaan materi bidang tugas Pimpinan MPR;
b. Layanan penyiapan perumusan kebijakan dan pelaksanaan keprotokolan Pimpinan MPR dan Pimpinan Sekretariat Jenderal;
c. Layanan penyiapan perumusan kebijakan dan pelaksanaan penyusunan acara dan pengacaraan kegiatan Pimpinan MPR, pelaksanaan penyiapan dokumen perjalanan dinas luar negeri bagi Pimpinan MPR, Anggota MPR, dan Sekretariat Jenderal, pelaksanaan penyiapan teknis kegiatan upacara MPR dan Sekretariat Jenderal; dan
d. Layanan penyiapan perumusan kebijakan dan pelaksanaan alih bahasa, pengaturan tamu dan delegasi Pimpinan dan Sekretariat Jenderal;

Pelaksanaan Sosialisasi Empat Pilar MPR / Biro Persidangan dan Pemsyarakatan Konstitusi:

a. Layanan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Badan Sosialisasi;
b. Layanan penyiapan perumusan kebijakan dan pelaksanaan penyusunan materi kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh Badan Sosialisasi, pengelolaan kerja sama sosialisasi yang dilakukan oleh Badan Sosialisasi, serta penyusunan materi rapat Badan Sosialisasi; dan
c. Layanan penyiapan perumusan kebijakan dan pelaksanaan urusan tata usaha, rumah tangga dan kesekretariatan Badan Sosialisasi, penyusunan bahan rapat, dukungan teknis kegiatan rapat, dan penyusunan catatan rapat Badan Sosialisasi.

Pengkajian Kemajelisan / Biro Pengkajian Konstitusi:

a. Layanan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Badan Pengkajian dan Komisi Kajian Ketatanegaraan;
b. Layanan penyiapan perumusan kebijakan dan pelaksanaan penyusunan materi kajian, kerja sama dan penyusunan materi rapat Badan Pengkajian dan Komisi Kajian Ketatanegaraan; dan
c. Layanan penyiapan perumusan kebijakan dan pelaksanaan pengelolaan kajian Badan Pengkajian dan Komisi Kajian Ketatanegaraan, pemberian dukungan keahlian kepada Pimpinan

MPR, Fraksi, kelompok Dewan Perwakilan Daerah dan alat kelengkapan, serta penyusunan konsep naskah makalah, sambutan, pidato dan ceramah Pimpinan MPR, Pimpinan Alat Kelengkapan MPR, dan Pimpinan Sekretariat Jenderal, penyusunan konsep rekomendasi Badan Pengkajian dan Komisi Kajian Ketatanegaraan, dan penyusunan konsep laporan kinerja dan rencana strategis MPR.

Pengelolaan Administrasi Keuangan MPR / Biro Perencanaan dan Keuangan:

a. Layanan perumusan kebijakan dan pelaksanaan perencanaan anggaran dan program kegiatan MPR; dan
b. Layanan perumusan kebijakan dan pelaksanaan administrasi gaji, tunjangan, perjalanan dinas MPR.

Penganggaran MPR / Biro Persidangan dan Pemasyarakatan:

a. Layanan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Badan Penganggaran, Fraksi dan Kelompok Dewan Perwakilan Daerah;
b. Layanan penyiapan perumusan kebijakan dan pelaksanaan penyusunan materi kegiatan yang dilakukan oleh Badan Penganggaran, pengelolaan kerja sama dengan mitra Badan Penganggaran, serta penyusunan materi rapat Badan Penganggaran; dan
c. Layanan penyiapan perumusan kebijakan dan pelaksanaan urusan tata usaha, rumah tangga dan kesekretariatan Badan Penganggaran, penyusunan bahan rapat, dukungan teknis kegiatan rapat, dan penyusunan catatan rapat Badan Penganggaran.

Pelaksanaan Tugas Konstitusional MPR RI / Biro Persidangan dan Pemasyarakatan Konstitusi:

a. Layanan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran terkait Persidangan, Risalah, dan Musyawarah Pimpinan;
b. Layanan penyiapan perumusan kebijakan dan pelaksanaan dukungan penyusunan materi dan panduan sidang paripurna MPR, dan rapat Panitia *Ad Hoc*; dan
c. Layanan penyiapan perumusan kebijakan dan pelaksanaan dukungan penyusunan risalah sidang paripurna MPR, rapat panitia *Ad Hoc*, rapat Badan-Badan dan rapat Komisi Kajian Ketatanegaraan, serta rapat Pimpinan MPR, rapat gabungan, rapat Fraksi dan Kelompok Anggota, rapat konsultasi dan koordinasi pimpinan dengan Presiden dan/ atau pimpinan lembaga negara lainnya.

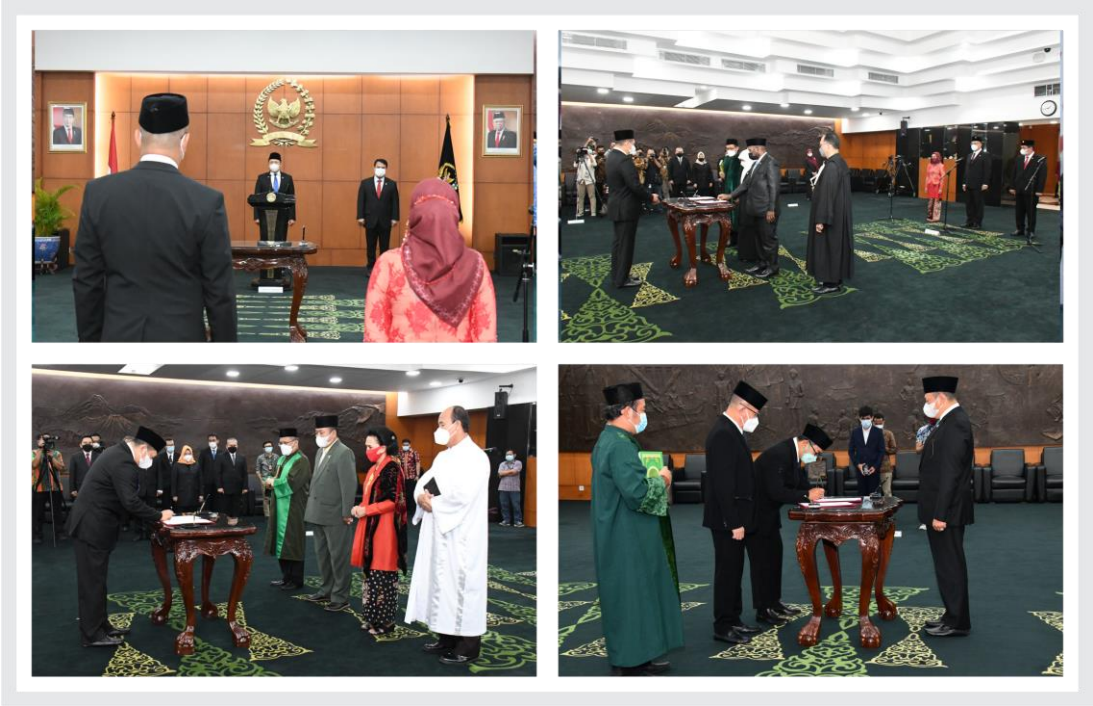

Gambar 3.4 Pelayanan Pergantian Antar Waktu Anggota MPR Tahun 2021

Gambar 3.5 Pelayanan Keprotokoleran Tahun 2021

3.2.2 Indeks Reformasi Birokrasi Setjen MPR RI

Indikator **Indeks Reformasi Birokrasi Setjen MPR RI** adalah indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan dari kegiatan Reformasi Birokrasi Setjen MPR. Indikator ini termasuk kategori target *maximize* dan didukung dengan kegiatan: Pengelolaan Administrasi MPR dan Sekretariat Jenderal, Pengelolaan Administrasi Publikasi, Pengelolaan Administrasi Keuangan Sekretariat Jenderal, Pengelolaan Administrasi Sarana dan Prasarana Kantor, dan Layanan Inspektorat.

Gambar 3.6 Rapat Kerja Reformasi Birokrasi Tahun 2021

Hingga Laporan Kinerja Setjen MPR ini diselesaikan, hasil evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi Setjen MPR dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KEMENPAN RB), belum dirilis. Oleh karena itu, perhitungan indikator Indeks Reformasi Birokrasi Setjen MPR RI bersumber dari nilai Reformasi Birokrasi Setjen MPR tahun 2020. Tabel 3.6 berikut adalah hasil evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi Setjen MPR Tahun 2020 dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Tabel 3.6 Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2020

No.	Komponen Penilaian	Bobot	2020
A.	Komponen Pengungkit		
	Pemenuhan	20.00	16.61
	Hasil Antara Area Perubahan	10.00	5.60
	Reform	30.00	18.44
Total Komponen Pengungkit		60.00	40.65
B.	Komponen Hasil		
1.	Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	10.00	7.37
2.	Kualitas Pelayanan Publik	10.00	8.83
3.	Pemerintahan Yang Bersih dan Bebas KKN	10.00	9.18
4.	Kinerja Organisasi	10.00	6.04
Total Komponen Hasil		40.00	31.41
Indeks Reformasi Birokrasi (Pengungkit + Hasil)		**100.00**	**72.06**

Grafik 3.4 di bawah ini adalah perbandingan antara target dan realisasi Indeks Reformasi Birokrasi Setjen MPR RI tahun 2021.

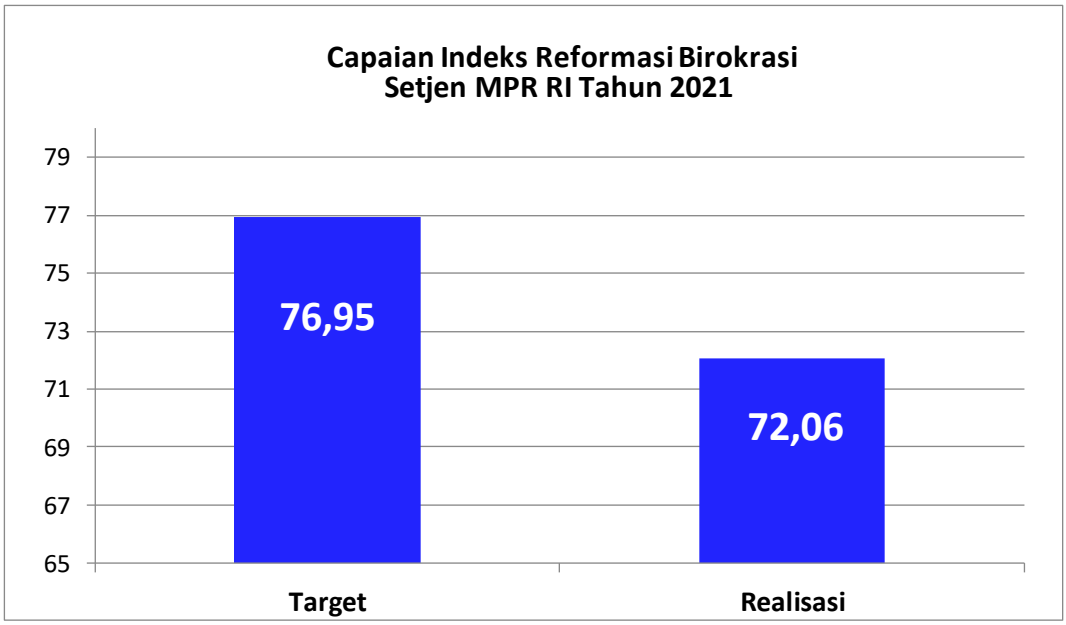

Grafik 3.4 Capaian Indeks Reformasi Birokrasi Setjen MPR RI Tahun 2021

Dari grafik 3.4 di atas dapat dilihat bahwa di tahun 2021, target untuk indikator Indeks Reformasi Birokrasi Setjen MPR RI adalah 76.95 dengan realisasi 72.06 atau capaian sebesar 93.65%, tidak mencapai hasil yang telah ditargetkan. Akan tetapi semenjak tahun 2016 – 2021, indeks Reformasi Birokrasi Setjen MPR terus mengalami peningkatan, dapat dilihat pada grafik 3.5 berikut ini.

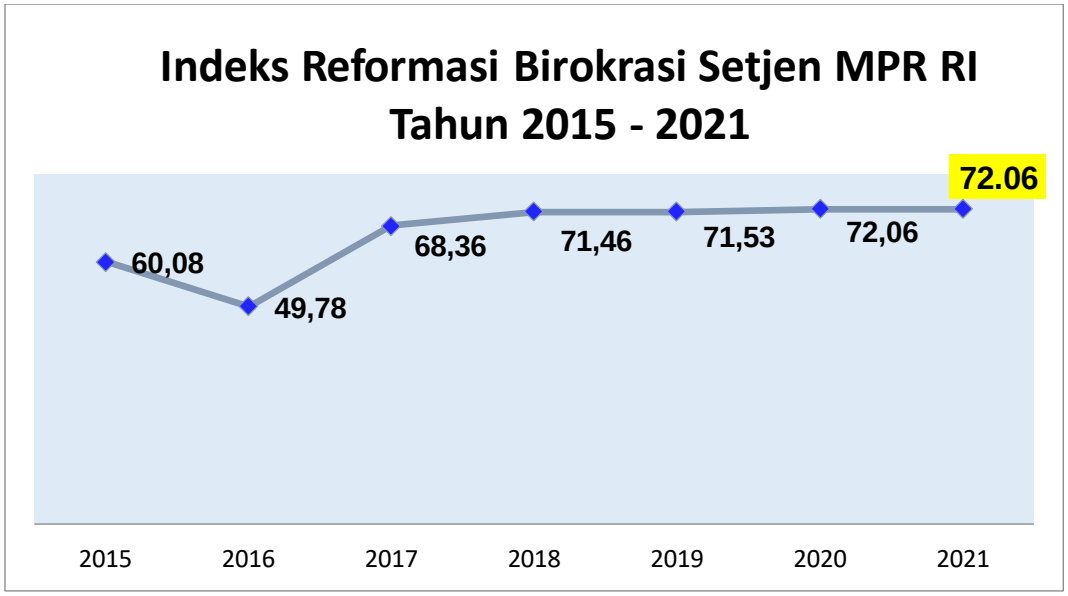

Grafik 3.5 Indeks Reformasi Birokrasi Setjen MPR RI Tahun 2015 – 2021

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KEMENPAN RB) memberikan hal-hal yang masih harus diperhatikan untuk mengoptimalkan program reformasi birokrasi di Setjen MPR. Hal ini tertuang dalam Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/87/M.RB.06/2021 tanggal 31 Maret 2021, dengan poin-poin sebagai berikut:

a. *Roadmap* Reformasi Birokrasi Setjen MPR RI masih belum diformalkan sehingga setiap Deputi belum bisa menyusun rencana kerja reformasi birokrasi juga;
b. Pelaksanaan reformasi birokrasi di Setjen MPR RI belum dilaksanakan secara terpadu oleh kelompok kerja (Pokja) yang ada di pusat dan unit kerja. Pengisian PMPRB hanya dilaksanakan oleh im reformasi birokrasi pusat;
c. Tindak Lanjut atas Surat Edaran dan Konkrit Penyederhanaan Birokrasi dan Peraturan Menteri PANRB Nomor 28 Tahun 2019 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke delam Jabatan Fungsional belum dilaksanakan secara menyeluruh;
d. Peta proses bisnis Setjen MPR RI telah disusun dan diturunkan menjadi SOP, namun proses bisnis ini masih berdasarkan pada struktur organisasi sebelumnya. Selain itu, penerapan *e-government* secara terintegrasi masih terus berproses sehingga belum terlalu signifikan mengungkit perbaikan pada layanan, baik layanan internal maupun eksternal;
e. Belum optimalnya pelaksanaan *merit system* antara lain mengenai tindak lanjut hasil asesmen sebagai dasar pengembangan karir

individu berbasis kompetensi, penyusunan perencanaan pengembangan pegawai atau *Human Capital Development Plan* (HCDP) belum menyeluruh dan belum adanya pemetaan talenta sebagai dasar penempatan jabatan kritikal/ suksesi;

f. Belum adanya penyelarasan indikator kinerja dari level orgnisasi sampai dengan level individu, sehingga masih terdapat kegiatan yang dilakukan oleh pegawai belum berkontribusi secara langsung terhadap kinerja level di atasnya. Di samping itu, hasil survei internal organisasi menunjukkan masih cukup banyak pegawai yang belum memahami kontribusi kinerjanya pada organisasi;

g. Pembangunan Zona Integritas pada tahun 2020 belum berhasil mewujudkan unit kerja yang memperoleh predikat Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dari satu unit kerja yang diajukan.

Dengan hal-hal yang masih harus diperhatikan di atas, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KEMENPAN RB) memberikan evaluasi atas pelaksanaan program dan kegiatan reformasi birokrasi yang dilaksanakan di Setjen MPR, dengan poin-poin evaluasi sebagai berikut:

a. Segera menyelesaikan *Roadmap* Reformasi Birokrasi Sekretariat Jenderal MPR RI Tahun 2020 – 2024 untuk selanjutnya setiap Deputi menindaklanjuti dengan menyusun rencana kerja reformasi birokrasi;

b. Melaksanakan reformasi birokrasi sampai pada unit kerja terkecil, tidak hanya di Tim Reformasi Birokrasi Pusat saja. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi rencana aksi reformasi birokrasi juga diperlukan untuk memantau sejauh mana reformasi birokrasi sudah berjalan;

c. Mengoptimalkan fungsi Tim Reformasi Birokrasi, asesor, dan Tim Penilai Internal dalam melakukan pemantauan dan evaluasi implementasi reformasi birokrasi, serta memastikan hasil pemantauan dan evaluasi tersebut dapat ditindaklanjuti secara maksimal dan tercipta perbaikan berkelanjutan;

d. Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 382 s.d. 393 Tahun 2019 tentang Langkah Strategis dan Konkrit Penyederhanaan Birokrasi dan Peraturan Menteri PANRB Nomor 28 Tahun 2019 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional. Hal tersebut merupakan bagian dari upaya mewujudkan birokrasi yang dinamis, lincah (*agile*), dan profesional;

e. Melakukan reviu dan penyempurnaan peta proses bisnis sesuai dengan struktur organisasi yang terbaru sehingga peta proses bisnis yang ada dapat digunakan untuk memaksimalkan pencapaian kinerja. Selanjutnya, perlu melakukan optimalisasi penerapan *e-government* yang terintegrasi dengan menyusun perencanaan pengembangan SPBE dengan baik dan melakukan pemantauan serta evaluasi secara berkala;
f. Mempercepat terlaksananya sistem merit dengan menerapkan seluruh ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri PANRB Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Merit dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara;
g. Menyempurnakan ukuran kinerja organisasi sampai dengan individu sehingga lebih berorientasi hasil. Selanjutnya melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja tersebut dan menggunakan hasilnya sebagai dasar dalam memberikan apresiasi/penghargaan ataupun sanksi bagi pegawai;
h. Memperkuat implementasi kebijakan pengawasan internal, seperti penanganan gratifikasi, pengelolaan pengaduan masyarakat, *Whistle Blowing System*, dan kebijakan benturan kepentingan. Selain itu juga memperkuat penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, dengan mendorong setiap unit kerja mampu mengidentifikasi dan melakukan pengendalian risiko yang melekat pada upaya pencapaian kinerja; dan
i. Meningkatkan monitoring dan evaluasi terhadap unit kerja yang melakukan pembangunan Zona Integritas sehingga dapat menjadi pemicu percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi di Setjen MPR RI.

3.2.3 Tingkat Pemenuhan Layanan Internal Sekretariat Jenderal MPR RI

Setjen MPR memiliki 2 (dua) tugas utama pelaksanaan dukungan terhadap Pimpinan dan Alat Kelengkapan MPR sebagai *stakeholder* utama Setjen MPR, yaitu: dukungan bidang pengkajian dan pemasyarakatan konstitusi, serta penyerapan aspirasi masyarakat, dan dukungan bidang administrasi kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.

Indikator **Tingkat Pemenuhan Layanan Internal Sekretariat Jenderal MPR RI** adalah indikator yang digunakan untuk mengukur kualitas dan peningkatan akan layanan internal Setjen MPR yang diberikan kepada Pimpinan dan Alat Kelengkapan MPR RI terkait dukungan bidang administrasi sepanjang tahun

2021. Indikator Tingkat Pemenuhan Layanan Internal Sekretariat Jenderal MPR RI diambil dari persepsi kepuasan terhadap layanan internal Setjen MPR yang diberikan selama tahun 2021 kepada Pimpinan dan Alat Kelengkapan MPR RI. Diukur dalam skala likert 1 sampai 4, yaitu; skala 1 – tidak baik, skala 2 – kurang baik, skala 3 - baik, dan skala 4 – sangat baik. Indikator ini termasuk kategori target *maximize*. Didukung oleh kegiatan: Pengelolaan Administrasi MPR dan Sekretariat Jenderal, Pengelolaan Administrasi Publikasi, Pengelolaan Administrasi Keuangan Sekretariat Jenderal, dan Pengelolaan Administrasi Sarana dan Prasarana Kantor.

Tabel 3.7 Hasil Survei Tingkat Pemenuhan Layanan Internal Sekretariat Jenderal MPR RI Tahun 2021

NO	KEGIATAN	HASIL SURVEI KEPUASAN
1.	Pengelolaan Administrasi MPR dan Sekretariat Jenderal	3.36
2.	Pengelolaan Administrasi Publikasi	3.43
3.	Pengelolaan Administrasi Keuangan Sekretariat Jenderal	3.24
4.	Pengelolaan Administrasi Sarana dan Prasarana Kantor	3.15
Total		13.18
Tingkat Pemenuhan Layanan Internal Sekretariat Jenderal MPR RI		**3.30**
Konversi Nilai		**82.39**

Dari tabel 3.7, Tingkat Pemenuhan Layanan Internal Sekretariat Jenderal MPR RI tahun 2021 didukung oleh 4 (empat) kegiatan yang bertugas memberikan pelayanan kepada Pimpinan dan Alat Kelengkapan MPR. Tabel 3.8 berikut menjelaskan unit Eselon 2 sebagai penanggung jawab dan responden survei/ *stakeholder* yang dilayani.

Tabel 3.8 Kegiatan, Unit Penanggung Jawab dan Responden Survei Tingkat Pemenuhan Layanan Internal Sekretariat Jenderal MPR RI Tahun 2021

NO	KEGIATAN	UNIT PENANGGUNG JAWAB	RESPONDEN SURVEI/ *STAKEHOLDER*
1.	Pengelolaan Administrasi MPR dan Sekretariat Jenderal	Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Hukum	Pimpinan, Alat Kelengkapan, dan Anggota MPR
2.	Pengelolaan Administrasi Publikasi	Biro Hubungan Masyarakat dan Sistem Informasi	Pimpinan MPR

NO	KEGIATAN	UNIT PENANGGUNG JAWAB	RESPONDEN SURVEI/ *STAKEHOLDER*
3.	Pengelolaan Administrasi Keuangan Sekretariat Jenderal	Biro Perencanaan dan Keuangan	Pimpinan, Alat Kelengkapan, dan Anggota MPR
4.	Pengelolaan Administrasi Sarana dan Prasarana Kantor	Biro Umum	Pimpinan, Alat Kelengkapan, dan Anggota MPR

Untuk menentukan nilai Tingkat Pemenuhan Layanan Internal Sekretariat Jenderal MPR RI, dapat di lihat dalam tabel berikut;

Tabel 3.9 Nilai Persepsi, Interval IKM, Interval Konversi IKM dan Kinerja Unit Pelayanan

Nilai Persepsi	Nilai Interval	Nilai Internal Konversi (NIK)	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
1	1.00 – 2.5996	25.00 – 64.99	D	Tidak Baik
2	2.60 – 3.064	65.00 – 76.60	C	Kurang Baik
3	3.0644 – 3.532	76.61 – 88.30	B	Baik
4	3.5324 – 4.00	88.31 – 100.00	A	Sangat Baik

Berdasarkan tabel 3.9, nilai indeks sebesar 82.39 masuk kedalam kategori nilai persepsi "3" karena berada diantara interval 3.0644 – 3.532. Berdasarkan kedua nilai tersebut, dapat dikatakan mutu pelayanan Tingkat Pemenuhan Layanan Internal Sekretariat Jenderal MPR RI masuk kategori "B", sementara kinerja unit layanan masuk dalam kategori **"Baik".** Capaian kinerja Tingkat Pemenuhan Layanan Internal Sekretariat Jenderal MPR RI tahun 2021 dapat dilihat pada grafik 3.6 di bawah ini.

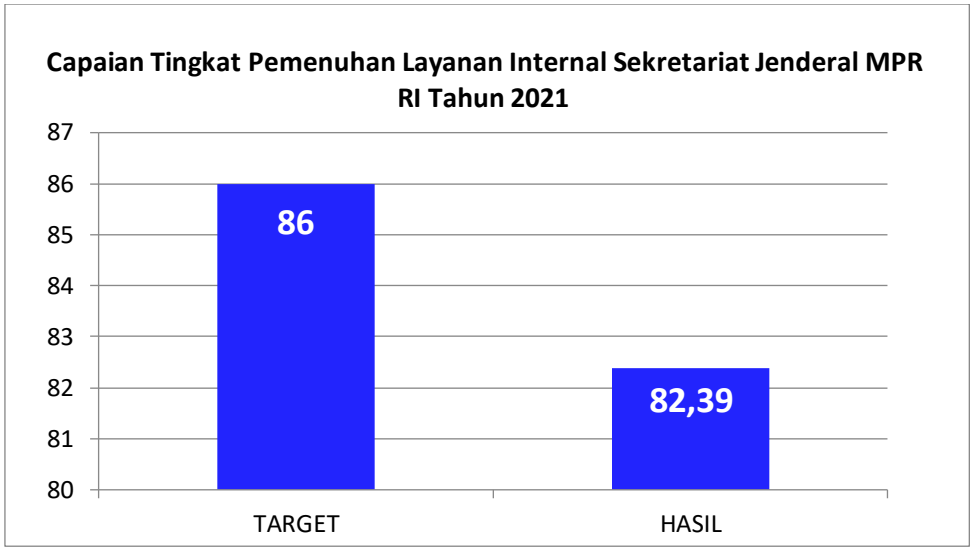

Grafik 3.6 Capaian Tingkat Pemenuhan Layanan Internal Sekretariat Jenderal MPR RI Tahun 2021

Dari grafik 3.6 di atas dapat dilihat bahwa di tahun 2021, target untuk indikator Tingkat Pemenuhan Layanan Internal Sekretariat Jenderal MPR RI adalah 86 dengan realisasi 82.39 atau capaian sebesar 95.80%, tidak mencapai hasil yang telah ditargetkan. Berikut adalah jenis layanan yang diberikan Setjen MPR kepada MPR RI sesuai dengan kegiatan, unit penanggung jawab dan *stakeholder* yang diberikan layanan.

Pengelolaan Administrasi MPR dan Sekretariat Jenderal / Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Hukum

a. Layanan administrasi keanggotaan;
b. Layanan kesehatan / poliklinik;
c. Layanan ekspedisi; dan
d. Layanan informasi hukum.

Pengelolaan Administrasi Publikasi / Biro Hubungan Masyarakat dan Sistem Informasi

a. Layanan pemberitaan melalui media massa serta pelayanan penyebaran informasi MPR; dan
b. Layanan media visual serta dokumentasi foto kegiatan MPR;

Pengelolaan Administrasi Keuangan Sekretariat Jenderal / Biro Perencanaan dan Keuangan

a. Layanan perumusan kebijakan dan pelaksanaan perencanaan anggaran dan program kegiatan MPR; dan
b. Layanan perumusan kebijakan dan pelaksanaan administrasi gaji, tunjangan, perjalanan dinas MPR.

Pengelolaan Administrasi Sarana dan Prasarana Kantor / Biro Umum

a. Layanan pengelolaan urusan pemeliharaan barang perlengkapan, perumahan dinas, dan gedung;
b. Layanan perlengkapan, ruang rapat, ruang kerja, rumah dinas Pimpinan MPR, dan rumah dinas jabatan serta pelayanan dukungan akomodasi kegiatan Pimpinan MPR, Badan-Badan, Komisi Kajian Ketatanegaraan;
c. Layanan pemeliharaan, perbaikan dan pembangunan gedung dan taman, rumah dinas Pimpinan MPR; dan
d. Layanan pengamanan, pengawalan kegiatan Pimpinan MPR dan Anggota MPR.

3.2.4 Rasio Draf Hasil Kajian Sistem Ketatanegaraan Setjen MPR RI Yang Dimanfaatkan Terhadap Total Draf Hasil Kajian Sistem Ketatanegaraan Yang Dihasilkan

Sesuai dengan ketentuan Pasal 50 Peraturan Tata Tertib MPR, Badan Pengkajian MPR bertugas:

1. Mengkaji sistem ketatanegaraan, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta pelaksanaannya;
2. Menyerap aspirasi masyarakat, daerah, dan lembaga negara berkaitan dengan pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Merumuskan pokok pikiran tentang rekomendasi MPR berkaitan dengan dinamika aspirasi masyarakat;
4. Meninjau dan mengevaluasi pelaksanaan Ketetapan MPR RI Nomor I/MPR/2003 tentang Peninjauan terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR RI dari tahun 1960 sampai dengan Tahun 2002, khususnya Pasal 4 untuk ditindaklanjuti oleh DPR dan Pemerintah; dan
5. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas dalam Rapat Gabungan.

Selain tugas sebagaimana disebutkan di atas, Badan Pengkajian juga ditugasi untuk menindaklanjuti Keputusan MPR Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rekomendasi MPR Masa Jabatan 2014 – 2019, yaitu:

1. Melakukan pengkajian secara mendalam terhadap Pokok-Pokok Haluan Negara khususnya mengenai substansi dan bentuk hukum, yang memungkinan diatur di dalam Ketetapan MPR, dengan tetap terbuka kemungkinan untuk diatur di dalam Undang-Undang;

2. Melakukan pengkajian secara mendalam terhadap gagasan penataan wewenang MPR, penataan wewenang DPD, penataan sistem presidensial, penataan kekuasaan kehakiman; dan
3. Penataan sistem hukum dan peraturan perundang-undangan berdasarkan Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum negara.

Untuk efektifitas pelaksanaan tugas Badan Pengkajian MPR masa jabatan 2019 – 2024, dilakukan pengelompokkan tema kajian sebagai berikut:

1. Mengkaji Pokok-Pokok Haluan Negara, yang meliputi substansi dan bentuk yang memungkinkan diatur di dalam Ketetapan MPR, dengan tetap terbuka kemungkinan untuk diatur di dalam Undang-Undang;
2. Mengkaji sistem ketatanegaraan, UUD NRI Tahun 1945, serta pelaksanaannya;
3. Meninjau dan mengevaluasi pelaksanaan Ketetapan MPR RI Nomor I/MPR/2003 tentang Peninjauan terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR RI dari Tahun 1960 sampai dengan Tahun 2002, khususnya Pasal 4 untuk ditindaklanjuti oleh DPR dan Presiden; dan
4. Penataan sistem hukum dan peraturan perundang-undangan berdasarkan Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum negara.

Indikator ini dinilai dengan cara menghitung rasio draf hasil Kajian Sistem Ketatanegaraan yang dimanfaatkan oleh Pimpinan, Alat Kelengkapan dan masyarakat. Draf yang dimaksud adalah Draf Hasil Kajian Sistem Ketatanegaraan dihasilkan melalui mekanisme Rapat Pleno Badan Pengkajian di tahun 2021. Indikator ini termasuk kategori target *maximize*. Didukung oleh kegiatan: Pengkajian Kemajelisan.

Gambar 3.7 Rapat Badan Pengkajian Tahun 2021

Gambar 3.8 Diseminasi Hasil Kajian Tahun 2021

Grafik 3.7 Capaian Rasio Draf Hasil Kajian Sistem Ketatanegaraan Setjen MPR RI yang Dimanfaatkan Terhadap Total Draf Hasil Kajian Sistem Ketatanegaraan yang Dihasilkan Tahun 2021

Dari grafik 3.7 di atas dapat dilihat bahwa target sebesar 100% dengan capaian sebesar 100% atau semua draf Hasil Kajian Sistem Ketatanegaraan yang dihasilkan termanfaatkan oleh *stakeholder*, yaitu: Pimpinan dan Anggota MPR, Perguruan Tinggi dan Lembaga Kajian. Tabel 3.10 di bawah ini akan dijelaskan tema Kajian Sistem Ketatanegaraan, hasil draf kajian serta pihak yang memanfaatkan draf hasil kajian tersebut.

Tabel 3.10 Kegiatan, Unit Penanggung Jawab dan Responden Survei Tingkat Pemenuhan Layanan Internal Sekretariat Jenderal MPR RI Tahun 2021

Tema Kajian	Hasil Kajian	Pemanfaat Kajian
Rapat Kelompok Badan Pengkajian dengan tema Pokok-Pokok Haluan Negara: • **Kelompok 1: Ideologi dan Politik** • **Kelompok 2: Agama dan Integrasi TAP MPR/MPRS** • **Kelompok 3: Hukum, Pertahanan, dan Keamanan**	1. Draf Naskah Pokok-Pokok Haluan Negara. 2. Draf Rekomendasi tentang Pembentukan Undang-Undang sebagai Tindak Lanjut dari Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor: I/Mpr/2003 tentang Peninjauan Terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan	1. Pimpinan MPR 2. Pimpinan dan Anggota Badan Pengkajian MPR

Tema Kajian	Hasil Kajian	Pemanfaat Kajian
• Kelompok 4: Sosial dan Budaya • Kelompok 5: Ekonomi *Draf* yang dihasilkan: 6 dokumen rumusan kelompok.	Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 1960 sampai dengan Tahun 2002.	
Kajian Akademik dengan tema Evaluasi Pelaksanaan UUD NRI Tahun 1945, bekerjasama dengan: 1. Universitas Brawijaya 2. Universitas Negeri Gorontalo 3. CSRC UIN Syarif Hidayatullah 4. Universitas Jenderal Soedirman *Draf* yang dihasilkan: 4 kajian akademik	Draf Evaluasi Pelaksanaan UUD NRI Tahun 1945.	1. Pimpinan dan Anggota MPR 2. Perguruan Tinggi 3. Lembaga Kajian

Di bawah ini dijelaskan Alur Pemanfaatan Draf Hasil Kajian Tentang Pokok-Pokok Haluan Negara Badan Pengkajian MPR RI Tahun 2021 dan Alur Pemanfaatan Draf Hasil Kajian Tentang Evaluasi UUD NRI Tahun 1945 Badan Pengkajian MPR RI Tahun 2021

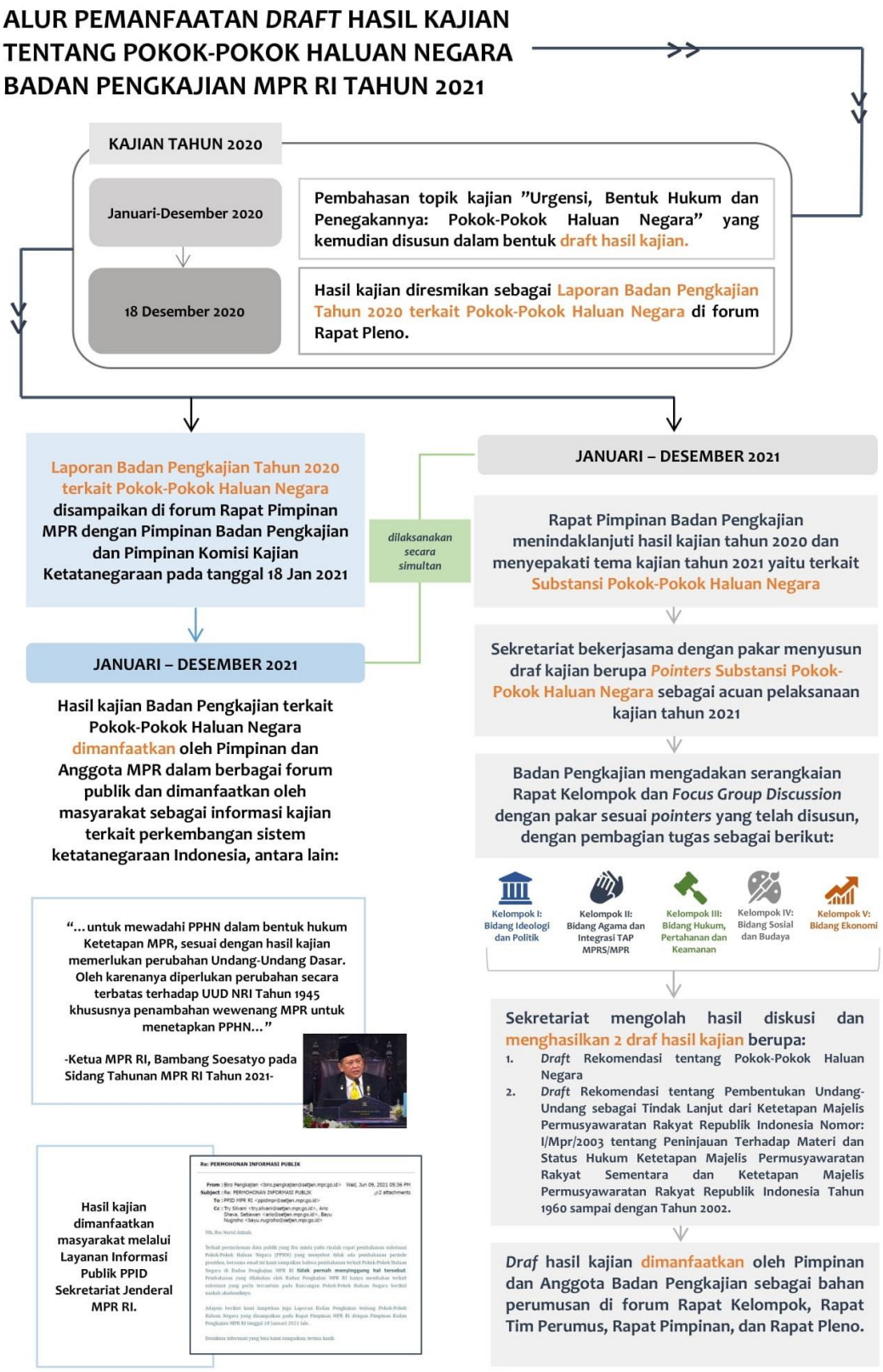

Gambar 3.9 Alur Pemanfaatan Draf Hasil Kajian Tentang Pokok-Pokok Haluan Negara Badan Pengkajian MPR RI Tahun 2021

ALUR PEMANFAATAN DRAF HASIL KAJIAN TENTANG EVALUASI UUD NRI TAHUN 1945 BADAN PENGKAJIAN MPR RI TAHUN 2021

KAJIAN AKADEMIK

Draf hasil kajian dihasilkan melalui mekanisme Kajian Akademik yang dilaksanakan oleh Peneliti dari Sekretariat bekerjasama dengan perguruan tinggi/lembaga kajian.

TEMA KAJIAN

"Evaluasi Pelakasanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945"

PELAKSANA

2020	Kajian Bab I Bentuk dan Kedaulatan, Bab II Majelis Permusyawaratan Rakyat, dan Bab III Kekuasaan Pemerintahan Negara: bekerjasama dengan Universitas Airlangga.
2021	Kajian Bab V Kementerian Negara, Bab VI Pemerintahan Daerah, Bab VII Dewan Perwakilan Rakyat, Bab VIIA Dewan Perwakilan Daerah, dan Bab VIIB Pemilihan Umum: bekerjasama dengan Universitas Brawijaya.
	Kajian Bab VIII Keuangan, Bab IX Kekuasaan Kehakiman, Bab IXA Wilayah Negara, dan Bab VIIIA Badan Pemeriksa Keuangan: bekerjasama dengan Universitas Negeri Gorontalo.
	Kajian Bab X Warga Negara dan Penduduk, Bab XA Hak Asasi Manusia, Bab XI Agama, dan Bab XII Pertahanan dan Keamanan Negara: bekerjasama dengan *Center For The Study Of Religion And Culture* UIN Syarif Hidayatullah.
	Kajian Bab XIII Pendidikan dan Kebudayaan, Bab XIV Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Nasional, Bab XV, Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan, Bab XVI Perubahan UUD, Aturan Peralihan dan Aturan Tambahan: bekerjasama dengan Universitas Jenderal Soedirman.

DRAF HASIL KAJIAN

Seluruh Laporan Kajian Akademik diolah oleh Peneliti di Sekretariat Jenderal MPR RI dan disusun dalam satu naskah draf hasil kajian.

PEMANFAATAN HASIL KAJIAN

PIMPINAN & ANGGOTA MPR RI

Cetakan buku Kajian Akademik didistribusikan kepada 711 Pimpinan dan Anggota MPR RI, serta kepada perguruan tinggi dan lembaga kajian di seluruh Indonesia.

PERGURUAN TINGGI & LEMBAGA KAJIAN

MASYARAKAT

Cetakan buku Kajian Akademik didistribusikan ke Perpustakaan Nasional, Perpustakaan MPR, DPR, dan DPD dan dapat diakses secara terbuka di website mpr.go.id.

Gambar 3.10 Alur Pemanfaatan Draf Hasil Kajian Tentang Evaluasi UUD NRI Tahun 1945 Badan Pengkajian MPR RI Tahun 2021

3.2.5 Rasio Masyarakat Yang Mendapatkan Sosialisasi 4 (Empat) Pilar Terhadap Total Yang Direncanakan

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3), Pasal 5 huruf b, salah satu tugas MPR memasyaratkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika.

Gambar 3.11 Lomba Video Animasi Empat Pilar Tahun 2021

Kegiatan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada pasal 5 huruf b, dikenal dengan sebutan Sosialisasi Empat Pilar MPR RI. Sosialisasi Empat Pilar MPR RI yaitu:

1. Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara;
2. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai Konstitusi Negara serta Ketetapan MPR RI;
3. Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai bentuk negara; dan
4. Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan negara.

Ketentuan lebih lanjut diatur dalam Ketetapan MPR Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib MPR, Badan Sosialisasi diatur dalam Pasal 41, yang

menyatakan bahwa kedudukan Badan Sosialisasi sebagai Alat Kelengkapan MPR yang dibentuk dalam Sidang Paripurna MPR untuk melaksanakan Sosialisasi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika. Jumlah anggota Badan Sosialisasi paling banyak 45 (empat puluh lima) orang anggota MPR. Komposisi terdiri dari 5 (lima) orang Pimpinan Badan Sosialisasi dan 40 (empat puluh) orang anggota MPR yang dibagi secara proporsional Fraksi dan Kelompok DPD.

Gambar 3.12 Sosialisasi Empat Pilar Berbasis Komunitas Tahun 2021

Pasal 45 Tata Tertib MPR mengatur tugas Badan Sosialisasi yaitu:

1. Memasyarakatkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
2. Memasyarakatkan Ketetapan MPR;
3. Menyusun materi dan metedologi serta memantau dan mengevaluasi penyeleggaraan kegiatan pemasyarakatan secara menyeluruh, dan;
4. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas dalam Rapat Gabungan.

Gambar 3.13 Sosialisasi Empat Pilar Berbasis Ormas Tahun 2021

Indikator **Rasio Masyarakat Yang Mendapatkan Sosialisasi 4 (Empat) Pilar Terhadap Total Yang Direncanakan** adalah indikator yang digunakan untuk menunjukkan keberhasilan kegiatan Sosialisasi Empat Pilar MPR RI di tahun 2021. Didukung oleh kegiatan: **Pelaksanaan Sosialisasi Empat Pilar MPR** dan termasuk kategori target *maximize*. Indikator ini dihitung dengan cara mengidentifikasi kegiatan sosialisasi yang dilakukan selama tahun 2021, kemudian merekapitulasi jumlah masyarakat yang mendapatkan Sosialisasi 4 Pilar dan dibandingkan dengan target Sosialisasi 4 Pilar di tahun 2021. Berikut adalah grafik 3.8 sebagai gambaran target dan capaian kinerja indikator ini:

Grafik 3.8 Perbandingan Target dan Realisasi Capaian Rasio Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi 4 (Empat) Pilar terhadap Total yang Direncanakan Tahun 2021

Dari grafik 3.8 diatas dapat dilihat bahwa pada tahun 2021, target kinerja kegiatan Sosialisasi 4 (Empat) Pilar adalah 92% dengan capaian 102.6% atau melampaui target sebesar 10.6%. Tabel di bawah ini adalah metode kegiatan Sosialisasi 4 (Empat) Pilar di tahun 2021 beserta target dan capaiannya, satuan yang digunakan adalah jumlah orang, berikut adalah tabel 3.11:

Tabel 3.11 Target dan Capaian Sosialisasi 4 (Empat) Pilar Tahun 2021

No	Metode Sosialisasi 4 (Empat) Pilar Tahun 2021	Target	Capaian	%
Sosialisasi 4 (Empat) Pilar Tahun 2021		669.650	687.050	102.6%
A.	Sosialisasi Empat Pilar oleh Anggota MPR di Daerah Pemilihan	627.750	627.750	100%
B.	Sosialisasi Empat Pilar oleh Badan Sosialisasi MPR:	32.900	33.800	102.7%
	. Pemasyarakatan Empat Pilar oleh Badan Sosialiasi MPR	31.000	31.900	102.9%
	. Diseminasi Empat Pilar kepada Masyarakat Diaspora Indonesia	100	100	100%
	Pendidikan Penguatan Empat Pilar untuk Generasi Muda	1.200	1.200	100%
	Pagelaran Seni Budaya Empat Pilar	600	600	100%
C.	Sosialisasi Empat Pilar Kepada Tokoh Masyarakat	16.500	16.500	100%

No	Metode Sosialisasi 4 (Empat) Pilar Tahun 2021	Target	Capaian	%
D.	Sosialisasi Empat Pilar Kepada Aparatur Pemerintah Kabupaten/Kota	9.000	9.000	100%

Berdasarkan tabel 3.11 di atas terdapat 4 (empat) metode Sosialisasi 4 (Empat) Pilar: Sosialisasi Empat Pilar oleh Anggota MPR di Daerah Pemilihan; Sosialisasi Empat Pilar oleh Badan Sosialisasi MPR; Sosialisasi Empat Pilar Kepada Tokoh Masyarakat; dan Sosialisasi Empat Pilar Kepada Aparatur Pemerintah Kabupaten/Kota. Tiga metode tersebut mencapai target (100%), dan metode Sosialisasi Empat Pilar oleh Badan Sosialisasi MPR melampaui target (102.7%).

Untuk mengetahui jangkauan kegiatan Sosialisasi 4 Pilar MPR, Biro Persidangan dan Pemasyarakatan Konstitusi telah memetakan persebaran sosialisasi di seluruh provinsi di Indonesia sebagai berikut:

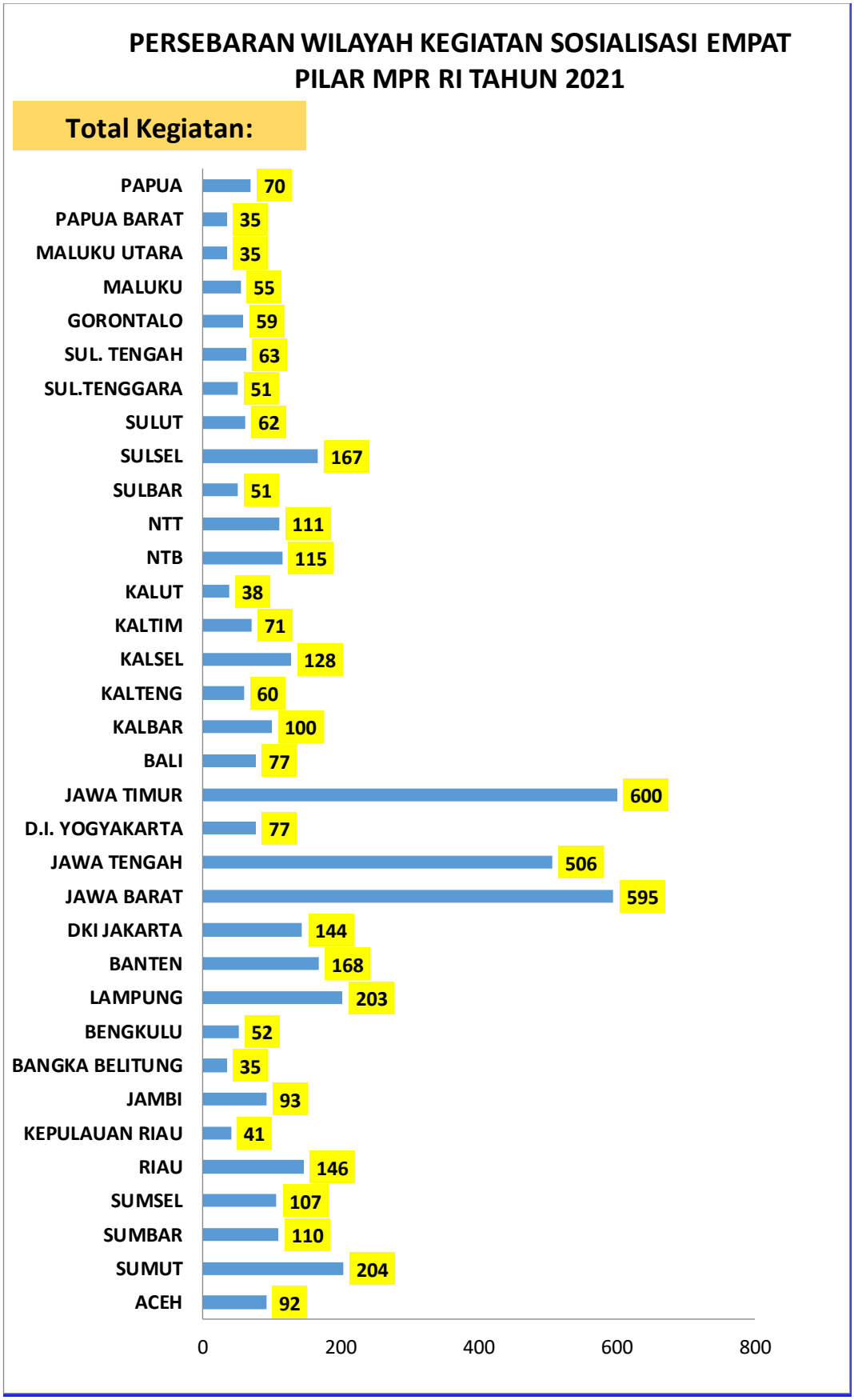

Grafik 3.9 Persebaran Wilayah Kegiatan Sosialisasi Empat Pilar MPR RI Tahun 2021

Dari grafik 3.9 di atas dapat terlihat bahwa sepanjang tahun 2021, 3 (tiga) provinsi terbanyak mendapatkan Sosialisasi 4 (Empat) Pilar adalah:

1. Jawa Timur: 600 kegiatan;
2. Jawa Barat: 595 kegiatan; dan
3. Jawa Tengah: 506 kegiatan.

Dan 3 (tiga) provinsi paling sedikit mendapatkan Sosialisasi 4 (Empat) Pilar adalah:

1. Papua Barat: 35 kegiatan;
2. Maluku Utara: 35 kegiatan; dan
3. Bangka Belitung: 35 kegiatan.

Indikator Rasio Masyarakat Yang Mendapatkan Sosialisasi 4 (Empat) Pilar Terhadap Total Yang Direncanakan pada tahun 2021 mengalami kenaikan capaian kinerja dibandingkan dengan tahun 2021, grafik 3.10 berikut adalah perbandingan kinerja:

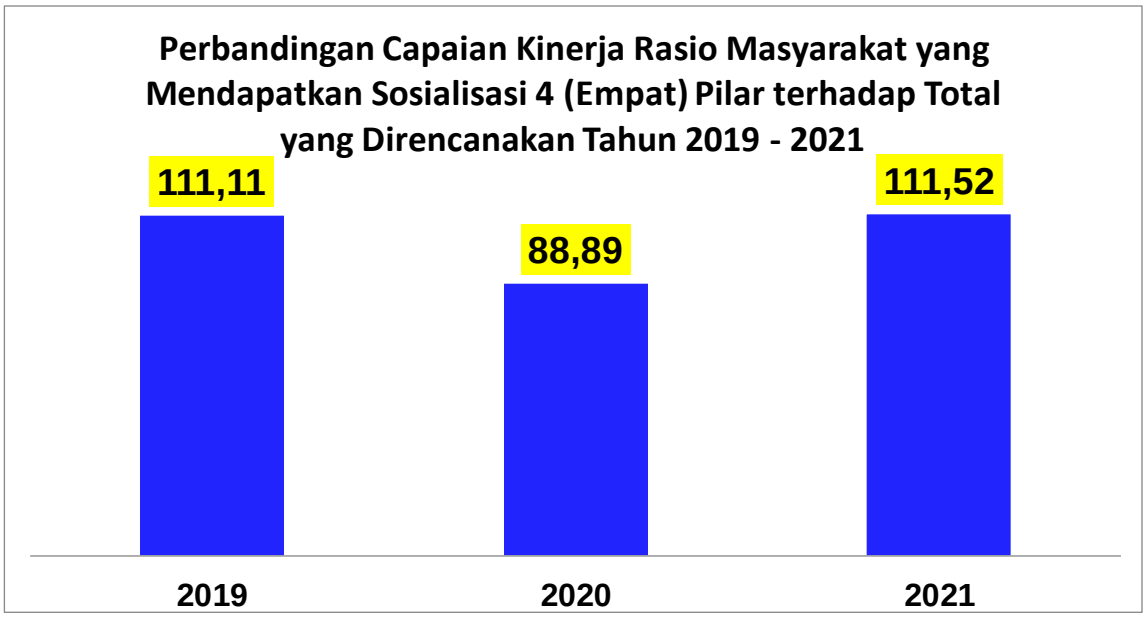

Grafik 3.10 Perbandingan Capaian Kinerja Rasio Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi 4 (Empat) Pilar terhadap Total yang Direncanakan Tahun 2019 - 2021

Pada tahun 2020 terdapat 2 metode yang tidak dapat dilaksanakan, yaitu: Sosialisasi Kepada Mahasiswa dengan Metode *Outbond* dan Sosialisasi Melalui Kemah Empat Pilar. Di tahun 2021 mengalami perbaikan kinerja dan semua metode yang direncanakan terlaksana dan mencapai target meskipun kondisi pandemi Covid-19.

Pada tahun 2021 dibentuk Tim Perumus Materi dan Metodelogi Badan Sosialisasi yang bertugas untuk mengevaluasi dan merumuskan metode

Sosialisasi 4 (Empat) Pilar. Untuk melaksanakan tugas Tim Perumus, disusun beberapa target yang disusun sebagai acuan dalam membuat metode dan materi baru Sosialisasi 4 Pilar MPR RI. Hal-hal yang disepakati sebagai berikut:

1. Menyepakati kegiatan sosialisasi dengan metode pergelaran budaya dengan menggunakan sistem campuran (*hybrid*) yaitu webinar dan fisik dilaksanakan pada saat bersamaan; dan
2. Membuat komik animasi dengan target sasaran usia dini atau remaja.

Tim Perumus Materi dan Metodelogi Badan Sosialisasi merupakan salah satu upaya perbaikan kinerja dan bertujuan:

1. Mengevaluasi metode Sosialisasi 4 Pilar MPR RI;
2. Melakukan pembaharuan metode agar metode Sosialisasi 4 Pilar MPR RI sesuai dengan sasaran yang hendak dicapai dengan memperhatikan berbagai macam kondisi demografi masyarakat Indonesia; dan
3. Melakukan penyesuaian mekanisme pelaksanaan kegiatan (*standard operating procedure* – SOP) agar tetap efektif dan tepat sasaran mengingat kondisi pandemi Covid-19.

Meskipun pandemi COVID-19, Sosialisasi 4 Pilar MPR RI perlu terus dilaksanakan demi kuatnya bangsa Indonesia dalam menghadapi segala macam ancaman berbangsa dan bernegara. Karena itu metode Sosialisasi 4 Pilar MPR RI akan terus dievaluasi dan diperbarui agar selalu mengalami peningkatan dan perbaikan.

3.2.6 Rasio Tindak Lanjut Aspirasi Masyarakat Terhadap Total Aspirasi Masyarakat

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD Pasal 5 menyebutkan bahwa salah satu tugas MPR yaitu: "Menyerap aspirasi masyarakat berkaitan dengan pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945". Penyerapan aspirasi masyarakat dikoordinasikan oleh Badan Pengkajian MPR dengan bentuk kegiatan konsultasi maupun pertemuan dengan masyarakat yang secara khusus dilakukan untuk menyerap aspirasi. Kegiatan tersebut dilaksanakan dengan tujuan untuk mendapatkan bahan masukan dan gagasan yang berkembang di berbagai kelompok masyarakat.

Gambar 3.14 Rapat Kerja Biro Pengkajian dan Konstitusi Tahun 2021

Keputusan MPR Nomor 8 Tahun 2019 antara lain merekomendasikan kepada MPR masa jabatan 2019-2024 untuk mengkaji substansi dan bentuk hukum Pokok-Pokok Haluan Negara. Berdasarkan rekomendasi tersebut, tahun 2021 penyerapan aspirasi masyarakat difokuskan pada kajian substansi/materi Pokok-Pokok Haluan Negara.

Gambar 3.15 Penyerapan Aspirasi Masyarakat Oleh Badan Pengkajian Tahun 2021

Mekanisme pelaksanaan kegiatan penyerapan aspirasi masyarakat oleh Pimpinan dan Anggota MPR ini didelegasikan dan dikoordinasikan oleh Badan Pengkajian MPR dengan bentuk kegiatan konsultasi maupun pertemuan dengan masyarakat yang secara khusus dilakukan untuk menyerap aspirasi. Kegiatan tersebut dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan bahan-bahan masukan dan gagasan yang penting bagi kajian substansi/materi Pokok-Pokok Haluan Negara oleh Badan Pengkajian selaku Alat Kelengkapan di dalam melaksanakan tugasnya.

Indikator **Rasio Tindak Lanjut Aspirasi Masyarakat Terhadap Total Aspirasi Masyarakat** adalah indikator yang menunjukkan keberhasilan Setjen MPR dan Badan Pengkajian MPR dalam menjaring dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat. Inidikator ini didukung oleh kegiatan Pengkajian Kemajelisan dengan kategori target *maximize* dan. Indikator ini dihitung dengan cara: mengidentifikasi aspirasi masyarakat yang masuk sepanjang tahun 2021, melakukan analisis pola untuk mengetahui substansi dari aspirasi, menginventarisir terhadap hasil analisis pola aspirasi masyarakat, kemudian menghitung jumlah klasifikasi kegiatan asmas yang dilakukan dan dibandingkan dengan jumlah klasifikasi kegiatan asmas yang ditindaklanjuti. Grafik 3.11 di bawah ini adalah target dan capaian dari indikator Rasio Tindak Lanjut Aspirasi Masyarakat Terhadap Total Aspirasi Masyarakat.

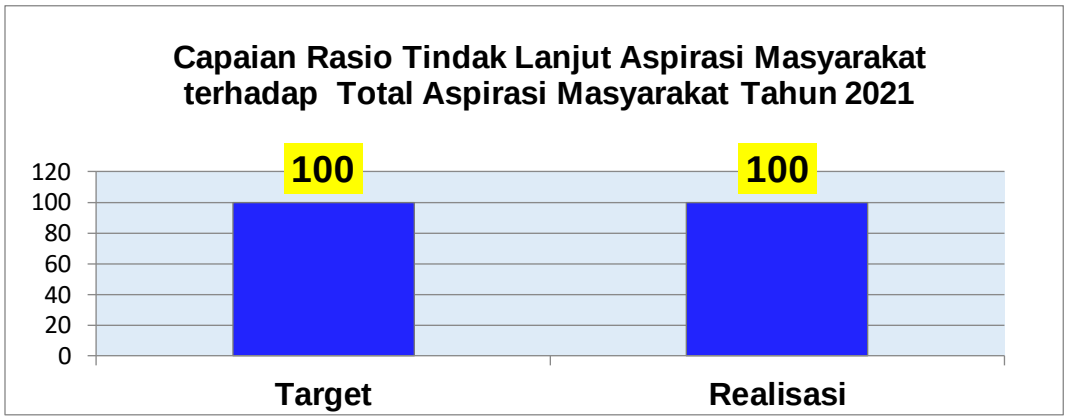

Grafik 3.11 Capaian Rasio Tindak Lanjut Aspirasi Masyarakat Terhadap Total Aspirasi Masyarakat Tahun 2021

Berdasarkan grafik 3.11, target indikator Rasio Tindak Lanjut Aspirasi Masyarakat Terhadap Total Aspirasi Masyarakat adalah 100% dengan capaian 100%. Capaian tersebut diartikan bahwa seluruh aspirasi masyarakat yang masuk sepanjang tahun 2021 seluruhnya ditindaklanjuti oleh Biro Pengkajian Konstitusi untuk bahan masukan kepada Badan Pengkajian MPR yang kemudian aspirasi masyarakat tersebut diklasterkan berdasarakan ke beberapa bidang untuk dijadikan kajian substansi dan bentuk hukum Pokok-Pokok Haluan Negara. Fokus kajian substansi/materi Pokok-Pokok Haluan Negara terbagi menjadi 7 (tujuh bidang). Adapun bidang tersebut adalah:

1. Bidang Agama
2. Bidang Ekonomi
3. Bidang Ideologi
4. Bidang Politik
5. Bidang Sosial Budaya

6. Bidang Hukum
7. Bidang Pertahanan dan Keamanan

Aspirasi masyarakat yang sudah terhimpun selanjutnya diolah dan diformulasi sehingga menjadi informasi sebagai bahan masukan untuk Badan Pengkajian MPR. Grafik 3.12 berikut adalah gambaran penyerapan aspirasi masyarakat terkait Pokok-Pokok Haluan Negara berbagai bidang pada tahun 2021:

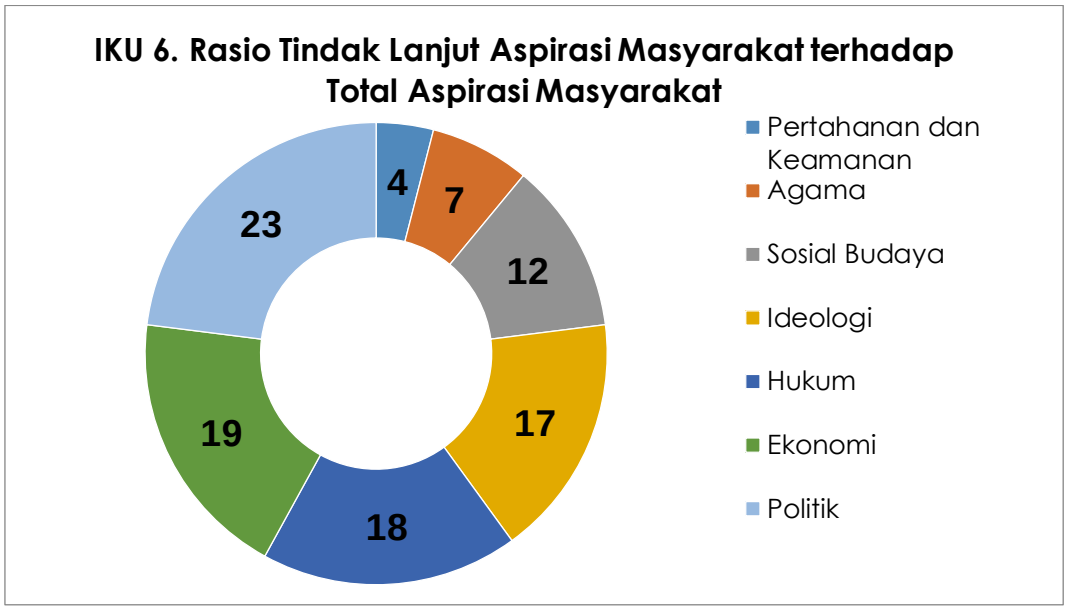

Grafik 3.12 Rasio Tindak Lanjut Aspirasi Masyarakat terhadap Total Aspirasi Masyarakat

Berdasarkan pada grafik diatas presentase aspirasi masyarakat terkait pokok-pokok haluan negara bidang politik sebesar 23%, bidang ekonomi 19%, bidang hukum 18%, bidang ideologi 17%, bidang sosial budaya 12%, bidang agama 7%, dan bidang pertahanan dan keamanan 4%. Secara umum aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat di berbagai bidang adalah sebagai berikut:

1. **Dibidang politik** masyarakat mengharapkan agar penataan sistem politik dan skema demokrasi dapat dilakukan secara menyeluruh khususnya atas format pemilu. Sistem demokrasi perlu diperjuangkan bukan semata-mata demi terpenuhinya aspek keterwakilan, lebih dari itu, sistem demokrasi harusnya meniscayakan hadirnya pemerintah dan para wakil rakyat yang bertanggung jawab dalam mengemban mandat politik yang diberikan rakyat. Artinya, tolak ukur keberhasilan sistem demokrasi tidak sekadar terletak pada terpenuhinya segenap prosedural elektoral, melainkan lebih pada kualitas akuntabilitas pemerintah dan wakil rakyat terpilih yang tercermin dalam kemampuan mereka mewujudkan cita-cita keadilan, keberadaban, dan kesejahteraan bagi segenap unsur bangsa. Oleh karena itu, terkait bidang politik penataan/perbaikan yang harus dilakukan antara lain:

- Penataan Sistem Pemerintahan
- Penataan Sistem Perwakilan
- Penataan Pemilu dan Kepartaian
- Penataan Politik Hukum

2. **Dibidang ekonomi** masyarakat mengharapkan terwujudnya kemandirian ekonomi yang bertumpu pada kemampuan serta potensi bangsa dan negara, meningkatnya pertumbuhan dan pemerataan pendapatan, terciptanya struktur ekonomi yang berkeadilan dan berpihak kepada ekonomi rakyat, hilangnya ketimpangan pembangunan nasional; serta diharapkan Pemerintah mampu memantapkan persiapan dalam mengarungi era baru ekonomi yang berporos pada digitalisasi;
3. **Dibidang hukum** masyarakat mengharapkan terwujudnya sistem hukum nasional yang berintikan kebenaran dan keadilan, serta terciptanya kehidupan masyarakat yang adil dan demokratis yang bersumber pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta terwujudnya penyelenggara negara yang bebas korupsi melalui perbaikan sistem di semua lini layanan publik, penguatan integritas penegak hukum, penyelenggara negara, serta penguatan sistem pencegahan korupsi;
4. **Dibidang ideologi** masyarakat berbicara mengenai internalisasi nilai-nilai Pancasila yang harus dijadikan sebagai pandangan hidup karena sangat berperan penting dalam aspek kehidupan masyarakat negara Indonesia yang sangat majemuk. Nilai-nilai luhur Pancasila merupakan intisari dari tatanan sosial masyarakat, suku bangsa, adat istiadat dan budaya yang ada di seluruh pelosok kepulauan Nusantara. Hal tersebut seharusnya bisa menjadi suatu fondasi untuk mencapai kemakmuran bangsa. Selain itu perlu pemantapan peran Pancasila sebagai ideologi terbuka yang dapat menyesuaikan diri menghadapi berbagai perkembangan zaman tanpa mengubah nilai fundamental;
5. **Dibidang sosial budaya** masyarakat mengharapkan adanya peningkatan taraf pendidikan rakyat, pemenuhan akses pendidikan yang inklusif dan berkualitas setara terhadap seluruh tingkatan pendidikan formal dan seluruh jenis pendidikan non-formal, terciptanya komunitas yang tangguh damai dengan cara mengatasi kemiskinan absolut, terciptanya lapangan kerja yang layak, optimalisasi partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, serta pengelolaan sumber daya alam secara bijaksana;
6. **Dibidang agama** masyarakat mengharapkan Negara dapat memfasilitasi masyarakat untuk mengembangkan etika ketuhanan

dan spiritualitas yang inklusif dalam kehidupan publik dengan menjaga integritas dalam keutuhan kebersihan pikiran, perkataan dan perbuatan, mengembangkan sikap saling menghormati pilihan agama dan kepercayaan, menjamin kebebasan menjalankan ibadah menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Negara juga diharapkan dapat memantapkan fungsi dan peran agama sebagai landasan basis etis dan etos, moral dan etika dalam seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara guna mencapai kemajuan dalam pembangunan; dan

7. **Dibidang pertahanan** dan keamanan masyarakat mengharapkan terjaminnya keamanan akan akses dan ketersediaan ekonomi, pangan, kesehatan, lingkungan, personal, komunal dan politik, serta aparatur keamanan dan instrumen terkait lainnya, yang terpadu dan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia. Pertahanan dan keamanan perlu terus ditingkatkan guna menghadapi berbagai ancaman militer, nonmiliter, dan hibrida sehingga dapat melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia.

3.2.7 Indeks Kepuasan MPR RI Terhadap Dukungan Administrasi

Setjen MPR memiliki 2 (dua) tugas utama pelaksanaan dukungan terhadap Pimpinan dan Alat Kelengkapan MPR sebagai *stakeholder* utama Setjen MPR, yaitu: dukungan bidang pengkajian dan pemasyarakatan konstitusi, serta penyerapan aspirasi masyarakat, dan dukungan bidang administrasi kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.

Gambar 3.16 Pelaksanaan Apel Setiap Hari Senin

Indikator **Indeks Kepuasan MPR RI Terhadap Dukungan Administrasi** adalah indikator yang digunakan untuk mengukur kualitas dan peningkatan akan layanan Setjen MPR yang diberikan kepada Pimpinan dan Alat Kelengkapan MPR RI terkait dukungan bidang administrasi sepanjang tahun 2021. Indikator Indeks Kepuasan MPR RI terhadap Dukungan Adminsitrasi diukur dengan survei kepada Pimpinan dan Alat Kelengkapan MPR RI yang diberikan oleh Setjen MPR di tahun 2021. Dukungan Administrasi yang dimaksud adalah: dukungan administrasi Pelaksanaan Tugas Pimpinan MPR, dukungan administrasi Pelaksanaan Tugas Konstitusional MPR RI, dukungan administrasi Pengelolaan Administrasi Keuangan MPR, dan dukungan administrasi Penganggaran MPR. Diukur dalam skala likert 1 sampai 4, yaitu; skala 1 – tidak baik, skala 2 – kurang baik, skala 3 - baik, dan skala 4 – sangat baik. Indikator ini termasuk kategori target *maximize*.

Tabel 3.12 Hasil Survei Indeks Kepuasan MPR RI Terhadap Dukungan Administrasi Tahun 2021

NO	KEGIATAN	HASIL SURVEI KEPUASAN
1.	Pelaksanaan Tugas Pimpinan MPR	3.64
2.	Pelaksanaan Tugas Konstitusional MPR RI	3.23
3.	Pengelolaan Administrasi Keuangan Sekretariat Jenderal	3.24
4.	Penganggaran MPR	3.65
Total		13.76
Tingkat Pemenuhan Layanan Internal Sekretariat Jenderal MPR RI		**3.44**

Dari tabel 3.12, Indeks Kepuasan MPR RI Terhadap Dukungan Adminstrasi tahun 2021 didukung oleh 4 (empat) kegiatan yang bertugas memberikan pelayanan kepada Pimpinan dan Alat Kelengkapan MPR. Tabel 3.13 berikut menjelaskan unit Eselon 2 sebagai penanggung jawab dan responden survei/ *stakeholder* yang dilayani.

Tabel 3.13 Kegiatan, Unit Penanggung Jawab dan Responden Survei Indeks Kepuasan MPR RI Terhadap Dukungan Adminstrasi Tahun 2021

NO	KEGIATAN	UNIT PENANGGUNG JAWAB	RESPONDEN SURVEI/ *STAKEHOLDER*
1.	Pelaksanaan Tugas Pimpinan MPR	Biro Sekretariat Pimpinan	Pimpinan MPR
2.	Pelaksanaan Tugas Konstitusional MPR RI	Biro Persidangan dan Pemasyarakatan Konstitusi	Pimpinan, Alat Kelengkapan, dan Anggota MPR
3.	Pengelolaan Administrasi Keuangan MPR	Biro Perencanaan dan Keuangan	Pimpinan, Alat Kelengkapan, dan Anggota MPR
4.	Penganggaran MPR	Biro Persidangan dan Pemasyarakatan Konstitusi	Badan Penganggaran

Untuk menentukan nilai Indeks Kepuasan MPR RI Terhadap Dukungan Adminstrasi dapat di lihat dalam tabel berikut;

Tabel 3.14 Nilai Persepsi, Interval IKM, Interval Konversi IKM dan Kinerja Unit Pelayanan

Nilai Persepsi	Nilai Interval	Nilai Internal Konversi (NIK)	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
1	1.00 – 2.5996	25.00 – 64.99	D	Tidak Baik
2	2.60 – 3.064	65.00 – 76.60	C	Kurang Baik
3	3.0644 – 3.532	76.61 – 88.30	B	Baik
4	3.5324 – 4.00	88.31 – 100.00	A	Sangat Baik

Berdasarkan tabel 3.14, nilai indeks sebesar 3.44 masuk kedalam kategori nilai persepsi "3" karena berada diantara interval 3.0644 – 3.532. Berdasarkan kedua nilai tersebut, dapat dikatakan mutu pelayanan Indeks Kepuasan MPR RI Terhadap Dukungan Adminstrasi masuk kategori "B", sementara kinerja unit layanan masuk dalam kategori **"Baik".** Capaian kinerja Indeks Kepuasan MPR RI Terhadap Dukungan Adminstrasi tahun 2021 dapat dilihat pada grafik 3.13 di bawah ini.

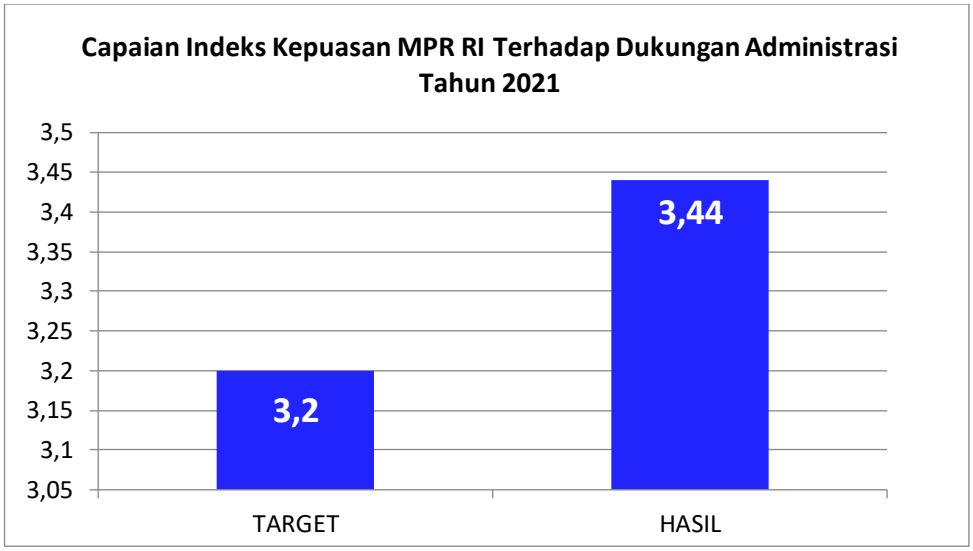

Grafik 3.13 Capaian Indeks Kepuasan MPR RI Terhadap Dukungan Administrasi Tahun 2021

Dari grafik 3.13 di atas dapat dilihat bahwa di tahun 2021, target untuk indikator Indeks Kepuasan MPR RI Terhadap Dukungan Adminstrasi adalah **3.2** dengan realisasi **3.44** atau capaian sebesar **107.50%,** atau capaian kinerja melampaui yang telah ditargetkan. Berikut adalah jenis layanan yang diberikan Setjen MPR kepada MPR RI sesuai dengan kegiatan, unit penanggung jawab dan *stakeholder* yang diberikan layanan.

Pelaksanaan Tugas Pimpinan MPR / Biro Sekretariat Pimpinan:

a. Layanan penyiapan perumusan kebijakan dan pelaksanaan penyusunan Informasi kegiatan Ketua dan Wakil Ketua MPR, bahan naskah sambutan/pidato Ketua dan Wakil Ketua MPR dan pengelolaan materi bidang tugas Pimpinan MPR;
b. Layanan penyiapan perumusan kebijakan dan pelaksanaan keprotokolan Pimpinan MPR dan Pimpinan Sekretariat Jenderal;
c. Layanan penyiapan perumusan kebijakan dan pelaksanaan penyusunan acara dan pengacaraan kegiatan Pimpinan MPR, pelaksanaan penyiapan dokumen perjalanan dinas luar negeri bagi Pimpinan MPR, Anggota MPR, dan Sekretariat Jenderal, pelaksanaan penyiapan teknis kegiatan upacara MPR dan Sekretariat Jenderal; dan
d. Layanan penyiapan perumusan kebijakan dan pelaksanaan alih bahasa, pengaturan tamu dan delegasi Pimpinan dan Sekretariat Jenderal;

Gambar 3.17 Temu Tokoh Nasional

Pelaksanaan Tugas Konstitusional MPR RI / Biro Persidangan dan Pemasyarakatan Konstitusi:

a. Layanan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran terkait Persidangan, Risalah, dan Musyawarah Pimpinan;
b. Layanan penyiapan perumusan kebijakan dan pelaksanaan dukungan penyusunan materi dan panduan sidang paripurna MPR, dan rapat Panitia *Ad Hoc*; dan
c. Layanan penyiapan perumusan kebijakan dan pelaksanaan dukungan penyusunan risalah sidang paripurna MPR, rapat panitia *Ad Hoc*, rapat Badan-Badan dan rapat Komisi Kajian Ketatanegaraan, serta rapat Pimpinan MPR, rapat gabungan, rapat Fraksi dan Kelompok Anggota, rapat konsultasi dan koordinasi pimpinan dengan Presiden dan/atau pimpinan lembaga negara lainnya.

Pengelolaan Administrasi Keuangan MPR / Biro Perencanaan dan Keuangan:

a. Layanan perumusan kebijakan dan pelaksanaan perencanaan anggaran dan program kegiatan MPR; dan
b. Layanan perumusan kebijakan dan pelaksanaan administrasi gaji, tunjangan, perjalanan dinas MPR.

Penganggaran MPR / Biro Persidangan dan Pemasyarakatan:

a. Layanan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Badan Penganggaran, Fraksi dan Kelompok Dewan Perwakilan Daerah;
b. Layanan penyiapan perumusan kebijakan dan pelaksanaan penyusunan materi kegiatan yang dilakukan oleh Badan Penganggaran, pengelolaan kerja sama dengan mitra Badan Penganggaran, serta penyusunan materi rapat Badan Penganggaran; dan
c. Layanan penyiapan perumusan kebijakan dan pelaksanaan urusan tata usaha, rumah tangga dan kesekretariatan Badan Penganggaran, penyusunan bahan rapat, dukungan teknis kegiatan rapat, dan penyusunan catatan rapat Badan Penganggaran.

3.2.8 Nilai Komponen Pengungkit Reformasi Birokrasi Setjen MPR RI

Indikator Nilai Komponen Pengungkit Reformasi Birokrasi Setjen MPR adalah indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan 8 (delapan) komponen pengungkit Reformasi Birokrasi Setjen MPR. Penilaian komponen pengungkit terdiri dari: Pemenuhan, Hasil Antara Area Perubahan, dan Reform. Indikator ini termasuk kategori target *maximize*. Indikator ini didukung oleh kegiatan: Pengelolaan Administrasi MPR dan Sekretariat Jenderal, Pengelolaan Administrasi Publikasi, Pengelolaan Administrasi Keuangan Sekretariat Jenderal, Pengelolaan Administrasi Sarana dan Prasarana Kantor, dan Layanan Inspektorat.

Hingga Laporan Kinerja Setjen MPR ini diselesaikan, hasil evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi Setjen MPR dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KEMENPAN RB), belum dirilis. Oleh karena itu, perhitungan indikator Nilai Komponen Pengungkit Reformasi Birokrasi Setjen MPR bersumber dari nilai komponen pengungkit Reformasi Birokrasi Setjen MPR tahun 2020. Tabel 3.15 berikut adalah hasil evaluasi komponen pengungkit pelaksanaan Reformasi Birokrasi Setjen MPR Tahun 2020 dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Tabel 3.15 Hasil Evaluasi Komponen Pengungkit Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2020

No.	Komponen Penilaian	Bobot	2020
A.	Komponen Pengungkit		
	Pemenuhan	20.00	16.61
	Hasil Antara Area Perubahan	10.00	5.60
	Reform	30.00	18.44
Total Komponen Pengungkit		**60.00**	**40.65**

Grafik 3.14 di bawah ini adalah perbandingan antara target dan Nilai Komponen Pengungkit Reformasi Birokrasi Setjen MPR tahun 2021.

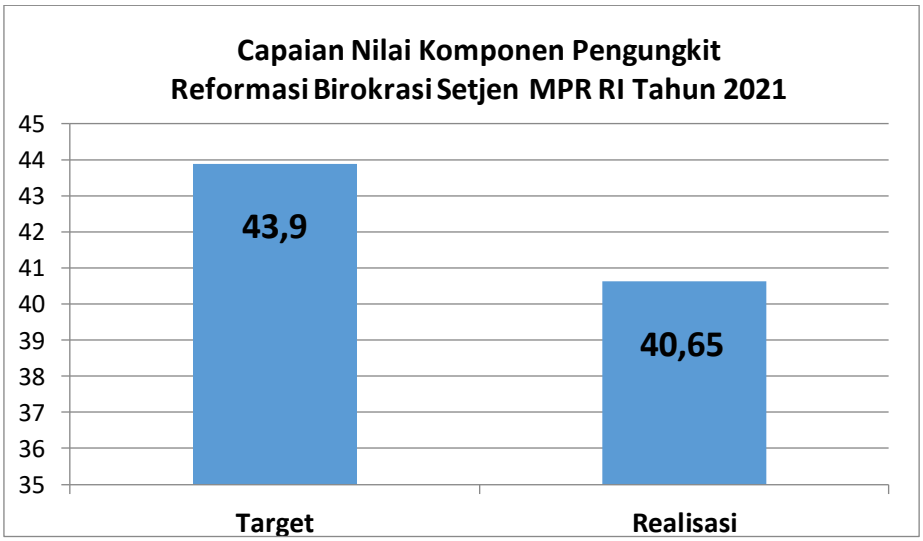

Grafik 3.14. Capaian Nilai Komponen Pengungkit Reformasi Birokrasi Setjen MPR RI Tahun 2021

Dari grafik 3.14 di atas dapat dilihat bahwa di tahun 2021, target untuk indikator Nilai Komponen Pengungkit Reformasi Birokrasi Setjen MPR adalah 43.9 dengan realisasi 40.65 atau capaian sebesar 92.59%, tidak mencapai hasil yang telah ditargetkan. Berikut adalah Nilai Komponen Pengungkit Reformasi Birokrasi Setjen MPR dari tahun 2015 – 2021, dapat dilihat pada grafik 3.15 berikut ini.

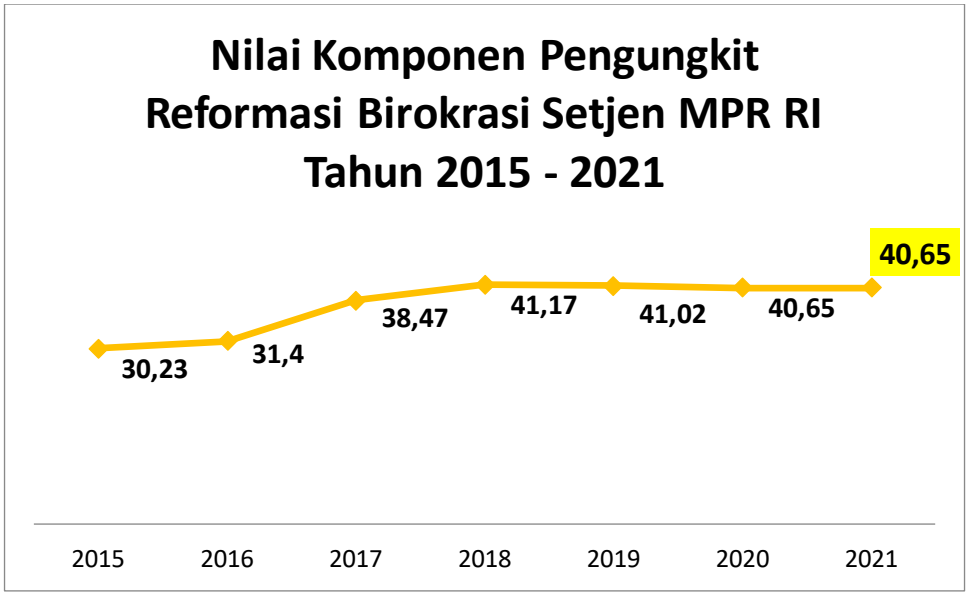

Grafik 3.15. Nilai Komponen Pengungkit Reformasi Birokrasi Setjen MPR RI Tahun 2015 - 2021

Dapat dilihat dari grafik 3.15, bahwa Nilai Komponen Pengungkit Reformasi Birokrasi Setjen MPR RI menglami penurunan dari tahun 2018 – 2021. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KEMENPAN RB) memberikan hal-hal yang masih harus diperhatikan untuk mengoptimalkan program reformasi birokrasi di Setjen MPR. Hal ini tertuang dalam Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/87/M.RB.06/2021 tanggal 31 Maret 2021, dengan poin-poin sebagai berikut:

a. Roadmap Reformasi Birokrasi Setjen MPR RI masih belum diformalkan sehingga setiap Deputi belum bisa menyusun rencana kerja reformasi birokrasi juga;
b. Pelaksanaan reformasi birokrasi di Setjen MPR RI belum dilaksanakan secara terpadu oleh kelompok kerja (Pokja) yang ada di pusat dan unit kerja. Pengisian PMPRB hanya dilaksanakan oleh im reformasi birokrasi pusat;
c. Tindak Lanjut atas Surat Edaran dan Konkrit Penyederhanaan Birokrasi dan Peraturan Menteri PANRB Nomor 28 Tahun 2019 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke delam Jabatan Fungsional belum dilaksanakan secara menyeluruh;
d. Peta proses bisnis Setjen MPR RI telah disusun dan diturunkan menjadi SOP, namun proses bisnis ini masih berdasarkan pada struktur organisasi sebelumnya. Selain itu, penerapan *e-government* secara terintegrasi masih terus berproses sehingga belum terlalu

signifikan mengungkit perbaikan pada layanan, baik layanan internal maupun eksternal;

e. Belum optimalnya pelaksanaan *merit system* antara lain mengenai tindak lanjut hasil asesmen sebagai dasar pengembangan karir individu berbasis kompetensi, penyusunan perencanaan pengembangan pegawai atau *Human Capital Development Plan* (HCDP) belum menyeluruh dan belum adanya pemetaan talenta sebagai dasar penempatan jabatan kritikal/suksesi;

f. Belum adanya penyelarasan indikator kinerja dari level orgnisasi sampai dengan level individu, sehingga masih terdapat kegiatan yang dilakukan oleh pegawai belum berkontribusi secara langsung terhadap kinerja level di atasnya. Di samping itu, hasil survei internal organisasi menunjukkan masih cukup banyak pegawai yang belum memahami kontribusi kinerjanya pada organisasi;

g. Pembangunan Zona Integritas pada tahun 2020 belum berhasil mewujudkan unit kerja yang memperoleh predikat Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dari satu unit kerja yang diajukan.

Dengan hal-hal yang masih harus diperhatikan di atas, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KEMENPAN RB) memberikan evaluasi atas pelaksanaan program dan kegiatan reformasi birokrasi yang dilaksanakan di Setjen MPR. Dari evaluasi tersebut, Setjen MPR kemudian menyusun rencana aksi perbaikan di tahun 2021, dijelaskan di tabel 3.16 berikut:

Tabel 3.16 Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Tahun 2021

NO	CATATAN HASIL EVALUASI REFORMASI BIROKRASI	AREA PERUBAHAN	RENCANA AKSI TINDAK LANJUT
1.	Menyelesaikan *Roadmap* Reformasi Birokrasi Sekretariat Jenderal MPR Tahun 2020-2024 untuk selanjutnya setiap Deputi menindaklanjuti dengan menyusun rencana kerja Reformasi Birokrasi.	Manajemen Perubahan	Penyusunan rencana kerja Reformasi Birokrasi Deputi Bidang Administrasi dan Deputi Bidang Pengkajian dan Pemasyarakatan Konstitusi.
			Rapat koordinasi kelompok kerja Reformasi Birokrasi pada level unit (Deputi

NO	CATATAN HASIL EVALUASI REFORMASI BIROKRASI	AREA PERUBAHAN	RENCANA AKSI TINDAK LANJUT
			Bidang Administrasi dan Deputi Bidang Pengkajian dan Pemasyarakatan Konstitusi).
			Pengumpulan data rencana kerja dari masing-masing pokja Reformasi Birokrasi masing-masing unit (Deputi Bidang Administrasi dan Deputi Bidang Pengkajian dan Pemasyarakatan Konstitusi).
2.	Melaksanakan Reformasi Birokrasi sampai pada unit kerja terkecil, tidak hanya di tim Reformasi Birokrasi pusat saja. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi rencana aksi Reformasi Birokrasi juga diperlukan untuk memantau sejauh mana Reformasi Birokrasi sudah berjalan.	Manajemen Perubahan	Pembentukan tim Reformasi Birokrasi level unit (Deputi Bidang Administrasi dan Deputi Bidang Pengkajian dan Pemasyarakatan Konstitusi) yang melibatkan semua pegawai di lingkungan Setjen MPR.
			Melakukan survei tahunan kepada seluruh pegawai untuk mengukur kedalaman pelaksanaan Reformasi Birokrasi
			Melakukan sosialisasi program Reformasi Birokrasi kepada seluruh pegawai dan

NO	CATATAN HASIL EVALUASI REFORMASI BIROKRASI	AREA PERUBAHAN	RENCANA AKSI TINDAK LANJUT
			stakeholder melalui media komunikasi secara konsisten.
			Rapat koordinasi kelompok kerja Reformasi Birokrasi pada level pusat dan unit (Deputi Bidang Administrasi dan Deputi Bidang Pengkajian dan Pemasyarakatan Konstitusi).
			Penyusunan laporan pelaksanaan Reformasi Birokrasi berdasarkan laporan masing-masing pokja tim Reformasi Birokrasi level pusat dan level unit.
3.	Mengoptimalkan fungsi Tim Reformasi Birokrasi, asesor, dan Tim Penilai Internal dalam melakukan pemantauan dan evaluasi implementasi Reformasi Birokrasi, serta memastikan hasil pemantauan dan evaluasi tersebut dapat ditindaklanjuti secara maksimal dan tercipta perbaikan berkelanjutan.	Manajemen Perubahan	Pemilihan dan penetapan anggota Tim Reformasi Birokrasi, Asesor, dan Tim Penilai Internal yang memiliki integritas, keahlian dan kompetensi yang memadai.
			Meningkatkan kompetensi para anggota Tim Reformasi Birokrasi, asesor, dan Tim Penilai Internal melalui pendidikan dan latihan di bidang pengawasan,

NO	CATATAN HASIL EVALUASI REFORMASI BIROKRASI	AREA PERUBAHAN	RENCANA AKSI TINDAK LANJUT
			benchmarking serta *focus group discussion* ke K/L yang menjadi percontohan pelaksanaan RB ataupun yang memiliki karakteristik instansi yang sama.
4.	Sinkronisasi deregulasi kebijakan dan pengelolaan JDIH (Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum).	Deregulasi Peraturan Perundang-undangan	Harmonisasi peraturan perundang-undangan. Memperbaiki laman JDIH MPR RI sehingga dapat diakses oleh publik. Prioritas penyusunan produk hukum.
5.	Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 382 s.d. 393 Tahun 2019 tentang Langkah Strategi dan Konkrit Penyederhanaan Birokrasi dan Peraturan Menteri PANRB Nomor 28 Tahun 2019 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional.	Penataan Organisasi	Identifikasi dan pemetaan unit-unit kerja yang akan disederhanakan dan jabatan struktural yang akan dialihkan.
			Penyusunan ringkasan eksekutif dan konsep usulan penyederhanaan organisasi dan pengalihan jabatan struktural.
6.	Melakukan reviu dan penyempurnaan peta proses bisnis sesuai dengan struktur organisasi yang terbaru sehingga peta proses bisnis yang ada dapat digunakan untuk memaksimalkan pencapaian kinerja.	Penataan Tata Laksana	Penyusunan Peta Proses Bisnis dan Penyempurnaan SOP sesuai dengan struktur organisasi terbaru.

NO	CATATAN HASIL EVALUASI REFORMASI BIROKRASI	AREA PERUBAHAN	RENCANA AKSI TINDAK LANJUT
7.	Melakukan optimalisasi penerapan *e-govemment* yang terintegrasi dengan menyusun perencanaan pengembangan SPBE dengan baik dan melakukan pemantauan serta evaluasi secara berkala.	Penataan Tata Laksana	Penetapan *Master Plan* IT Sekretariat Jenderal MPR RI Tahun 2020-2023.
			Penyusunan *Blue Print* Peta Jaringan *Local Area Network*.
			Pembuatan dan pengembangan integrasi aplikasi penunjang kinerja.
8.	Mempercepat terlaksananya sistem merit dengan menerapkan seluruh ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri PANRB Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Merit dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara.	Manajemen SDM	Penyusunan *Human Capital Development Program* dan Pola Karir.
9.	Menyempurnakan ukuran kinerja organisasi sampai dengan individu sehingga lebih berorientasi hasil.	Akuntabilitas	Penyusunan pengukuran kinerja terhadap indikator keberhasilan pada level Eselon 1, Eselon 2, Eselon 3, Eselon 4, hingga individu pegawai.
			Pembuatan Aplikasi Penilaian Kinerja.
10.	Memperkuat implementasi kebijakan pengawasan internal,	Pengawasan	Menetapkan dan merevisi Peraturan Sekretaris Jenderal

NO	CATATAN HASIL EVALUASI REFORMASI BIROKRASI	AREA PERUBAHAN	RENCANA AKSI TINDAK LANJUT
	seperti penanganan gratifikasi, pengelolaan pengaduan masyarakat, *Whistle Blowing System*, dan kebijakan benturan kepentingan.		terkait pengawasan internal dan pengelolaaan pengaduan sesui dengan peraturan yang berlaku.
			Meningkatkan kompetensi pegawai unit pengawasan melalui penugasan keikutsertaan dalam pendidikan dan latihan di bidang pengawasan.
			Melakukan sosialisasi saluran pengaduan masyarakat pada kegiatan-kegiatan MPR dalam bentuk pamflet atau brosur.
11.	Memperkuat penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, dengan mendorong setiap unit kerja mampu mengidentifikasi dan melakukan pengendalian risiko yang melekat pada upaya pencapaian kinerja.	Pengawasan	Penyusunan dan penetapan pedoman pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah.
			Melakukan sosialisasi kepada seluruh pegawai dan pejabat di lingkungan Sekretariat Jenderal MPR tentang sistem pengendalian internal (gratifikasi, dsb) melalui pemasangan media

NO	CATATAN HASIL EVALUASI REFORMASI BIROKRASI	AREA PERUBAHAN	RENCANA AKSI TINDAK LANJUT
			komunikasi yang tersedia.
12.	Meningkatkan monitoring dan evaluasi terhadap unit kerja yang melakukan pembangunan Zona Integritas sehingga dapat menjadi pemicu percepatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Setjen MPR.	Pengawasan	Membentuk kelompok kerja / tim untuk mengidentifikasi unit kerja yang diusulkan.
13.	Menyusun Maklumat Pelayanan dan Standar Pelayanan dalam rangka mendorong penguatan pelayanan prima.	Pelayanan Publik	Menyusun Maklumat Pelayanan dan Standar Pelayanan untuk masing - masing Deputi.

Gambar 3.18 Rapat Kelompok Kerja RB Tahun 2021

Gambar 3.19 Rapat Kelompok Kerja RB Tahun 2021

3.2.9 Total Nilai Kriteria Hasil Reformasi Birokrasi Sekretariat Jenderal MPR RI

Indikator **Total Nilai Kriteria Hasil Reformasi Birokrasi Sekretariat Jenderal MPR RI** diambil dari Komponen Hasil Laporan Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi. Penilaian komponen hasil terdiri dari: Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan, Kualitas Pelayanan Publik, Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN, dan Kinerja Organisasi. Indikator ini termasuk kategori target *maximize*, dan didukung oleh kegiatan: Pengelolaan Administrasi MPR dan Sekretariat Jenderal (Kinerja Organisasi), Pengelolaan Administrasi Publikasi (Kualitas Pelayanan Publik), Pengelolaan Administrasi Keuangan Sekretariat Jenderal (Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan), dan Layanan Inspektorat (Indeks Persepsi Anti Korupsi).

Gambar 3.20 Rapat Kelompok Kerja RB Tahun 2021

Hingga Laporan Kinerja Setjen MPR ini diselesaikan, hasil evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi Setjen MPR dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KEMENPAN RB), belum dirilis. Oleh karena itu, perhitungan indikator Total Nilai Kriteria Hasil Reformasi Birokrasi Sekretariat Jenderal MPR RI bersumber dari nilai kriteria hasil Reformasi Birokrasi Setjen MPR tahun 2020. Tabel 3.17 berikut adalah hasil evaluasi kriteria hasil pelaksanaan Reformasi Birokrasi Setjen MPR Tahun 2020 dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Tabel 3.17 Hasil Evaluasi Kriteria Komponen Hasil Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2020

No.	Komponen Penilaian	Bobot	2020
B.	Komponen Hasil		
1.	Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	10.00	7.37
2.	Kualitas Pelayanan Publik	10.00	8.83
3.	Pemerintahan Yang Bersih dan Bebas KKN	10.00	9.18
4.	Kinerja Organisasi	10.00	6.04
Total Komponen Hasil		**40.00**	**31.41**

Berdasarkan Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/87/M.RB.06/2021 tanggal 31 Maret 2021, penjelasan terkait komponen hasil antara lain sebagai berikut:

a. Capaian akuntabilitas kinerja dan keuangan Setjen MPR RI tahun 2019 menunjukkan hasil yang cukup baik, namun masih perlu

perbaikan lebih lanjut, dengan nilai SAKIP 62.41 atau Predikat B dan akuntabilitas keuangan dengan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK;

b. Survei eksternal terhadap masyarakat yang telah mendapatkan pelayanan dari Setjen MPR RI menunjukkan hasil yang masih memerlukan peningkatan lebih lanjut, sebagaimana pada tabel 3.16 berikut:

Tabel 3.18 Hasil Survei Eksternal Setjen MPR Tahun 2021

No.	Hasil Survei	Indeks	
		2019	2020
1.	Survei Eksternal Kualitas Pelayanan	3.29	3.53
2.	Survei Eksternal Persepsi Korupsi	3.59	3.67

1. Hasil survei kualitas pelayanan tahun 2020 menunjukkan indeks 3.53 dari skala 4. Apabila dibandingkan survei tahun sebelumnya, terjadi peningkatan sebesar 0.24. Peningkatan hasil survei kualitas pelayanan ini mengindikasikan adanya kenaikan persepsi masyarakat dan *stakeholder* terhadap kepuasan pelayanan yang diberikan;
2. Hasil survei persepsi korupsi tahun 2020 yang merupakan gambaran atas integritas pemberi layanan, menunjukkan angka 3.67 dari skala 4. Apabila dibandingkan dengan hasil survei pada tahun sebelumnya yang menunjukkan hasil 3.59 maka terdapat peningkatan persepsi *stakeholder* terhadap pembangunan anti korupsi di Setjen MPR RI.

c. Hasil survei internal terhadap pegawai Setjen MPR RI atas integritas jabatan menunjukkan indeks 2.59 dari skala 5, dengan rincian sebagai berikut:

Sebanyak 16% responden memahami secara keseluruhan mengenai kinerja, ukuran, dan kontribusinya terhadap organisasi; kemudian 36% responden memahami kinerja dan ukuran atau kinerja dan kontribusinya terhadap organisasi; sebanyak 36% responden hanya memahami kinerja individunya saja; sedangkan sisanya terdapat 12% responden yang sama sekali tidak memahami kinerja individu, tidak memahami indikator kinerja individu, dan tidak memahami kontribusi kinerjanya terhadap kinerja organisasi.

Grafik 3.16 di bawah ini adalah perbandingan antara target dan Total Nilai Kriteria Hasil Reformasi Birokrasi Sekretariat Jenderal MPR RI tahun 2021.

Grafik 3.16 Capaian Total Nilai Kriteria Hasil Reformasi Birokrasi Sekretariat Jenderal MPR RI Tahun 2021

Dari grafik 3.16 di atas dapat dilihat bahwa di tahun 2021, target untuk Total Nilai Kriteria Hasil Reformasi Birokrasi Sekretariat Jenderal MPR RI adalah 32.95 dengan realisasi 31.42 atau capaian sebesar 96%, tidak mencapai hasil yang telah ditargetkan. Akan tetapi semenjak tahun 2016 – 2021, Total Nilai Kriteria Hasil Reformasi Birokrasi Sekretariat Jenderal MPR RI terus mengalami peningkatan, dapat dilihat pada grafik 3.17 berikut ini.

Grafik 3.17 Total Nilai Kriteria Hasil Reformasi Birokrasi Sekretariat Jenderal MPR RI Tahun 2015 – 2021

Dapat dilihat dari grafik 3.17 bahwa nilai kriteria hasil reformasi birokrasi Setjen MPR mengalami peningkatan dari tahun 2016-2021. Hal tersebut dikarenakan komitmen Setjen MPR terhadap peningkatan kegiatan Reformasi Birokrasi.

3.2.10 Tingkat Pemenuhan Layanan Internal Sekretariat Jenderal MPR RI

Indikator **Tingkat Pemenuhan Layanan Internal Sekretariat Jenderal MPR RI** adalah indikator yang digunakan sebagai pengukuran keberhasilan layanan internal kesekretariatan. Indikator Tingkat Pemenuhan Layanan Internal Sekretariat Jenderal MPR RI diambil dari hasil rekapitulasi layanan kesekretariatan berdasarkan RO (Rincian *Output*) tahun 2021. Indikator ini didukung oleh kegiatan: Pengelolaan Barang Milik Negara dan Sarana Prasarana Kantor, Pengelolaan Administrasi MPR dan Sekretariat Jenderal, dan Pengelolaan Administrasi Keuangan Sekretariat Jenderal. Indikator ini termasuk kategori target *maximize*.

Tabel 3.19 Rincian Output Kegiatan Pendukung Tingkat Pemenuhan Layanan Internal Sekretariat Jenderal MPR RI Tahun 2021

NO	KEGIATAN	TARGET	CAPAIAN
Tingkat Pemenuhan Layanan Internal Sekretariat Jenderal MPR RI			**100%**
Pengelolaan Barang Milik Negara dan Sarana Prasarana Kantor		**100%**	**100%**
1.	Layanan Perkantoran	100%	100%
2.	Layanan Umum	100%	100%
3.	Layanan Sarana Internal	100%	100%
4.	Layanan Prasarana Internal	100%	100%
Pengelolaan Administrasi MPR dan Sekretariat Jenderal		**100%**	**100%**
1.	Layanan Umum	100%	100%
2.	Layanan SDM	100%	100%
3.	Layanan Hukum	100%	100%
4.	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	100%	100%
5.	Layanan Data dan Informasi	100%	100%
Pengelolaan Administrasi Keuangan Sekretariat Jenderal		**100%**	**100%**
1.	Layanan Perkantoran	100%	100%
2.	Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal	100%	100%

NO	KEGIATAN	TARGET	CAPAIAN
3.	Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal	100%	100%
4.	Pengelolaan Keuangan dan Kinerja Internal	100%	100%

Berdasarkan tabel 3.19 di atas, kegiatan Pengelolaan Barang Milik Negara dan Sarana Prasarana Kantor didukung oleh 4 (empat) rincian *output*, Pengelolaan Administrasi MPR dan Sekretariat Jenderal didukung oleh 5 (lima) rincian *output*, dan Pengelolaan Administrasi Keuangan Sekretariat Jenderal didukung oleh 4 (empat) rincian *output*. Total terdapat 3 (tiga) kegiatan dan 14 (empat belas) rincian *output* yang mendukung keberhasilan indikator Tingkat Pemenuhan Layanan Internal Sekretariat Jenderal MPR RI. Berikut adalah grafik 3.18, capaian kinerja indikator Tingkat Pemenuhan Layanan Internal Sekretariat Jenderal MPR RI tahun 2021.

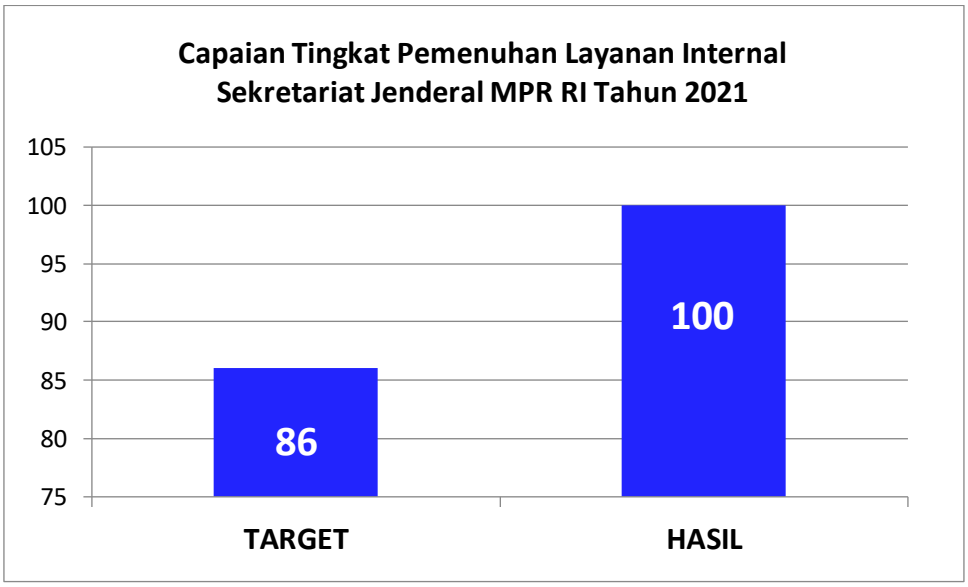

Grafik 3.18 Capaian Tingkat Pemenuhan Layanan Internal Sekretariat Jenderal MPR RI Tahun 2021

Berdasarkan grafik 3.18, dapat dilihat bahwa target Tingkat Pemenuhan Layanan Internal Sekretariat Jenderal MPR RI tahun 2021 adalah 86% dengan realisasi 100% atau capaian kinerja sebesar 116.28% atau melebihi yang telah ditargetkan.

3.3 Capaian Kinerja Anggaran

Capaian kinerja anggaran Setjen MPR berdasarkan tabel 1.1, diketahui bahwa pagu anggaran sebesar Rp.777.272.751.000,- terhadap serapan anggaran sebesar Rp.714.215.311.825,- atau serapan anggaran sebesar 91.89%. Dengan serapan anggaran 91.89%, Setjen MPR mencapai kinerja sebesar 103.30%. Capaian kinerja dalam 7 (tujuh) tahun terakhir, dapat dilihat pada grafik 3.19 berikut.

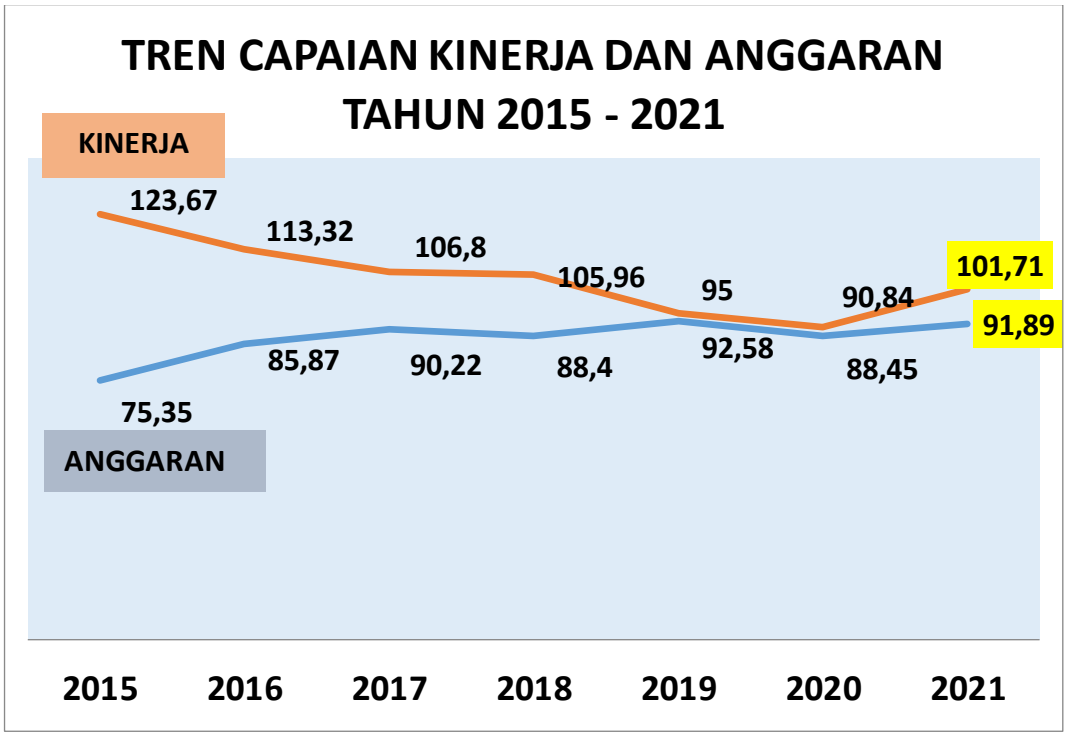

Grafik 3.19 Tren Capaian Kinerja dan Anggaran 2015 – 2021

Berdasarkan grafik 3.19, serapan anggaran Setjen MPR tahun 2021 sebesar **91.89%.** Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.02/2017 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga, kinerja anggaran sebesar **101.71%** masuk kategori **"sangat baik."**

BAB IV

Rencana Aksi dan Tindak Lanjut

Rencana aksi dan tindak lanjut tahun 2021 merupakan upaya perbaikan implementasi SAKIP tahun 2021. Rekomendasi rencana aksi dan tindak lanjut Laporan Kinerja 2021 bersumber dari analisa permasalahan terhadap 3 (tiga) Indikator yang tidak tercapai, yaitu:

1. Indeks Reformasi Birokrasi Setjen MPR RI;
2. Nilai Komponen Pengungkit Reformasi Birokrasi Setjen MPR RI; dan
3. Total Nilai Kriteria Hasil Reformasi Birokrasi Sekretariat Jenderal MPR RI.

Lebih detail mengenai rencana aksi tindak lanjut tahun 2021 dapat dilihat pada tabel 4.1.

Tabel 4.1 Rencana Aksi Tindak Lanjut Sekretariat Jenderal MPR 2021

NO.	RENCANA AKSI	WAKTU	UNIT PENANGGUNG JAWAB
1.	Segera menyelesaikan Roadmap Reformasi Birokrasi Sekretariat Jenderal	2022	Deputi Administrasi /

NO.	RENCANA AKSI	WAKTU	UNIT PENANGGUNG JAWAB
	MPR RI Tahun 2020 – 2024 untuk selanjutnya setiap Deputi menindaklanjuti dengan menyusun rencana kerja reformasi birokrasi.		Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Hukum / Tim Reformasi Birokrasi Tahun 2022
2.	Melaksanakan reformasi birokrasi sampai pada unit kerja terkecil, tidak hanya di Tim Reformasi Birokrasi Pusat saja. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi rencana aksi reformasi birokrasi juga diperlukan untuk memantau sejauh mana reformasi birokrasi sudah berjalan.	2022	Deputi Administrasi / Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Hukum / Tim Reformasi Birokrasi Tahun 2022
3.	Mengoptimalkan fungsi Tim Reformasi Birokrasi, Asesor, dan Tim Penilai Internal dalam melakukan pemantauan dan evaluasi implementasi reformasi birokrasi, serta memastikan hasil pemantauan dan evaluasi tersebut dapat ditindaklanjuti secara maksimal dan tercipta perbaikan berkelanjutan.	2022	Deputi Administrasi / Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Hukum / Tim Reformasi Birokrasi Tahun 2022
4.	Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 382 s.d. 393 Tahun 2019 tentang Langkah Strategis dan Konkrit Penyederhanaan Birokrasi dan Peraturan Menteri PANRB Nomor 28 Tahun 2019 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional. Hal tersebut merupakan bagian dari upaya mewujudkan birokrasi yang dinamis, lincah (*agile*), dan professional.	2022	Deputi Administrasi / Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Hukum / Tim Reformasi Birokrasi Tahun 2022

NO.	RENCANA AKSI	WAKTU	UNIT PENANGGUNG JAWAB
5.	Melakukan reviu dan penyempurnaan peta proses bisnis sesuai dengan struktur organisasi yang terbaru sehingga peta proses bisnis yang ada dapat digunakan untuk memaksimalkan pencapaian kinerja. Selanjutnya, perlu melakukan optimalisasi penerapan *e-government* yang terintegrasi dengan menyusun perencanaan pengembangan SPBE dengan baik dan melakukan pemantauan serta evaluasi secara berkala.	2022	Deputi Administrasi / Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Hukum / Tim Reformasi Birokrasi Tahun 2022
6.	Mempercepat terlaksananya sistem merit dengan menerapkan seluruh ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri PANRB Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Merit dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara.	2022	Deputi Administrasi / Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Hukum / Tim Reformasi Birokrasi Tahun 2022
7.	Menyempurnakan ukuran kinerja organisasi sampai dengan individu sehingga lebih berorientasi hasil. Selanjutnya melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja tersebut dan menggunakan hasilnya sebagai dasar dalam memberikan apresiasi/penghargaan ataupun sanksi bagi pegawai.	2022	Deputi Administrasi / Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Hukum / Biro Perencanaan dn Keuangan / Tim Reformasi Birokrasi Tahun 2022
8	Memperkuat implementasi kebijakan pengawasan internal, seperti penanganan gratifikasi, pengelolaan pengaduan masyarakat, *Whistle Blowing System*, dan kebijakan benturan kepentingan. Selain itu juga	2022	Deputi Administrasi / Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Hukum /

NO.	RENCANA AKSI	WAKTU	UNIT PENANGGUNG JAWAB
	memperkuat penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, dengan mendorong setiap unit kerja mampu mengidentifikasi dan melakukan pengendalian risiko yang melekat pada upaya pencapaian kinerja.		Tim Reformasi Birokrasi Tahun 2022
9.	Meningkatkan monitoring dan evaluasi terhadap unit kerja yang melakukan pembangunan Zona Integritas sehingga dapat menjadi pemicu percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi di Setjen MPR RI.	2022	Deputi Administrasi / Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Hukum / Inspektorat / Tim Reformasi Birokrasi Tahun 2022

Sesuai dengan perubahan SOTK Setjen MPR, reformasi birokrasi memiliki leading sector yaitu Subbagian Fasilitasi Reformasi Birokrasi yang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan dukungan di bidang fasilitasi reformasi birokrasi di lingkungan Setjen MPR. Karena itu segala kegiatan reformasi birokrasi difasilitasi oleh subbagian tersebut dengan dibantu oleh Tim Reformasi Birokrasi yang terbagi menjadi 2 (dua) level: level pusat dan level unit. Level pusat adalah Tim Reformasi Birokrasi Setjen MPR, level unit terbagi menjadi: Tim Reformasi Birokrasi Deputi Bidang Administrasi dan Tim Reformasi Birokrasi Deputi Bidang Pengkajian dan Pemasyarakatan Konstitusi. Masin-masing Tim Reformasi Birokrasi di level tersebut kemudian yang terbagi lagi kedalam 8 (delapan) Kelompok Kerja Area Perubahan.

Penutup

Laporan Kinerja Setjen MPR disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi Setjen MPR selama tahun 2021 dalam rangka melaksanakan misi dan mencapai visi. Penyusunan Laporan Kinerja Setjen MPR mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penetapan indikator kinerja merupakan salah satu cara Setjen MPR dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis organisasi. Pencapaian kinerja merupakan perwujudan sinergi seluruh jajaran Setjen MPR dalam menghadapi berbagai tantangan di tahun 2021. Namun demikian, upaya penyempurnaan dan perbaikan indikator kinerja harus terus dilakukan melalui penetapan indikator kinerja yang lebih berkualitas dengan target yang menantang. Laporan Kinerja Setjen MPR merupakan evaluasi yang dilakukan secara akuntabel, sehingga dapat menggambarkan secara rinci terkait apa yang sudah dicapai dan apa yang masih perlu ditingkatkan pada tahun 2021. Validitas dan reliabilitas data maupun informasi menjadi kunci utama penyusunan Laporan Kinerja Setjen MPR ini.

Laporan Kinerja Setjen MPR diharapkan dapat menjadi pemicu positif dalam meningkatkan kinerja Setjen MPR secara komprehensif untuk mewujudkan visi Setjen MPR sebagai "Penggerak Utama Reformasi Birokrasi dalam Memberikan Layanan Internal Kepada MPR dan Alat Kelengkapannya Serta Meningkatkan Kualitas Layanan Publik MPR."

Lampiran

Perjanjian Kinerja Tahun 2021 Sekretaris Jenderal MPR

SEKRETARIAT JENDERAL
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA

UNIT ORGANISASI ESELON I : SEKRETARIAT JENDERAL MPR RI
TAHUN ANGGARAN : 2021

SASARAN STRATEGIS/PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)
Meningkatnya kepuasan MPR RI dan alat kelengkapan terhadap layanan Setjen MPR RI	Indeks kepuasan MPR RI terhadap dukungan Setjen MPR RI	3.2 (Indeks)
Terwujudnya Birokrasi Setjen MPR RI Berkelas Dunia	Indeks Reformasi Birokrasi Setjen MPR RI	76.95 (Nilai)
	Tingkat pemenuhan layanan internal Sekretariat Jenderal MPR RI	86 (Persen)
Terselenggaranya dukungan bidang pengkajian dan pemasyarakatan konstitusi, serta penyerapan aspirasi masyarakat yang berkualitas kepada MPR	Rasio draft hasil kajian sistem ketatanegaraan Setjen MPR RI yang dimanfaatkan terhadap total draft hasil kajian sistem ketatanegaraan yang dihasilkan	100 (Persen)
	Rasio masyarakat yang mendapatkan sosialisasi 4 (empat) pilar terhadap total yang direncanakan	92 (Persen)
	Rasio tindak lanjut aspirasi masyarakat terhadap total aspirasi masyarakat	100 (Persen)
Terselenggaranya dukungan bidang administrasi yang berkualitas kepada MPR	Indeks kepuasan MPR RI terhadap dukungan administrasi	3,2 (Indeks)
Meningkatnya pelaksanaan 8 (delapan) area perubahan Setjen MPR RI	Nilai Komponen Pengungkit Reformasi Birokrasi Setjen MPR RI	43.90 (Nilai)
Meningkatnya Kualitas tata kelola birokrasi Setjen MPR	Total nilai kriteria hasil Reformasi Birokrasi Sekretariat Jenderal MPR RI	32,95 (Nilai)
Terselenggaranya layanan internal Setjen MPR RI	Tingkat pemenuhan layanan internal Sekretariat Jenderal MPR RI	86 (Persen)

1.	Program Penyelenggaraan Lembaga Legislatif dan Alat Kelengkapan	Rp.	536.542.637.000
2.	Program Dukungan Manajemen	Rp.	214.329.047.000

Jakarta, Maret 2021
Sekretaris Jenderal,

Dr. MA'RUF CAHYONO, S.H., M.H.
NIP. 19670429 199503 1 001

Lampiran

Checklist Reviu Inspektorat

SEKRETARIAT JENDERAL
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 6, Jakarta Pusat 10270
Telepon 57895285 Faksimili 57895178, website:mpr.go.id

CHEKLIST REVIU

LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT JENDERAL MPR RI TAHUN 2021

No	Pernyataan		Cheklist
I.	Format	1. Laporan Kinerja (LKj) telah menampilkan data penting Sekretariat Jenderal MPR RI	√
		2. Telah menyajikan akuntabilitas keuangan	√
		3. LKj telah menyajikan informasi target kinerja	√
		4. LKj telah menyajikan capaian kinerja Sekretariat Jenderal MPR RI yang memadai	√
		5. Telah menyajikan dengan lampiran yang mendukung informasi pada badan laporan	√
		6. Telah menyajikan upaya perbaikan ke depan	√
II.	Mekanisme penyusunan	1. LKj IP disusun oleh unit kerja yang memiliki tugas fungsi untuk itu	√
		2. Informasi yang disampaikan dalam LKj telah didukung dengan data yang memadai	√
		3. Telah terdapat mekanisme penyampaian data dan informasi dari unit kerja ke unit penyusun LKj	√
		4. Telah ditetapkan penanggung jawab pengumpulan data/ informasi di setiap unit kerja	√

No	Pernyataan		Cheklist
		5. Data/informasi kinerja yang disampaikan dalam LKj telah diyakini keandalannya	√
		6. Analisis/penjelasan dalam LKj telah diketahui oleh unit kerja terkait	√
		7. LKj Sekretariat Jenderal MPR RI bukan merupakan gabungan unit kerja di bawahnya.	√
III.	Substansi	1. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam perjanjian kinerja	√
		2. Tujuan/sasaran dalam LKj telah selaras dengan rencana strategis	-
		3. Jika butir 1 dan 2 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai	√
		4. Target Indikator Kinerja Tujuan/ sasaran dalam LKj telah sesuai dengan target indikator kinerja tujuan/ sasaran dalam perjanjian kinerja.	√
		5. IKU pada LKj telah sesuai dengan dokumen IKU yang ditetapkan	-
		6. Jika butir 4 dan 5 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai	√
		7. Telah terdapat perbandingan data kinerja dengan tahun lalu, standar nasional dan sebagainya yang bermanfaat	√
		8. IKU dan IK telah cukup mengukur tujuan/sasaran	√
		9. Jika "tidak" telah terdapat penjelasan yang memadai	-
		10. IKU dan IK telah SMART	√

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

#bangga melayani bangsa

SETJEN MPR RI

SEKRETARIAT JENDERAL
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA